

**KAJIAN KERJA SAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Universitas Diponegoro Semarang**

Oleh :

**WAHYUDI  
L4D 008 119**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2010**

**KAJIAN KERJA SAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**W A H Y U D I**  
**L4D 008 119**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal : Maret 2010

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Magister Teknik

Semarang, Maret 2010

Tim Penguji :

Rukuh Setiadi, ST, MEM – Pembimbing  
Yudi Basuki, ST, MT – Penguji  
Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc – Penguji

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

**Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apa bila dalam Tesis saya ternyata ditemukan duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang,     Maret 2010

**WAHYUDI**  
NIM. L4D 008 119

## LEMBAR PERSEMBAHAN

### **My God, Allah SWT**

*Subhanallah.... Kuasamu Tak henti-hentinya memberikan anugrah yang seringkali tak kusadari, maaf jika hambamu seringkali merasa kurang mensyukuri rahmat-Mu, namun segala pujian dan senandung keagungan takkan pernah lupa kulantunkan untuk-Mu...*

### **Muhammad SAW**

*The Prophet untuk prinsip dan keteladanannya, sunnah Mu menjadikan hidup lebih hidup.*

Dan Allah akan  
meninggikan derajat orang-orang berilmu diantara kamu dan Allah mengetahui  
apa-apa yang kamu kerjakan.  
**(QS. Al Mujadalah: 11)**

Kupersembahkan karya ku ini untuk :

- ❖ Ayahanda tercinta **H. Nurhadi** dan Ibunda **Hj. Dinarsih** atas semua doa yang tak pernah berhenti terucap
- ❖ Istriku tercinta : Sir Panggung Tri Subekti  
Putra-putriku yang manis : Sir Chandra Sanidhya Phratiwi  
Sir Arkha Shatvika Dhita  
Sir Cahyatterra Kinaryoshi  
terima kasih atas doa, pengorbanan dan dukungannya
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan di MTPWK Undip-PU Angkatan 2008 **Laskar Tembalang** (Bang Djun, Hendra, Pak Martin, Ova, Eko, Elsa, Mba Nova, Mba Novi, Mba Ita, Mba Nia, Pak Yunus, Syafrudin , Pak Yuwono, dan Danang).

## ABSTRAK

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng (*Dieng Plateau*) terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kawasan andalan ini sebagai kawasan strategis dengan fungsi lindung yang mempunyai potensi pariwisata sangat tinggi baik pariwisata alam, berupa : pemandangan alam, air terjun dan telaga warna, maupun pariwisata budaya berupa situs purbakala (Komplek Candi Hindu) dan atraksi budaya. Sebagai kawasan wisata di berbatasan wilayah administrasi tidak terlepas dari gejala negatif adanya otonomi daerah dengan adanya ego dan sentimen kedaerahan. Untuk menghilangkan ego kedaerahan dicoba dengan menjalin kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan pada kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kerja sama daerah, merumuskan gap/kesenjangan dukungan dan hambatan kedua kabupaten dalam kerja sama daerah, dan merumuskan format kelembagaan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara deskriptif dan komparatif dengan menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, surat perjanjian kerja sama daerah, serta notulen rapat-rapat koordinasi serta wawancara dengan teknik *purposive* dan *snowballing* terhadap *stakeholder* kedua pemerintah kabupaten serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian diperoleh bahwa kedua kabupaten telah mengerti penting dan manfaatnya kerja sama daerah dan perlunya kerja sama daerah pada kawasan yang mempunyai kepentingan sama yang terletak di perbatasan administratif. Dukungan kedua pemerintah kabupaten masih kurang dan belum optimal. Kurangnya dukungan pada penganggaran dan pemahaman perlunya kelembagaan dalam kerja sama daerah. Hambatan kerja sama daerah yang ada adalah ego daerah, perbedaan kepentingan, belum adanya identifikasi kebutuhan sektor yang dikerjasamakan, kewenangan pengelolaan dan alokasi dana.

Dengan menganalisis kesenjangan format kelembagaan antara kajian pustaka, *best practice* dan peran yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan provinsi diperoleh rumusan format kelembagaan pada kawasan Dataran Tinggi Dieng nantinya adalah Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) sebagai badan koordinasi keterpaduan lintas kabupaten dengan sektor yang dominan pada ruang, pariwisata, dan infrastruktur. Kelembagaan pada sektor pariwisata adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan personil profesional di bidang pariwisata sehingga terhindar dari *conflict of interest* masing-masing pemerintah kabupaten.

**Kata Kunci** : kerja sama daerah pariwisata, dukungan dan hambatan, format kelembagaan

## **ABSTRACT**

*Dieng Plateau Tourism area is located in Banjarnegara and Wonosobo districts. This plateau region has become strategic area functioning as conservation area which has high tourism potential, not only natural tourism such as natural scenery, waterfall and telaga warna but also cultural tourism such ancient heritage sites (Hinduism temple complex ) and cultural attractions. As a tourism region, it is visible that among its administration area borders there is negative sign of local autonomy by local ego and sentiment grudge. To decrease the problem, there shall be cooperation among interested parties toward tourism area of Dieng Plateau. Hence, the objective of this observation is to identify the factors supporting local cooperation, to formulate gap/discrepancy of support and the obstacles the two districts face during the local cooperation and to formulate local cooperation institutional formation into management and development of Dieng Plateau Tourism area.*

*In this observation, the author uses descriptive-comparative qualitative analysis to analyze documents of policy, local MoU and notation on coordination meetings, and interview that is conducted by purposive and snowballing techniques toward stakeholder of both parties and also Cultural and Tourism Affairs Bureau of Central Java.*

*From the observation result it is seen that both districts has understood the importance and benefit of local cooperation on the regions having some interest which are located on the administrative borders. The support from both governments is still lack and not yet optimum. There is lack of support for budgeting and understanding of the need for institution in local cooperation. The obstacles hindering the local cooperation are local ego, different interest, lack of identification on cooperation sector, authority on management and budget allocation.*

*By analyzing the gap/discrepancy such as literature study, best practice and role by the district and province governments, the formulation of the institutional format of Dieng Plateau is formulated in a form of BKAD (institution for inter-region cooperation) as an integrated inter-district coordination institution with its dominant sectors of space, tourism, and infrastructure. The institution on tourism sector is BUMD (Local Corporate Body) managed by professional members on tourism sector to avoid conflict of interest among local government.*

**Keywords :** *tourism local cooperation, supports and obstacles, institutional formation*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **Kajian Kerja Sama Daerah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar S2 Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membantu, hingga laporan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, khususnya kepada:

1. Bupati dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan kesempatan penulis dengan memberikan ijin Tugas Belajar pada program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang;
2. Pusbitek Departemen Pekerjaan Umum yang telah memberikan beasiswa, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Hasto Agoeng Sapoetro, S.ST, MT selaku Kepala Balai PKPWTK Semarang;
4. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang;
5. Rukuh Setiadi, ST, MEM selaku dosen pembimbing;
6. Yudi Basuki, ST, MT selaku dosen penguji;
7. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku dosen penguji;
8. Bapak, Ibu, istriku, anak-anakku atas semua kasih sayang, cinta, pengorbanan material maupun non material dan dorongan semangat;
9. Teman-teman kuliah MTPWK angkatan 2008 yang telah menjadi teman diskusi dan memberikan dorongan semangat.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak yang perlu disempurnakan. Untuk itu saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini nantinya. Semoga laporan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak.

Semarang, Maret 2010

**W a h y u d i**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Sasaran Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4.1 Ruang Lingkup Spasial .....	7
1.4.2 Ruang Lingkup Materi .....	9
1.6 Kerangka Pemikiran .....	9
1.7 Metode penelitian .....	12
1.7.1 Metode Penelitian .....	12
1.7.2 Kebutuhan Data .....	12
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data .....	14
1.7.4 Teknik Penyajian Data .....	14
1.7.5 Teknik <i>Sampling</i> .....	14
1.7.6 Teknik Analisis .....	15
1.7.7 Kerangka Analisis .....	16
1.8 Keaslian Penelitian .....	19
1.9 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KAJIAN KERJA SAMA DAERAH DAN PARIWISATA ...</b>	<b>21</b>
2.1 Kerja Sama Antar Daerah .....	21
2.2 Membangun Kerja sama Daerah .....	24
2.2.1 Bidang-bidang Kerja Sama Daerah .....	25
2.2.2 Bentuk Kerja Sama Daerah .....	26
2.2.3 Dasar Hukum Kerja Sama Antar Daerah .....	32
2.2.4 Peran dalam Penguatan Kerja Sama Antar Daerah .	33
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama Daerah ...	35

2.4	Keberhasilan Kerja Sama Daerah .....	37
2.5	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata .....	42
2.5.1	Pengertian Kelembagaan .....	48
2.5.2	Struktur Organisasi .....	50
2.5.3	Tata Laksana Kerja .....	50
2.5.4	Personalia .....	51
2.6	<i>Best Practice</i> Kelembagaan Kerja sama Daerah dan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata .....	51
2.6.1	BKSAD/BKAD Subosukawonosraten .....	51
2.6.2	Regional Managemen (RM) Barlingmascakeb) ....	54
2.6.3	Sekretariat Bersama Kartamantul .....	57
2.6.4	Bali <i>Tourism Development Corporation</i> (BTDC) ...	61
2.7	Sintesa Teori .....	65

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG .....</b>	<b>71</b>
3.1	Sejarah dan Perkembangan Dataran Tinggi Dieng .....	69
3.2	Karakteristik Fisik Kawasan Dataran Tinggi Dieng .....	72
3.2.1	Lokasi dan Batas Wilayah .....	72
3.2.2	Kondisi Topografi .....	73
3.2.3	Kondisi Klimatologi .....	73
3.2.4	Kondisi Hidrologi .....	74
3.3	Kondisi Sosial Budaya .....	75
3.4	Potensi Kawasan Dataran Tinggi Dieng .....	76
3.4.1	Potensi Hutan Lindung .....	76
3.4.2	Potensi Pertanian .....	76
3.4.3	Potensi Panas Bumi .....	77
3.4.4	Potensi Pariwisata .....	77
3.5	Kondisi Kunjungan Wisatawan Dataran Tinggi Dieng ....	79
3.6	Kerja Sama Pariwisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng ...	81
3.6.1	Kerja Sama Periode Tahun 1974–1977 .....	81
3.6.2	Kerja Sama Periode Tahun 1977–1978 .....	81
3.6.3	Kerja Sama Periode Tahun 1978–1992 .....	81
3.6.4	Kerja Sama Periode Tahun 1992–1995 .....	82
3.6.4.1	Program Jangka Pendek .....	82
3.6.4.2	Prgram Jangka Menengah .....	82
3.6.4.3	Program Jangka Panjang .....	83
3.6.2	Kerja Sama Periode Tahun 1995–1996 .....	83
3.6.3	Kerja Sama Periode Tahun 1996–2000 .....	84
3.6.4	Kerja Sama Periode Tahun 2000–2002 .....	85
3.6.5	Kerja Sama Periode Tahun 2002–2005 .....	85
3.6.6	Kerja Sama Periode Tahun 2005–2006 .....	86
3.6.7	Kerja Sama Periode Tahun 2006–2008 .....	87
3.6.8	Kerja Sama Periode Tahun 2008–2012 .....	88

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KERJA SAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG</b>	<b>89</b>
4.1	Analisis Faktor-faktor Pendorong Kerja Sama Daerah Pariwisata	89
4.1.1	Analisis Persepsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	89
4.1.1.1	Analisis Persepsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	90
4.1.1.2	Analisis Persepsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	91
4.1.1.3	Analisis Persepsi Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	92
4.1.2	Analisis Faktor-faktor Pendorong Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	94
4.1.2.1	Analisis Faktor Pendorong Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	94
4.2	Analisis Kebijakan-kebijakan yang Telah Dilakukan dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	111
4.2.1	Analisis Kebijakan Kabupaten Wonosobo dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengem- bangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	111
4.2.2	Analisis Kebijakan Kabupaten Banjarnegara dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengem- bangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	117
4.2.3	Analisis Kebijakan-kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	123
4.3	Analisis Format Kelembagaan Kerja Sama Daerah dari Kajian Pustaka dan <i>Best Practice</i>	130
4.4	Analisis Peran yang Telah Dilakukan dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng	137
4.4.1	Analisis Peran Kabupaten Banjarnegara dan	

	Kabupaten Wonosobo dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	137
4.4.2	Analisis Peran Provinsi Jawa Tengah dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	143
4.5	Rumusan Format Kelembagaan dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	145
4.6	Temuan Studi .....	153
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>155</b>
5.1	Kesimpulan .....	155
5.2	Rekomendasi .....	156
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>157</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>161</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I.1</b>	Daftar Kebutuhan Data Penelitian .....	13
<b>TABEL II.1</b>	Interaksi Kerja Sama Antar Daerah .....	22
<b>TABEL II.2</b>	Pendapat Beberapa Pakar Tentang Variabel-Variabel Penelitian .....	68
<b>TABEL III.1</b>	Jumlah Penduduk Kawasan Dataran Tinggi Dieng .....	75
<b>TABEL III.2</b>	Jumlah Kunjungan Wisatawan .....	80
<b>TABEL IV.1</b>	Persepsi Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Wisata Dieng .....	93
<b>TABEL IV.2</b>	Objek Wisata Kawasan Poros Wisata Dieng .....	95
<b>TABEL IV.3</b>	Sebaran Objek Wisata di Kawasan Jeruji Wisata Dieng	96
<b>TABEL IV.4</b>	Sintesa Analisis Gap/Kesenjangan Faktor Pendorong Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	107
<b>TABEL IV.5</b>	Matrik Kerja Sama Lintas Kabupaten Banjarnegara .....	117
<b>TABEL IV.6</b>	Sintesa Analisis Gap/Kesenjangan kebijakan Daerah dan Dukungan dan Hambatan Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	126
<b>TABEL IV.7</b>	Perbandingan Bentuk Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah .....	133
<b>TABEL IV.8</b>	Sintesa Analisis Gap/Kesenjangan Format Kelembagaan Kajian Pustaka dan <i>Best Practice</i> dengan Peran Pemerintah dalam Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	146

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b>	Peta Ruang Lingkup Wilayah Studi.....	8
<b>GAMBAR 1.2</b>	Kerangka Pemikiran Studi .....	11
<b>GAMBAR 1.3</b>	Kerangka Analisis .....	18
<b>GAMBAR 2.1</b>	Komponen Wisata .....	43
<b>GAMBAR 2.2</b>	Model Kelembagaan Pembangunan .....	49
<b>GAMBAR 2.3</b>	Struktur Organisasi BKAD Subosukawonosraten .....	52
<b>GAMBAR 2.3</b>	Struktur Organisasi RM Barlingmascakeb .....	55
<b>GAMBAR 2.3</b>	Struktur Organisasi Sekretariat Kartamantul .....	59
<b>GAMBAR 2.3</b>	Struktur Organisasi BTDC .....	63
<b>GAMBAR 3.1</b>	Peta Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	72
<b>GAMBAR 3.2</b>	Foto Ruwatan Cukur Rambut Gembel .....	75
<b>GAMBAR 3.3</b>	Foto Pertanian Kentang Dieng .....	77
<b>GAMBAR 3.4</b>	Foto Kelompok Candi Dieng .....	78
<b>GAMBAR 3.5</b>	Foto Dieng <i>Plateau Theatre</i> .....	79
<b>GAMBAR 3.6</b>	Struktur Organisasi Badan Pembina dan Badan Pengelola Harian .....	84
<b>GAMBAR 4.1</b>	Jalur Aksesibilitas Menuju Kawasan Wisata Dieng Melewati Kabupaten Wonosobo .....	98
<b>GAMBAR 4.2</b>	Foto Longsor Aksesibilitas ke Dieng di Desa Tieng Kabupaten Wonosobo .....	99
<b>GAMBAR 4.3</b>	Foto Papan Nama Sekber Pengelolaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng .....	115
<b>GAMBAR 4.4</b>	Konsep Kelembagaan Pengembangan Kegiatan Dominan di Kawasan Wisata Dieng .....	130
<b>GAMBAR 4.5</b>	Konsep Kelembagaan Koordinasi Antar Pemerintah Daerah .....	131
<b>GAMBAR 4.6</b>	Konsep Kelembagaan Pemerintah Pusat Dengan Membentuk Badan Otorita .....	131
<b>GAMBAR 4.7</b>	Konsep Kelembagaan Kerja Sama Antar Pemerintah Kabupaten dengan Membentuk Badan Otorita .....	132
<b>GAMBAR 4.8</b>	Konsep Kelembagaan Pengelolaan Swasta .....	133
<b>GAMBAR 4.9</b>	Kelembagaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng ..	151

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1</b>	Panduan Wawancara .....	<b>161</b>
<b>LAMPIRAN 2</b>	Hasil Wawancara .....	<b>167</b>
<b>LAMPIRAN 3</b>	Kodefikasi Data .....	<b>191</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepariwisata meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lain yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk keindahan alam, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala.

Pariwisata berkembang menjadi industri pariwisata yang melibatkan kepentingan berbagai pihak (Spillane, 1994) bahkan antar daerah atau antar negara. Pariwisata berpengaruh luas secara ekonomi dan sosial budaya. Kepariwisata juga berdimensi politik, pertahanan dan keamanan, melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga memerlukan koordinasi berbagai sektor baik secara lokal, regional, dan ruang lingkup nasional. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan perlu dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya.

Dalam pengembangan potensi wisata akan terjadi saling ketergantungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan daerah yang lebih luas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi diyakini akan mendorong daerah untuk lebih bersikap mandiri karena memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengontrol daerahnya sendiri. Kemandirian tersebut, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, termasuk pengelolaan pariwisata daerah yang lebih profesional dan mengena.

Otonomi memberikan kesempatan kepada kabupaten/kota untuk melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota dan atau yang berbatasan. Dalam kenyataannya tidak semua sumber daya yang dibutuhkan daerah di dalam membangun atau menyelenggarakan pelayanan publik dimiliki oleh daerah, oleh

karena itu daerah memerlukan daerah lain untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkannya. Adanya keterbatasan anggaran belanja publik dalam suatu daerah sehingga apabila daerah satu dengan daerah yang lain memiliki tujuan yang sama maka kerja sama merupakan jawaban untuk efisiensi terhadap penggunaan anggaran daerah. Hal-hal tersebut menjadikan daerah-daerah yang bersangkutan merasa perlu untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan upaya pencapaian beberapa keinginan daerah yang muncul tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah disikapi secara variatif oleh beberapa pemerintah daerah. Misalnya mereka mempersepsikan otonomi sebagai momentum untuk memenuhi keinginan-keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berdekatan. Akibatnya, muncul beberapa gejala negatif yang meresahkan antara lain berkembangnya sentimen primordial, konflik antar daerah, berkembangnya proses korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), konflik antar penduduk, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan munculnya sikap “ego daerah” yang berlebihan. Kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingannya sendiri, dan menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Ancaman yang paling serius adalah munculnya paradigma sektoral yang menggilas peran lintas sektoral pariwisata. Tema pariwisata Indonesia akan makin mengendur ditelan tema-tema kedaerahan, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap pembangunan faktor pendukung pariwisata seperti aksesibilitas, amenitas, atraksi, maupun promosi. Dari segi pertumbuhan usaha, keadilan berusaha dalam bidang wisata menjadi terganggu, sebab tidak mustahil seorang pelaku bisnis yang berasal dari daerah lain misalnya dalam pariwisata akan mendapat kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya di daerah karena hambatan blokade sentimen kedaerahan itu. Ancaman lain dapat berupa ketidakadilan dalam memberlakukan dan menarik pajak bagi daerah dari industri pariwisata. Kewajiban perda untuk memacu penerimaan daerah melalui pajak dan pungutan lain yang sah, dikuatirkan malah akan membengkak dibanding sebelum diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999.

Secara umum belum tampak adanya upaya pusat dan daerah dalam memanfaatkan strategi dan mendorong proses regionalisasi desentralistik yaitu terbentuknya keterikatan antar daerah otonom yang bertetangga sehingga membentuk suatu region atas inisiatif regional secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan: a) minimnya kesiapan perangkat perundang-undangan yang mendukung proses tersebut, terutama yang melekat pada undang-undang otonomi daerah; b) masih adanya kebiasaan penggunaan pola sentralistik yang kontradiktif dengan pendekatan desentralistik sehingga mengakibatkan gesekan dan berbagai kebuntuan di lapangan; c) keterbatasan *know how* dan kemampuan untuk menggunakan strategi regionalisasi desentralistik yang sesuai dengan situasi serta kondisi di lapangan oleh para pelaku pembangunan. Dari beberapa contoh kelemahan diatas maka banyak upaya regionalisasi saat ini masih berhenti pada tataran MoU (surat kesepakatan bersama) atau kurang terasa manfaatnya (Abdurrahman, 2005).

Kawasan Dataran Tinggi Dieng (*Dieng Plateau*) terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, batas alam yang memisahkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo adalah adanya Kali Tulis yang mata airnya berada di Pegunungan Dieng. Kawasan ini telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Jawa Tengah sebagai salah satu Kawasan Andalan yang pengembangannya perlu terus dipacu dan terpadu dengan dukungan secara lintas wilayah dan sektoral, melalui penyediaan fasilitas prasarana dan sarana wisata yang memadai sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan sebagai kawasan strategis dengan fungsi lindung (RIPP Jawa Tengah, 2004) yang mempunyai potensi pariwisata sangat tinggi baik pariwisata alam, berupa pemandangan alam, air terjun dan telaga warna, maupun pariwisata budaya berupa situs purbakala (Komplek Candi Hindu) dan atraksi budaya yang merupakan tradisi masyarakat Wonosobo. Atraksi tersebut antara lain ruwatan cukur rambut gembel, upacara ujugan, dan tari lengger.

Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dipetakan menjadi kawasan poros dan kawasan jeruji. Kawasan poros adalah kawasan wisata Dieng yang memiliki objek-objek wisata yang menjadi ikon atau penggerak aktivitas pariwisata di Kawasan Wisata Dieng. Kawasan Jeruji adalah kawasan wisata Dieng yang

memiliki objek-objek wisata yang mendukung objek-objek wisata yang berada dalam kawasan poros (Disbudpar Wonosobo, 2005). Sejak memasuki pasar wisata global tahun 1970, Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dieng telah memiliki *positioning* sebagai *the Nepal of Indonesia*, karena memiliki bangunan candi-candi Hindu di sana-sini, yang terletak di tengah hutan pegunungan yang lebat dan berhawa sangat dingin. Sejak itu wisatawan mancanegara mulai berdatangan ke Dieng. Wisman yang datang lewat Yogyakarta pasti menetapkan Dieng sebagai salah satu tujuan kunjungan, disamping Borobudur, Prambanan, Surakarta.

Sebagai kawasan wisata di berbatasan, wilayah administrasi tidak terlepas dari gejala negatif adanya otonomi daerah. Pada tahun 2005 ada wacana di kalangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengubah Kecamatan Batur Banjarnegara menjadi Kecamatan Dieng. Pengubahan nama itu bertujuan untuk meluruskan kekeliruan pemahaman seolah objek wisata Dieng identik dengan Wonosobo. Padahal, sebagian terbesar objek wisata terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Selama ini orang luar daerah menganggap Dieng identik dengan Wonosobo hanya karena lebih dekat dan mudah dijangkau dari arah Wonosobo. Secara geografis dan administratif 80 persen objek wisata di Dataran Tinggi Dieng terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dengan diubahnya nama Kecamatan Batur menjadi Kecamatan Dieng, diharapkan akan berubah pula *'brand image'* objek wisata itu menjadi Dieng Banjarnegara (www.banjarnegarakab.go.id, 2005). Untuk menghilangkan ego kedaerahan dicoba dengan menjalin kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan pada Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Inisiatif kerja sama pengelolaan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo sudah digagas sejak tahun 1974. Kesepakatan kerja sama terwujud pada tahun 1995 dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo tentang Kerja Sama Pengelolaan Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng. Pada tahun 2000 oleh kalangan DPRD Kabupaten Banjarnegara, SKB tahun 1995 dirasa belum mencerminkan suatu keadilan, sehingga muncullah berbagai saran dan usulan untuk meninjau kembali peraturan pembagian hasil pendapatan objek wisata Dataran Tinggi Dieng, sehingga pengelolaan dilakukan oleh masing-

masing kabupaten. Sampai tahun 2000 bagi hasil pendapatan untuk Kabupaten Banjarnegara hanya 22 juta/tahun, sedangkan dengan dikelola sendiri pendapatan bisa mencapai 285 juta pada tahun 2004 ([www.banjarnegarakab.go.id](http://www.banjarnegarakab.go.id), 2005). Pada tahun 2005 dilaksanakan kembali Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara tentang Pengembangan Kepariwisata di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan, pengelolaan dan pengembangan masih dilakukan masing-masing pemerintah daerah. Kerja sama yang sudah ada berupaya untuk mengembangkan dan mengelola kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng secara bersama-sama dan profesional, akan tetapi pada kenyataannya masih dikelola oleh masing-masing kabupaten dan kerja sama belum bisa diimplementasikan secara optimal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kerja sama daerah dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata dapat menghilangkan ego kedaerahan, meredam konflik antar penduduk, memperingan pembiayaan daerah, dan pengembangan kawasan wisata yang lebih terpadu dan saling mendukung. Dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar suatu kerja sama berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, serta target dan tujuan tercapai. Adanya kerja sama daerah antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo yang setengah-tengah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang dilakukan sendiri-sendiri oleh daerah karena alasan kewenangan dan kepentingan daerah merupakan penyekatan terhadap pengembangan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang justru akan mendegradasi serta memarginalkan pengembangan sektor pariwisata.

Sekretariat bersama yang diharapkan sebagai *entry point* adanya badan pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara profesional yang mampu membangkitkan keterpurukan pariwisata Dieng, meningkatkan perekonomian di bidang pariwisata, serta menjembatani koordinasi antar pihak sektoral maupun regional tidak berjalan. Bagaimana bentuk kelembagaan, pendanaan atau pembagian pendapatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata belum bisa dirumuskan sampai akhir tahun 2008.

Karena itu, aspek yang kemudian bisa dijadikan beberapa rumusan masalah yang kemudian akan dibahas dalam bentuk pembahasan yang bersifat ilmiah sehingga bisa dirumuskan dalam sebuah konsep yang jelas dalam merumuskan *gap*/kesenjangan dukungan dan hambatan kedua pemerintah kabupaten dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dan format kelembagaan kerjasama daerah tersebut adalah :

1. Apakah persepsi kedua kabupaten tentang kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sudah sama?
2. Mengapa kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng tidak optimal?
3. Mengapa kelembagaan sekretariat bersama tidak berjalan?

Untuk menjawab permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian (*research question*) yang harus dijawab adalah :

1. Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng?
2. Bagaimana format kelembagaan dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kerja sama pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
2. Merumuskan *gap*/kesenjangan dukungan dan hambatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
3. Merumuskan format kelembagaan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Berdasarkan tujuan studi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam studi ini adalah :

1. Mengidentifikasi persepsi kedua pemerintah kabupaten tentang kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
2. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan kedua pemerintah kabupaten yang terkait dengan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
3. Mengidentifikasi format kelembagaan kerja sama daerah dari kajian pustaka dan *best practice*.
4. Mengidentifikasi peran kedua pemerintah kabupaten yang sudah dilakukan dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
5. Menganalisis *gap*/kesenjangan dukungan dan hambatan kedua pemerintah kabupaten terhadap kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
6. Menganalisis format kelembagaan dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

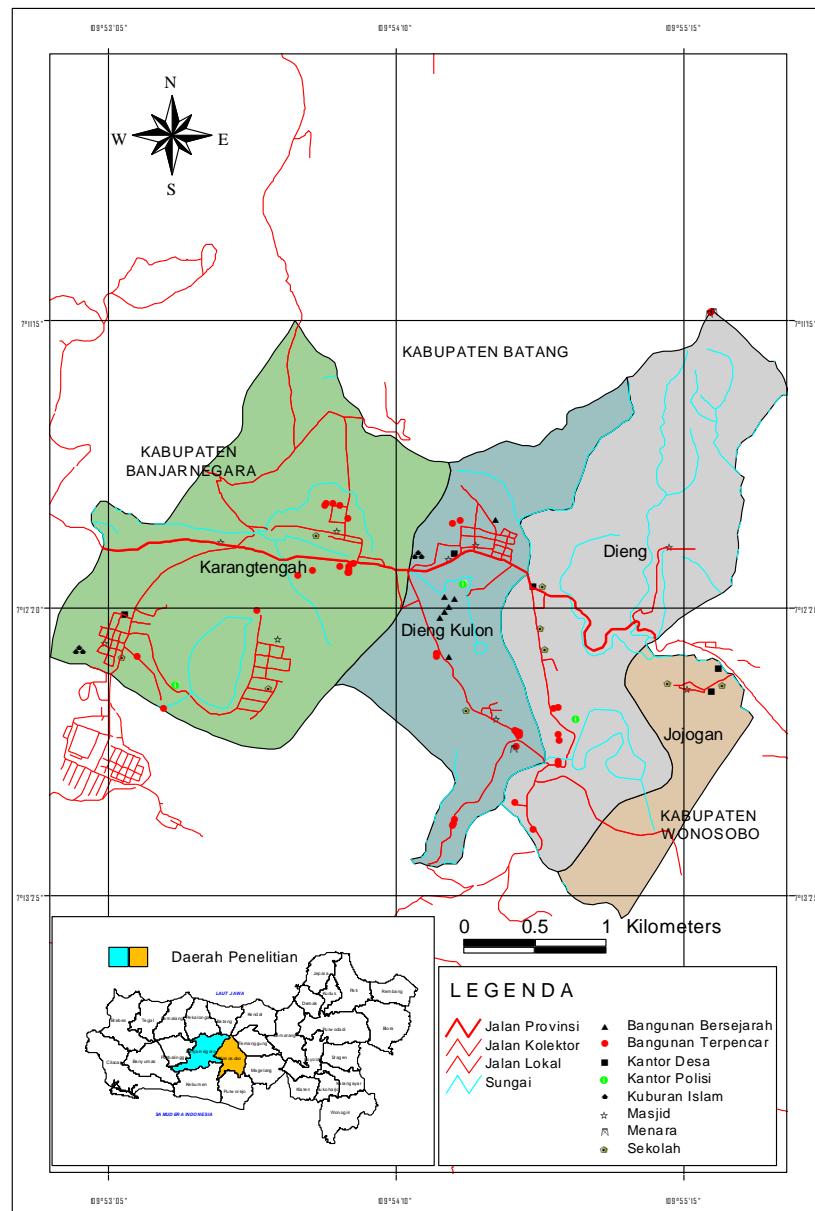
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kerja sama daerah antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo pada kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang berada dalam perbatasan wilayah administratif sebagai salah satu strategi pengelolaan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata yang terpadu.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.5.1 Ruang Lingkup Spasial**

Penelitian ini dibatasi ruang lingkup pada kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Lingkup pengelolaan kawasan wisata Dieng meliputi suatu kawasan yang

terletak pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Batur (Kabupaten Banjarnegara) dan Kecamatan Kejajar (Kabupaten Wonosobo). Tetapi secara khusus untuk memperdalam fokus permasalahan lingkup wilayah studi mencakup 4 desa yang meliputi Desa Dieng Kulon, Desa Karangtengah, di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dan Desa Dieng Wetan dan Desa Jojogan di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Ruang lingkup wilayah studi bisa dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo, 2009

**GAMBAR 1.1**  
**PETA RUANG LINGKUP WILAYAH STUDI**

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Kajian Kerja sama Daerah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng”, maka akan diberi batasan-batasan pengertian menyangkut peristilahan dalam judul tersebut, sebagai berikut :

1. **Kerja sama Daerah.** Pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pada konteks ini, yang dimaksud dengan “daerah” adalah Pemerintah Kabupaten.
2. **Pengelolaan** adalah upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan potensi alam dan budaya dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Dalam konteks penelitian, pengelolaan pariwisata lebih menunjuk pada pengelolaan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sebagai objek kerja sama antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.
3. **Pengembangan** adalah upaya peningkatan pemanfaatan potensi alam dan budaya, dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Dalam konteks penelitian, pengembangan pariwisata lebih menunjuk pada pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sebagai objek kerja sama antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

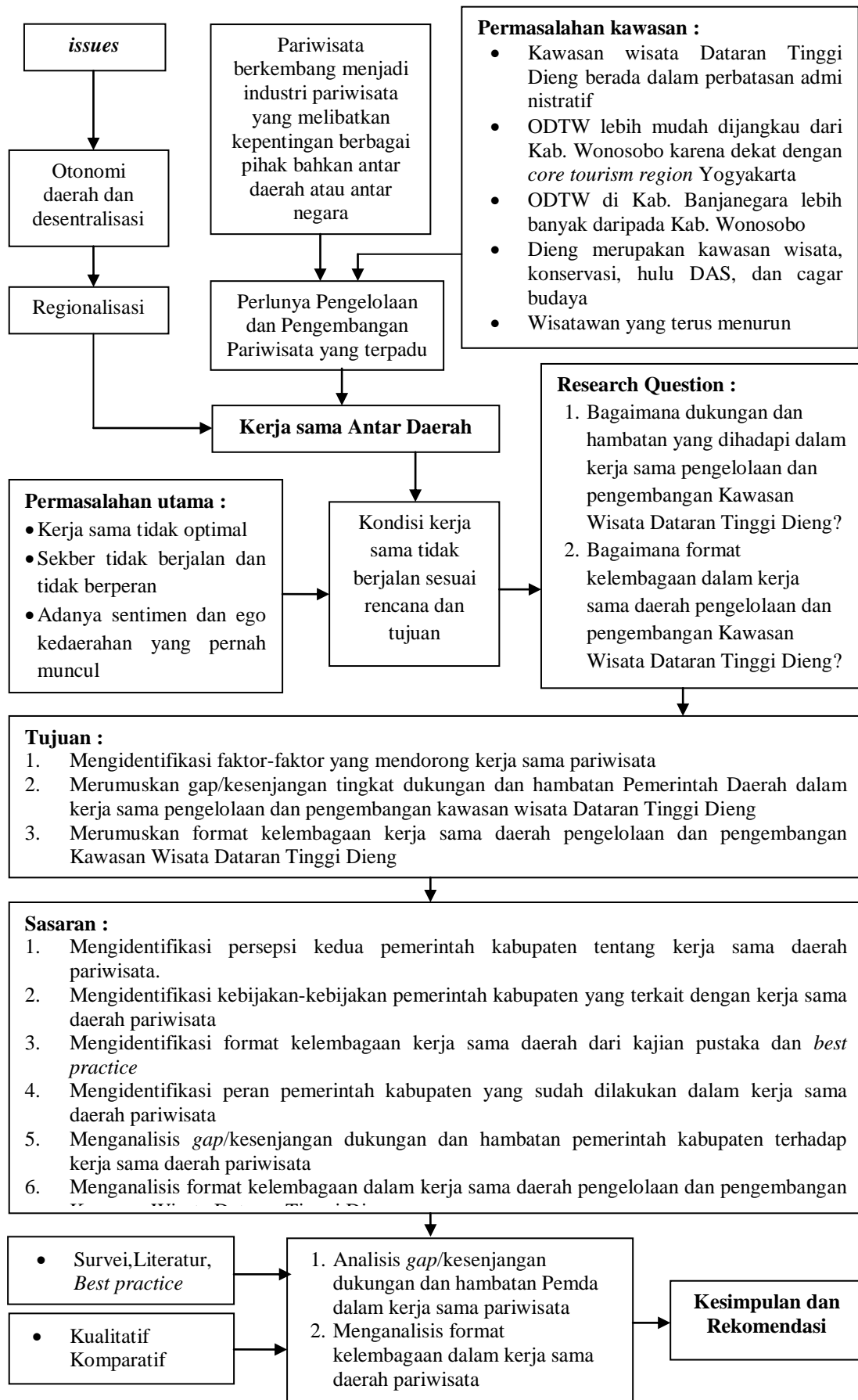
Kajian ini didasari adanya objek wisata yang berada pada wilayah yang berbatasan administrasi, dimana kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata menemui beberapa hambatan. Pertama, kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan pariwisata terpadu yang telah dilaksanakan tidak berjalan seperti yang direncanakan. Kerja sama yang berjalan hanya pada penjualan tiket terusan objek wisata secara bersama. Objek wisata yang dikerjasamakan hanya terbatas pada 4 (empat) objek wisata dan belum menjangkau seluruh kawasan.

Kedua, sekretariat bersama yang ditujukan sebagai embrio badan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata tidak berjalan. Pengelolaan dan pengembangan masih dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten. Masing-

masing kabupaten mengembangkan potensi objek wisata masing-masing tanpa perencanaan yang terpadu. Promosi kawasan wisata sebagai wahana pemasaran pariwisata juga masih dilakukan oleh masing-masing kabupaten.

Ketiga, adanya sentimen masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang pernah muncul salah satunya akan diubahnya nama Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara menjadi Kecamatan Dieng untuk mengubah *image* Dieng di Kabupaten Wonosobo, serta keberatan DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam pembagian hasil pendapatan objek wisata, dapat menjadi indikasi adanya hambatan kerja sama ini.

Hambatan-hambatan ini tidak perlu ada, jika melihat manfaat yang jauh lebih besar diperoleh dengan adanya kerja sama ini. Dengan adanya kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata secara terpadu akan memberikan manfaat untuk mengatasi masalah kesenjangan *supply* dan *demand* pariwisata, degradasi lingkungan di kawasan wisata, serta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar objek pariwisata. Dua kenyataan ini, yaitu adanya kesenjangan antara manfaat dan hambatan dari kerja sama ini menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian. Sedang kerangka pemikirannya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber : Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 1.2**  
**KERANGKA PEMIKIRAN STUDI**

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Metode Penelitian**

Kajian ini akan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran studi yang ingin dicapai. Metode kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya menjangkau informasi secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Pendekatan kualitatif ini diartikan juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (masyarakat, suatu proses dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti mendekati data primer dari sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual, dan kategoris dari data itu sendiri. Sedangkan Miles (1992) menyatakan bahwa, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral.

### **1.7.2 Kebutuhan Data**

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data primer melalui survei (*field research*) yang dilakukan dengan wawancara.

**b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto, et.al., 2001). Dalam hal ini data sekunder diperoleh misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi.

**TABEL I.1**  
**DAFTAR KEBUTUHAN DATA PENELITIAN**

No.	Jenis Data	Sumber	Keterangan
1.	Peraturan-peraturan yang berkaitan kerja sama daerah Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah (Perda)</li> <li>• SK Bupati</li> <li>• Peraturan-peraturan lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pariwisata kedua kabupaten</li> <li>▪ Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li> <li>▪ Bappeda Kabupaten</li> <li>▪ Setda Kabupaten</li> </ul>	Data Sekunder
2	RTRW, RPJP, RPJM, Renstra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda kedua kabupaten</li> <li>▪ Dinas Pariwisata kedua kabupaten</li> <li>▪ Dinas Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	Data Sekunder
3.	Notulen rapat koodinasi kerja sama Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda kedua kabupaten</li> <li>▪ Dinas Pariwisata kedua kabupaten</li> <li>▪ Dinas Pariwisata Provinsi</li> </ul>	Data Sekunder
4.	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Birokrat</li> <li>▪ Instansi terkait</li> </ul>	Data Primer
5	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wilayah Kajian Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng</li> </ul>	Data Primer

Sumber: Penulis, 2010

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder dan kajian literatur untuk keperluan data sekunder, serta pengumpulan data primer untuk keperluan data primer. Teknik untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen kerja sama daerah, peraturan yang ada dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan menganalisa permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor pendukung serta hambatan kerja sama daerah pariwisata Dataran Tinggi Dieng pada kedua kabupaten.

Responden yang dipilih adalah responden yang mengetahui secara tepat permasalahan yang terkait dengan tema kajian. Responden merupakan pimpinan tertinggi dari suatu instansi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan atau responden yang ditunjuk oleh pimpinan instansi karena memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam studi ini.

### **1.7.4 Teknik Penyajian Data**

Data yang diperoleh yang kemudian di analisis disajikan dalam bentuk :

1. Naratif, menyajikan data ke dalam bentuk narasi dalam sebuah paragraf, digunakan untuk menyajikan data kualitatif
2. Tabulasi, menyajikan data-data ke dalam tabel.
3. Diagram, menyajikan data-data dalam bentuk diagram agar mudah dipahami oleh pembaca.
4. Peta, menyajikan data-data yang dituangkan dalam perspektif spasial dengan menggambarkan dalam bentuk peta.

### **1.7.5 Teknik Sampling**

Untuk memperoleh data primer berupa hasil wawancara, maka teknik sampling yang digunakan dalam memilih narasumber yang diwawancarai adalah

dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan *snowball sampling* sebagai alatnya yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar (Sugiono, 2009).

### 1.7.6 Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam mengetahui dukungan dan hambatan kerja sama daerah dan format kelembagaan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian berkaitan dengan dukungan dan hambatan serta format kelembagaan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng instrumennya adalah orang atau *human instrumen*, yaitu peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memiliki bekal teori dan wawasan yang luas mengenai materi yang akan diteliti, sehingga memudahkan dalam bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.

Dalam penelitian ini analisis kualitatif sendiri dilakukan berdasarkan hasil data dari wawancara, pengamatan dan observasi langsung, hasil gambar visual dan pemotretan, serta beberapa data-data instansional yang berkaitan dengan semua materi penelitian ini. Analisis kualitatif sendiri dapat bersifat:

- Deskriptif, yaitu menganalisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kerja sama kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, persepsi pemerintah kabupaten terhadap adanya kerja sama, faktor yang mendorong terjadinya kerja sama, faktor-faktor dukungan dan hambatan pemerintah kedua kabupaten terhadap kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan

kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, serta format kelembagaan yang diinginkan oleh para pelaku (*stakeholders*).

- Komparatif, yaitu membandingkan hasil wawancara kedua kabupaten antara teori dan kenyataan di lapangan.

Secara keseluruhan teknik analisis kualitatif untuk mengkaji dukungan dan hambatan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

### **1.7.7 Kerangka Analisis**

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka kerangka analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Analisis faktor-faktor yang mendorong kerja sama**

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kerja sama pengelolaan dan pengembangan pariwisata kawasan Dataran Tinggi Dieng. Analisis dilakukan dengan menganalisis persepsi kedua kabupaten tentang kerja sama daerah dan faktor pendorong melalui variabel-variabel, keterbatasan daerah, kemauan dan kesamaan kepentingan, peluang perolehan kerja sama dan sumber dana, wadah komunikasi *stakeholders*, adanya format-format legal kerja sama, format keterwakilan dalam organisasi kerja sama, dan jawaban terhadap disintegrasi.

#### **2. Analisis dukungan dan hambatan terhadap kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan pariwisata kawasan Dataran Tinggi Dieng dengan membandingkan faktor pendukung dan hambatan kerja sama antar daerah dari pelaku (*stakeholders*) kedua pemerintahan kabupaten melalui variabel-variabel, yaitu:**

##### **a. Faktor-faktor pendukung :**

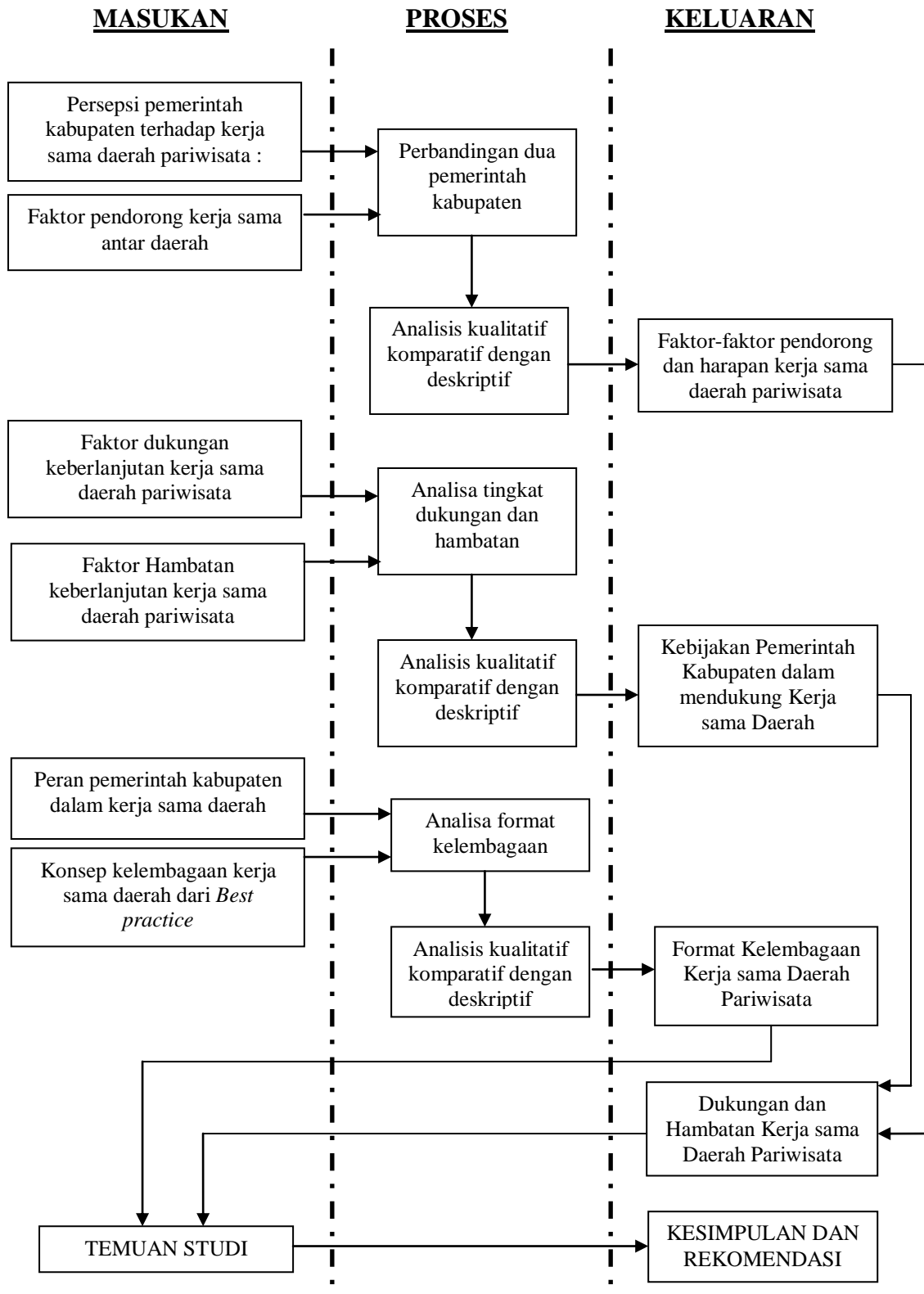
- 1) Komitmen pimpinan daerah
- 2) Identifikasi kebutuhan
- 3) Pengintegrasian dan harmonisasi
- 4) Partisipatif
- 5) Analisa kelembagaan atau model kelembagaan

6) *Champion*.

b. Faktor-faktor penghambat:

- 1) Perbedaan kepentingan dan prioritas
- 2) Belum tumbuhnya kesadaran melakukan kerja sama
- 3) Masalah dana
- 4) Tidak ada dokumen legalitas sebagai payung kerja sama
- 5) Belum adanya mekanisme dan prosedur yang jelas, aplikatif, dan tepat
- 6) *Timing* dan *political will*
- 7) Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah

3. Analisis format kelembagaan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dengan membandingkan konsep kelembagaan yang diinginkan oleh para pelaku (*stakeholders*) dengan konsep kelembagaan yang ada pada kajian pustaka, *best practice* sehingga bisa diambil kesimpulan.



Sumber : Penulis, 2010

**GAMBAR 1.3  
KERANGKA ANALISIS**

### 1.8 Keaslian Penelitian

Sejauh yang peneliti ketahui, tema tesis yang berkaitan dengan kajian kerja sama daerah pernah diteliti oleh Eko Yudhi Hartanto (2009), tetapi terdapat perbedaan antara materi yang dibahas peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, dimana penelitian tersebut berkaitan dengan kerja sama dalam pengelolaan TPA, dengan judul Tesis Konsep Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pengelolaan TPA Regional (Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong), sedangkan peneliti dalam penelitian ini, materi yang dibahas adalah berkaitan dengan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

### 1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran, di bawah ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan yang digunakan, sebagai berikut :

**BAB I** Pada bab ini berisi latar belakang berupa informasi tentang pentingnya kerja sama daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi, berikut pentingnya mengapa penelitian ini harus dilakukan. Dari latar belakang tersebut, kemudian dirumuskan masalahnya dalam bentuk *research question* yang singkat dan jelas. Kemudian berturut-turut dibahas pula tentang tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup *spasial* (wilayah), kerangka pemikiran berupa bagan alir pemikiran secara skematis, serta sistematika penulisannya.

**BAB II** Bab ini berisi kajian teori yang akan membahas secara mendalam studi-studi yang pernah dilakukan serta teori-teori yang mendasari bagi kerja sama daerah dan pariwisata, khususnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata, dengan menelusuri kepustakaan-kepustakaan yang sudah ada secara sistematis dan komprehensif.

**BAB III** Bab ini akan berisi segala data dan informasi yang menjelaskan segala sesuatu tentang wilayah studi, meliputi wilayah yang berada dalam kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

**BAB IV** Dalam bab ini membahas analisis faktor-faktor pendorong kerja sama daerah, kebijakan yang telah dilakukan dalam kerja sama daerah, format kelembagaan dari kajian pustaka dan *best practice*, peran yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam kerja sama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng serta temuan studi.

**BAB V** Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian sebagai langkah lebih lanjut.

## **BAB II**

### **KAJIAN KERJA SAMA DAERAH DAN PARIWISATA**

#### **2.1 Kerja Sama Antar Daerah**

Kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di sini terlihat adanya tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerja sama yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Jika salah satu dari ketiga unsur itu tidak termuat pada suatu objek yang dikaji, maka dapat dianggap bahwa pada objek tersebut tidak terdapat kerja sama (Pamudji, 1985).

Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu himpunan dari kepentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Jika hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak (kepentingan bersama), maka hubungan-hubungan dimaksud bukanlah suatu kerja sama. Di sini terlihat bahwa suatu interaksi, sekalipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerja sama. Atau suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tetapi merugikan pihak-pihak lain, juga bukan suatu kerja sama. Kerja sama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras (Pamudji, 1985). Kerja sama juga menuntut adanya keterpaduan. Semakin besar derajat keterpaduan maka akan semakin besar pula derajat kerja samanya. Tanpa adanya keterpaduan maka tidak akan ada kerja sama (Kusnadi, 2002). Selanjutnya Carmen dalam Winarso (2002) memberikan wawasan tentang kerja sama dari berbagai perspektif, antara lain:

- mitra adalah *co-owners*,
- pelaku kerja sama adalah kontributor sekaligus "pewaris",
- posisi egaliter antara pelaku kerja sama,
- pengedepanan prinsip hubungan horisontal, serta
- penekanan kembali bahwa mitra bukan merupakan "pihak lain",
- memanfaatkan sebesar mungkin keuntungan komparatif dari mitra kerja

sama, tanpa mengabaikan sama sekali potensi mitra kerja sama,

- menekankan pada pentingnya "*bottom-up cooperation*" daripada "*top-down cooperation*" yang umumnya difasilitasi pemerintah (atasan).

Ada beberapa pengertian dari daerah yaitu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Sedangkan daerah dalam penulisan ini adalah Daerah Otonom seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yaitu daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian kerja sama dan pengertian daerah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih yang mempunyai batas wilayah secara administratif, dalam posisi yang setingkat, seimbang dan terpadu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Pamudji (1985), dalam kerangka kerja sama antar daerah ini harus dihindarkan gejala egoisme regional dalam proses-proses penetapan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Kesepakatan atas prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan, kesepakatan tentang objek yang dikerjasamakan, serta cara penanganannya, susunan organisasi dan personalia dari masing-masing pihak yang dilibatkan sebagai penanggung jawab dalam proyek, kesepakatan tentang biaya, serta jangka waktu kerja sama sudah harus tertuang dalam peraturan bersama yang disetujui masing-masing pihak. Secara teoritis, kerja sama dapat dipahami sebagai berikut :

**TABEL II.1**  
**INTERAKSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH**

Interaksi Antara A dan B		A		
		Rugi	Tidak rugi/untung	Untung
B	Rugi	Konflik	Ketidak-adilan	Ketidak-adilan
	Tidak rugi/untung	Ketidak-adilan	<b>Harmoni</b>	Ketidak-adilan
	Untung	Ketidak-adilan	Ketidak-adilan	<b>Kerja Sama</b>

Sumber : Tarigan, 2009

Kerja sama dengan demikian akan memberikan manfaat yang besar bagi masing-masing pihak yang terlibat. Berdasarkan penelitian, manfaat yang dapat dipetik adanya kerja sama adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2002; Keban, 2008):

- Kerja sama dapat mendorong adanya "perlombaan" di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktifitas.
- Kerja sama mendorong berbagai upaya pihak yang bekerja sama agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
- Kerja sama mendorong terciptanya sinergi, sehingga biaya operasionalisasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ikut kerja sama akan menjadi semakin rendah, yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
- Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
- Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.
- Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang lebih baik.
- Pihak-pihak yang bekerja sama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan kerja sama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerja sama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerja sama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
- Pihak-pihak yang bekerja sama dapat lebih berdaya. Dengan kerja sama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerja sama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.

- Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerja sama. Masing-masing daerah yang terlibat kerja sama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
- Masing-masing pihak yang bekerja sama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerja sama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
- Kerja sama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerja sama tersebut, kecenderungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

## 2.2. Membangun Kerja Sama Daerah

Untuk memperoleh suatu kerja sama yang baik dan berhasil maka diperlukan suatu prasyarat tertentu. Jika prasyarat ini tidak dipenuhi maka suatu kerja sama yang baik dan berhasil akan sulit dicapai. Suatu kerja sama dikatakan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien manakala target dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Tingkat keberhasilan merupakan tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi.

Faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kerja sama antar pemerintah lokal menurut Norton dalam Winarso (2002): *the size and competencies of the authorities concerned* (ukuran dan kompetensi tiap pelaku), *pressure by governments* (tekanan dari pemerintah/atasan), *statutory requirements* (kebutuhan implementasi peraturan), *the legal forms available for joint action* (ketersediaan format-format legal kerja sama), *willingness of authorities to work together* (kemauan untuk bekerja sama), *share responsibility through representation on a joint organization or to accept a contractual relationship* (format keterwakilan dalam organisasi kerja sama).

Sedangkan menurut Abdurrahman (2005) faktor-faktor yang menjadi penyebab perlunya kerja sama daerah antara lain :

1. Faktor keterbatasan daerah: semakin berkembangnya kesadaran akan keterbatasan daerah di berbagai sektor dan perlunya menggalang kekuatan atau potensi daerah secara bersama-sama guna menopang kelemahan lokal
2. Faktor kesamaan kepentingan semakin berkembangnya kesadaran akan keterbatasan daerah di berbagai sektor dan perlunya menggalang kekuatan atau potensi daerah secara bersama-sama.
3. Berkembangnya paradigma baru di masyarakat perlunya wadah komunikatif yang menunjang pendekatan perencanaan partisipatif sesuai dengan semangat otonomi daerah.
4. Jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi perlunya menggalang persatuan; dan kesatuan dalam mempererat kerja sama antar daerah.
5. Sinergi antar daerah, tumbuhnya kesadaran, bahwa dengan kerja sama antardaerah dapat memperbesar peluang keberhasilan pembangunan daerah.
6. Peluang perolehan kerja sama dan sumber dana dari program pembangunan baik nasional maupun internasional
7. Sebagai wadah komunikasi utama bagi *stakeholder* dalam kegiatan pembangunan
8. Jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal pembangunan (3K).

### **2.2.1 Bidang-bidang Kerja Sama Daerah**

Ada berbagai sektor yang menjadi pertimbangan bagi daerah-daerah untuk dikerjasamakan. Menurut Hoesein (2009) guna mencapai hasil yang optimal, maka hendaknya sektor yang dikerjasamakan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Penilaian berdasarkan sektor dengan kebutuhan kerja sama antar daerah di wilayah yang tinggi dan mendesak.
2. Memiliki potensi yang berpengaruh signifikan terkait pengembangan pembangunan di daerah dan wilayah.
3. Setidaknya terkait 2 daerah (kabupaten/kota) yang bertetangga.

4. Dapat mewujudkan prinsip-prinsip dasar dari tujuan kerja sama antar daerah.
5. Aktor kunci yang mendukung (*champion*).
6. Memiliki potensi pengembangan.

Kerja sama antar daerah meliputi berbagai skema sangat luas, mulai dari kerja sama bersifat mikro misalnya penempatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah lain, transfer fiskal antar daerah, kerja sama ekonomi antar daerah, hingga kerja sama tata pemerintahan antar daerah (Direktorat Kerja sama Pembangunan Sektoral dan Daerah).

Komponen kerja sama antar daerah yang dapat dijadikan pemikiran meliputi beberapa hal, yaitu (Pamudji, 1985): lingkungan (penanggulangan masalah sampah), pariwisata, pengendalian banjir, penyediaan air minum, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pangan, dan pengembangan wilayah. Sedangkan menurut Abdurrahman (2005), jenis *key project* (proyek unggulan) biasanya cenderung sektoral seperti sektor pertanian, perhubungan, infrastruktur, pariwisata, kehutanan, dan lain sebagainya. Untuk sektor pariwisata beberapa sektor penunjang pariwisata bisa dikerjasamakan diantaranya pengelolaan bersama objek wisata, promosi, keamanan, kebersihan, retribusi, akomodasi wisata, dan lain-lain.

### **2.2.2 Bentuk Kerja Sama Antar Daerah**

Ada banyak bentuk atau model kerja sama antar daerah. Bentuk-bentuk kerja sama itu dapat divariasikan atau bahkan digabungkan, tergantung pada karakteristik daerah yang bersangkutan, karakteristik bidang yang dikerjasamakan, serta negosiasi antar pemerintah daerah. Dalam menerapkan bentuk-bentuk kerja sama daerah harus menerapkan prinsip-prinsip (Tarigan, 2009):

- 1) Perlunya inklusivitas dalam kerja sama untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan menerapkan kaidah-kaidah partisipatif.
- 2) Mempertahankan komitmen dan semangat kerja sama.
- 3) Selalu mempelajari pilihan/alternatif, dan mengambil pilihan yang paling realistis.

- 4) Memperhatikan detail teknis dalam kerja sama.
- 5) Evaluasi secara berkala dan menjaga koridor kerja sama agar tetap mengarah pada tujuan awal kerja sama.
- 6) Responsif terhadap permasalahan yang muncul.

Selain itu, secara lebih khusus, ada beberapa prakondisi dalam hal keuangan atau pendanaan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Kerja sama dalam pelayanan publik seharusnya diikuti juga dengan kerja sama dalam hal pendanaan pelayanan umum tersebut dan pendanaan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Sebelum kerja sama dilakukan, terlebih dahulu masing-masing daerah:
  - 1) Memiliki komitmen yang kuat untuk pengelolaan terpadu
  - 2) Membuka diri dan mempunyai *mindset* pembangunan wilayah yang sama
- c. Status aset-aset yang dipergunakan dalam kerja sama perlu ditegaskan sebelum kerja sama tersebut dimulai. Masing-masing daerah hendaknya sudah mempunyai catatan atas asetnya masing-masing dan aset tersebut sudah tercatat dalam neraca daerah masing-masing.
- d. Implementasi kerja sama memerlukan koordinasi yang bagus untuk menghindari konflik kepentingan karena masing-masing daerah mempunyai *stakeholders*. Masing-masing daerah mengurangi intervensi politik dan memperkuat koordinasi.

Format kerja sama, terutama dalam hal pendanaan dan anggaran, memang perlu dibahas secara khusus oleh daerah-daerah yang bersangkutan. Pasalnya, tidak jarang faktor pendanaan dan anggaran ini menjadi faktor yang paling sensitif dalam menjaga keberlangsungan kerja sama.

Menurut Taylor dalam Tarigan (2009) ada beberapa model bentuk kerja sama antar daerah, yaitu diantaranya:

1. *Handshake Agreement*, yang dicirikan oleh tidak adanya dokumen perjanjian kerja sama yang formal. Kerja sama model ini didasarkan pada komitmen dan kepercayaan secara politis antar daerah yang terkait. Biasanya, bentuk kerja sama seperti ini dapat berjalan pada daerah-daerah yang secara historis memang sudah sering bekerja sama dalam berbagai

bidang. Bentuk kerja sama ini cukup efisien dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pemerintah daerah. Meski begitu, kelemahan model ini adalah potensi munculnya kesalah-pahaman, terutama pada masalah-masalah teknis, dan *sustainability* kerja sama yang rendah, terutama apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, bentuk kerja sama ini sangat jarang ditemukan pada isu-isu strategis.

2. *Fee for service contracts (service agreements)*. Sistem ini, pada dasarnya adalah satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. Misalnya air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama. Keunggulan sistem ini adalah bisa diwujudkan dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, daerah yang menjadi “pembeli” tidak perlu mengeluarkan biaya awal (*start-up cost*) dalam penyediaan pelayanan. Akan tetapi, biasanya cukup sulit untuk menentukan harga yang disepakati kedua daerah.
3. *Joint Agreements* (pengusahaan bersama). Model ini, pada dasarnya mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dari daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah-pemerintah daerah berbagi kepemilikan kontrol, dan tanggung jawab terhadap program. Sistem ini biasanya tidak memerlukan perubahan struktur pemerintahan daerah (menggunakan struktur yang sudah ada). Kelemahannya, dokumen perjanjian (*agreement*) yang dihasilkan biasanya sangat rumit dan kompleks karena harus mengakomodasi sistem birokrasi dari pemda-pemda yang bersangkutan.
4. *Jointly-formed authorities* (Pembentukan otoritas bersama). Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan, dan tanggung jawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan dari pemda-pemda yang terkait. Badan ini bisa juga diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan. Badan ini memiliki

kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang diurusnya, termasuk biasanya otonom secara politis. Kelemahannya, pemda-pemda memiliki kontrol yang lemah terhadap bidang yang diurus oleh badan tersebut.

5. *Regional Bodies*. Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia, peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.

Sedangkan model kerja sama antar daerah yang direkomendasikan Setiawan dalam Winarso, (2002) adalah sebagai berikut:

*a) Inter-Jurisdictional Agreement*

Beberapa pemerintah lokal yang berdekatan secara geografis membentuk perjanjian kerja sama untuk mengatasi masalah-masalah bersama seperti masalah lingkungan dan infrastruktur (Nunn, et al, 1997)

*b) Inter-Municipal Service Contract*

Dibentuk perjanjian kerja sama dimana satu (atau lebih) pemerintah lokal memberikan permit kepada pemerintah lokal lain untuk menjalankan kewenangan mewakili kepentingan pemerintah lokal tersebut, berdasarkan *fee* (Atkins, 1997)

*c) Project-Based Inler-Jurisdictional Co-operation*

Perjanjian kerja sama pemerintah lokal yang bertetangga disusun untuk kepentingan aktivitas bersama menangani satu *cross boundary project* (Nunn, et al. 1997). Pada model ini jangka waktu kerja sama tergantung dari usia proyek yang dikelolanya. Berakhirnya proyek ini berakhir pula kerja sama.

Pengaturan Kerja sama (*Forms of Cooperation Arrangements*) menurut Rosen dalam Keban (2009) terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- 1) *Consortia*: yaitu pengaturan kerja sama dalam *sharing* sumber daya, karena lebih mahal bila ditanggung sendiri-sendiri; misalnya pendirian perpustakaan dimana sumber daya seperti buku-buku, dan pelayanan lainnya, dapat digunakan bersama-sama oleh mahasiswa, pelajar, dan masyarakat publik, daripada masing-masing pihak mendirikan sendiri karena lebih mahal.
- 2) *Joint Purchasing*: yaitu pengaturan kerja sama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- 3) *Equipment Sharing*: yaitu pengaturan kerja sama dalam *sharing* peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- 4) *Cooperative Construction*: yaitu pengaturan kerja sama dalam mendirikan bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir, gedung pertunjukan, dsb.
- 5) *Joint Services*: yaitu pengaturan kerja sama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.
- 6) *Contract Services*: yaitu pengaturan kerja sama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan, dsb. Jenis pengaturan ini lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak yang lain
- 7) Pengaturan lainnya: pengaturan kerja sama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dsb.

Menurut Keban (2009), di negara sedang berkembang, kerja sama antar Pemerintah Daerah sering nampak dalam kegiatan perencanaan pembangunan, seperti “*Integrated Area Planning*” (IAP). Bentuk ini merupakan terobosan untuk mengisi kekosongan atau kompleksitas dari masalah-masalah yang dihadapi karena tidak dapat ditangani dengan perencanaan pembangunan berdasarkan batas-batas wilayah administratif. Memang harus diakui bahwa selama ini kerja sama antar daerah belum nampak sebagai suatu kebutuhan. Padahal, berbagai permasalahan atau keputusan internal suatu kabupaten atau kota ataupun juga provinsi sering berkaitan dengan permasalahan atau keputusan di luar batas wilayahnya. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak permasalahan pada suatu kabupaten atau kota atau juga provinsi justru muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah lain seperti sampah, kriminalitas, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dsb. Pendek kata, suatu

perencanaan atau kebijakan yang dibuat oleh suatu kabupaten atau kota, atau juga provinsi, sering kurang memperhitungkan dampaknya bagi kabupaten atau kota, ataupun provinsi lain. Dalam kondisi seperti ini, fungsi perencanaan yang bersifat integratif dan koordinasi horisontal merupakan kunci utama.

Munculnya model “*integrated area planning*” ini diharapkan dapat mengurangi berbagai konflik antar wilayah administratif, yaitu dengan mengefektifkan pembangunan sektor-sektor tertentu dan institusi yang berhubungan dengan sektor tersebut dalam suatu area (dengan mengesampingkan batas-batas wilayah administratifnya). Model ini muncul sebagai reaksi terhadap kekurangan-kekurangan perencanaan sektoral khususnya koordinasi antar sektor, dan juga terhadap pemenuhan kebutuhan bagi area geografis khusus (yang mungkin tidak sesuai dengan batas-batas wilayah administratif yang ada) seperti daerah aliran sungai (DAS) dan pembangunan perdesaan yang kemudian dikenal dengan “*integrated rural development*”.

Meskipun model ini cukup diandalkan akan tetapi terdapat hambatan penting yang perlu diperhatikan. Hambatan tersebut menyangkut masalah struktur (organisasi) yang menangani “*intergrated area development*”. Struktur yang ada adalah struktur yang formal yang dibentuk sesuai unit-unit politik dan administratif yang ada, seperti dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis masing-masing kabupaten/kota atau provinsi. Struktur formal ini tidak dirancang untuk menangani hal tersebut, akibatnya model ini kurang mendapat dukungan otoritas formal, yang berarti sulit diimplementasikan dan sulit berhasil.

Jalan keluar yang bisa ditawarkan adalah (1) membentuk suatu struktur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ditempatkan di area yang bersangkutan, atau juga dibuat oleh pemerintah lokal atau perusahaan swasta yang diberi status khusus; (2) membentuk tim konsultan perencanaan dari luar area, untuk mempersiapkan perencanaannya; dan (3) melakukan reformasi struktur organisasi yang ada dan memperbaiki kemampuan para staff yang ada untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana dan memperkuat hubungan horisontal antar sektor serta memperlemah hubungan vertikal.

### 2.2.3 Dasar Hukum Kerja Sama Antar Daerah

Beberapa dasar hukum yang dijadikan pedoman kerja sama antar daerah yaitu:

1. Undang-undang No. 22/1999 pasal 87 ayat 1 : beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
2. Undang-undang No. 32/2004 Pasal 195 ayat 1 dan 2 :
  - 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan
  - 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.  
Dan Pasal 196 ayat 1,2 dan 3 :
    - 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait
    - 2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat
    - 3) Untuk mengelola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.
3. PP No. 25/2000 pasal 4 butir a: kabupaten/kota yang tidak/belum mampu melaksanakan salah satu/beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerja sama antar kabupaten/kota, kerja sama antara kabupaten/kota dengan provinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut pada provinsi.
4. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah.
5. Permendagri No 69 Tahun 2007 tentang Kerja sama Pembanguna Perkotaan
6. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Daerah

#### 7. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah

Perundangan serta peraturan di atas merupakan payung hukum yang cukup lengkap serta landasan bagi daerah di dalam penyelenggaraan kerja sama daerah. Sehingga saat ini daerah menjadi lebih kuat legitimasinya secara hukum ketika menjadikan kerja sama daerah sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu daerah tetap perlu mensinkronkan dengan regulasi lainnya, terutama yang bersinggungan dengan kerja sama daerah. Seperti regulasi Pengelolaan Keuangan daerah, Pengelolaan aset dan barang daerah, Pembuatan naskah daerah serta pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **2.2.4 Peran dalam Penguatan Kerja Sama Antar Daerah**

Kerja sama Antar Daerah merupakan sebuah proyek bersama, yang melibatkan lebih dari satu pihak, baik itu antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga sebagai pelaksana dari program yang menamakan sebuah kerja sama antar daerah. Elemen yang dianggap sebagai aktor kunci adalah Pemerintah daerah kab/kota, pemerintah provinsi, Pemerintah pusat serta pihak ketiga yang memiliki komitmen serta kompetensi terhadap isu yang akan dikerjasamakan baik masyarakat setempat, masyarakat usaha, maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Peran yang diperlukan oleh masing-masing elemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Peran pemerintah daerah kab/kota**

Keberpihakan atau komitmen kepala daerah (eksekutif dan legislatif) terhadap isu kerja sama antar daerah. Hal lain yang juga merupakan bagian peran dari pemerintah daerah yang dapat mendukung kerja sama antar daerah adalah pengalokasian sumber daya daerah yang dimiliki serta kejelasan terhadap kebutuhan daerah atas kerja sama (Warsono dalam Sanctyeka, 2009). Sedangkan menurut Pratikno dan Masudi dalam Sanctyeka (2009) pemerintah kab/kota perlu juga mempersiapkan format

kelembagaan yang sesuai dengan tujuan atau misi pembentukan dengan melibatkan *stakeholder*.

**b. Peran Pemerintah Provinsi**

Memberikan insentif program pembangunan bagi kerja sama antar daerah, Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program bagi implementator (Dewan Eksekutif, Regional Manager, Koordinator Forum, dsb), bagi wilayah yang memiliki bakorlin/bakorwil, memfasilitasi PP 50/2007 kepada kab/kota di wilayahnya mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah, mendukung sinkronisasi musrenbangreg (bagi wilayah yang memiliki mekanisme musrenbangreg) dengan program kab/kota dan provinsi. Selain itu menurut Pratikno dan Masudi dalam Sanctyeka (2009) terkait dengan aspek legal, provinsi bisa melakukan supervisi untuk memastikan bahwa kerja sama antar daerah otonom berada dalam koridor perundangan yang ada.

**c. Peran Pemerintah Nasional**

Berdasarkan kendala yang ditemui dalam proses pengembangan Kerja sama Antar Daerah, tentunya peran pemerintah lebih mengarah pada mempersiapkan peraturan-peraturan terkait, baik yang berupa tata cara pembinaan dan pengawasan umum maupun mengenai pengelolaan keuangan daerah yang secara spesifik mengatur kerja sama antar daerah.

**d. Peran Masyarakat dan lembaga non pemerintah**

Memastikan bahwa isu-isu yang dipilih untuk dikerjasamakan adalah benar-benar berangkat dari sebuah kebutuhan dan memiliki tujuan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat, memastikan konsistensi antara perencanaan yang dibangun sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah yang ada dan atau memastikan terintegrasinya isu yang akan dikerjasamakan kedalam sistem perencanaan daerah (RPJMD, RKPD), memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terhadap program yang dikerjasamakan. Peran lain yang kerap kali dilakukan oleh lembaga pendana adalah melakukan asistensi terhadap daerah didalam membangun kelembagaan yang sesuai dengan kapasitas daerah dengan mengedepankan asas *good governance*, melakukan peningkatan

kapasitas bagi sumber daya manusianya, dan memberikan dukungan dana operasional pada tahap awal lembaga kerja sama antar daerah itu berdiri.

### 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama Daerah

Dukungan dari masing-masing pihak/kelompok sebagai komponen dari kerja sama akan menentukan keberlangsungan dan keberhasilan sebuah kerja sama. Menurut Sanctyeka (2009), faktor-faktor yang mendukung sebuah kerja sama antar daerah yaitu :

1. **Komitmen pimpinan daerah.** Hal ini menjadi faktor utama didalam terselenggaranya kerja sama antar daerah agar menjadi lebih efisien-efektif dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan sebuah pemahaman bersama terhadap keuntungan yang didapat bagi masing-masing daerah ketika menjalankan sebuah kerja sama antar daerah, berdasarkan pengalaman bahwasanya besar dan kuatnya komitmen pimpinan daerah (eksekutif dan legislative), seringkali menghasilkan keberanian dalam mengambil langkah inovasi walaupun dari segi regulasi terkadang masih “lemah”.
2. **Identifikasi kebutuhan.** pengidentifikasian kebutuhan daerah terhadap objek yang akan dikerjasamakan. Untuk itu diperlukan sebuah penajakan terhadap kebutuhan tersebut. Beberapa metode yang di gunakan didalam melakukan pengidentifikasian kebutuhan antara lain *Capacity Building Need Assasment* (CBNA). Sebuah teknik yang mencoba menganalisa kapasitas terhadap tiga aspek yaitu aspek sistem/kebijakan, aspek kelembagaan/organisasi, maupun aspek individu. Metode lain yang juga pernah digunakan didalam melakukan kajian kerja sama antar daerah adalah metode SKAD (Skenario Kerja sama Antar Daerah), metode ini mencoba mengidentifikasi kegiatan KAD yang layak dan mendesak untuk dilakukan dalam konteks KAD. Pentingnya mengidentifikasi kebutuhan adalah untuk efektifitas serta sinergisnya program yang dikerjasamakan dengan perencanaan pemerintah daerah yang telah dibuat.
3. **Pengintegrasian dan harmonisasi.** Yaitu mengintegrasikan serta mengharmonisasikan kebutuhan isu atau sektor yang akan dikerjasamakan kedalam sistem perencanaan daerah yang telah ada atau yang akan dibuat

(RPJP, RPJMD, atau RKPD). Dalam proses pengidentifikasian, kerap kali kita temui banyak isu maupun sektor yang dapat dikerjasamakan, sehingga analisis prioritas terhadap isu/sektor tersebut perlu dilakukan, dan yang terpenting adalah mencoba mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang ada, ini bermaksud agar program kerja sama nantinya lebih berkelanjutan.

4. **Partisipatif.** Yaitu melibatkan *multi stakeholder* untuk berpartisipasi di dalam setiap proses, baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja sama tersebut. Ini dimaksudkan agar sebuah kerja sama antar daerah adalah milik bersama, bukan hanya milik pemerintah daerah saja, milik lembaga donor saja, atau pemerintah provinsi/pusat.
5. **Analisa kelembagaan atau model kelembagaan.** Ini dimaksudkan untuk mendapatkan model atau format kelembagaan yang efektif terhadap kondisi wilayah kerja sama serta kapasitas dari daerah yang bekerja sama (SDA, Keuangan, dan SDM). Tidak selalu lembaga yang memiliki fungsi yang kuat dan otonom menjadi sebuah model lembaga yang ideal.
6. **Champion.** Yaitu satu aktor yang berfungsi sebagai penggerak, memotivasi, mendorong tahap awal atau pada saat sudah berjalan proses Kerja sama Antar Daerah. Pentingnya aktor yang berperan tersebut sangat dibutuhkan didalam memulai dan mengawal berjalannya proses kerja sama. Aktor/*champion* tersebut akan mempengaruhi dan mendorong pimpinan daerah lainnya untuk terlibat aktif di dalam mengawal kerja sama antar daerah, dengan selalu memonitoring perkembangan kepada SKPD atau tim yang terlibat di dalam operasional kerja sama yang sedang dilaksanakan.

Selain faktor pendukung dalam kerja sama daerah, terdapat gambaran tentang faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan kerja sama daerah adalah: perbedaan kepentingan dan prioritas, besarnya harapan terhadap pemerintah pusat khususnya dalam hal pendanaan, kuatnya peran pemerintah pusat, masalah dana serta tidak ada dokumen legalitas sebagai payung kerja sama (Direktorat Kerja sama Pembangunan Sektoral dan Daerah).

Menurut Abdurrahman (2005) banyak kerja sama daerah maupun regionalisasi masih berhenti pada tataran MoU (surat kesepakatan bersama) atau kurang terasa manfaatnya. Hal ini antara lain disebabkan: a) minimnya kesiapan perangkat per-undangundangan yang mendukung proses tersebut, terutama yang melekat pada Undang-undang otonomi daerah. b) masih adanya kebiasaan strategi regionalisasi desentralistik yang sesuai dengan situasi serta kondisi di lapangan oleh para pelaku pembangunan.

Sedangkan menurut Setiawan (Winarso ed, 2002) permasalahan yang dapat diidentifikasi secara umum dari kerja sama daerah selama ini adalah belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya melakukan kerja sama oleh sebagian besar pemerintah lokal. Permasalahan berikutnya adalah apabila kesadaran untuk melakukan kerja sama antar pemerintah lokal sudah mulai muncul, maka perlu ada mekanisme dan prosedur yang jelas, aplikatif dan tepat (*proper*) sebagai stimulannya.

#### **2.4 Keberhasilan Kerja Sama Daerah**

Faktor yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan sebuah kerja sama adalah adanya kinerja yang baik dari pihak yang ikut di dalam kerja sama. Yang dimaksud kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan radar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. Tanpa adanya kinerja berarti tidak ada upaya untuk mencapai hasil atau target. Jika manusia mempunyai tujuan yang tidak diiringi dengan kinerja, maka manusia itu hanya sekedar berangan-angan yang tidak akan pernah terwujud menjadi kenyataan. Tanpa adanya kinerja, maka tidak akan terjadi sesuatu perubahan sedikitpun. Dari kualitas kinerja inilah nantinya yang berpengaruh kepada hasil. Kualitas kinerja berkorelasi positif dengan hasil.

Kinerja yang baik dari sebuah kerja sama sebaiknya memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut (Kusnadi, 2002):

1. **Rasional.** Kinerja yang baik seharusnya diterima oleh akal sehat. Tidak ada kinerja yang baik yang tidak rasional.
2. **Konsisten.** Kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah lembaga institusi/organisasi dan tujuan-tujuannya.

3. **Tepat.** Kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara tepat dan jelas serta tidak menimbulkan kemenduaan penafsiran.
4. **Efisien.** Kinerja yang baik sedapat mungkin melalui pengorbanan dana yang minim dengan hasil yang memuaskan.
5. **Tertantang.** Kinerja yang baik sebaiknya memberikan tantangan yang tinggi bagi pelakunya dan diupayakan menjadi motivator yang efektif
6. **Terarah.** Kinerja yang baik seharusnya terarah kepada suatu tujuan tertentu, dapat menjadi garis komando atau lepas.
7. **Disiplin.** Kinerja yang baik seharusnya dikerjakan melalui disiplin yang tinggi dan penuh ketekunan.
8. **Sistematis.** Kinerja sebaiknya dilakukan secara sistematis, teratur, tidak melompat-lompat, dan tidak acak.
9. **Dapat Dicapai.** Kinerja yang benar sebaiknya diarahkan dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.
10. **Disepakati.** Kinerja yang baik seharusnya disepakati oleh semua pihak yang terkait dalam kerja sama tersebut.
11. **Terkait dengan Waktu.** Kinerja yang baik seharusnya dikaitkan dengan waktu yang telah terukur. Pencapaian dari tujuan diberi batas waktu tertentu dan dituntut menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin.
12. **Berorientasi kepada Kerja sama Bersama.** Kinerja yang baik seharusnya diarahkan kepada kerja sama bersama. Kinerja bersama umumnya lebih efektif dan efisien dibandingkan kinerja individu.

Sedangkan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien terdapat beberapa garis pedoman yang harus dipatuhi (Kusnadi, 2002, dan Onstrom dalam Winarso, 2002), yaitu:

1. **Kesadaran diri.** Semua pihak yang terlibat dalam proses kerja sama harus menyadari target dan tujuan yang diharapkan tidak mungkin dapat dicapai seorang diri. Bantuan pihak lain mutlak diperlukan agar apa yang diharapkan menjadi kenyataan.
2. **Memahami persamaan dan perbedaan.** Setiap pihak yang melakukan kerja sama harus mengerti bahwa semua hal itu mempunyai persamaan

dan perbedaan. persamaan dan perbedaan ini akan memberikan kontribusi positif bagi iklim kerja sama yang harmonis.

3. **Adanya tujuan dan target yang jelas.** Karena kerja sama akan diarahkan kepada pencapaian tertentu, maka perumusan tujuan dan target yang akan dicapai harus dirumuskan dan ditetapkan secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan tujuan dan target akan memperlemah proses kerja sama.
4. **Adanya ilmu dan teknologi yang relevan.** Ilmu dan teknologi akan sangat membantu memperlancar dan meningkatkan kualitas kerja sama. Dengan adanya ilmu dan teknologi yang relevan akan membuat kerja sama akan semakin kondusif.
5. **Menghindari ketegangan.** Iklim kerja sama diupayakan tidak ada ketegangan sehingga semua pihak akan senang, dan tidak terpaksa melaksanakan tugasnya masing-masing, yang penting pelaksanaan kerja sama akan berlangsung, secara sistemik dan tidak acak.
6. **Komunikasi yang baik.** Tanpa adanya komunikasi yang baik dan efektif serta efisien maka akan sulit menciptakan suatu kerja sama. Ketika kerja sama berlangsung maka semua pihak harus dalam keadaan yang tenang serta kondusif dan jika muncul suatu masalah maka akan dibicarakan bersama untuk diselesaikan.
7. **Dukungan yang menyeluruh.** Semua pihak yang terlibat di dalam kerja sama harus mendukung pentingnya kerja sama dilakukan dan hanya dengan kerja sama semua masalah seberat apapun akan dengan mudah dapat diselesaikan. Sesempurnanya manusia masih tetap memerlukan kerja sama karena kerja sama merupakan upaya untuk menutupi kelemahan manusia lainnya.
8. **Adanya perhatian.** Kerja sama akan terwujud jika ada perhatian dari berbagai pihak yang berkompeten. Tanpa adanya perhatian maka tidak akan tercipta kerja sama yang baik.
9. **Adanya kewajaran.** Setiap kerja sama sebaiknya dilakukan secara wajar tanpa paksaan sesuai dengan kapasitas dan derajat kepentingannya. Tidak harus semua hal dilakukan melalui kerja sama. Ada hal-hal yang hanya

bisa dikerjakan tanpa melalui kerja sama dan malahan jika dilakukan melalui kerja sama akan menimbulkan *dissinergi* (paradok kerja sama).

10. **Adanya keterbukaan.** Kerja sama memerlukan keterbukaan dari semua pihak yang terkait. Tanpa adanya keterbukaan, maka jalannya kerja sama akan pincang (tidak seimbang) dan akan banyak menimbulkan masalah.
11. **Dapat memberi harapan masa depan.** Kerja sama harus diarahkan kepada kondisi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Semua pihak harus tertanam sikap bahwa tak seorangpun dapat bekerja efektif dan efisien tanpa melalui kerja sama, bahwa kerja sama akan mengarah kepada pencapaian bersama yang diharapkan dan mengarah kepada suatu keadaan yang lebih baik.
12. **Adanya kompetensi.** Setiap kerja sama umumnya diarahkan kepada suatu kompetensi tertentu. Tidak ada suatu tindakan yang bersifat acak dan setiap tindakan pasti mengarah kepada kompetensi tertentu. Yang penting kompetensi harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.
13. **Adanya keeratan.** Kesetiakawanan sangat perlu di dalam membangun iklim kerja sama. Dengan adanya kesetiakawanan yang kuat dan erat maka semua pihak yang terkait akan sama-sama menyadari bahwa mereka tidak akan dapat lepas dari yang lain. Kesadaran semua pihak bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan kebersamaan mereka sangat kondusif terhadap pencapaian tujuan kerja sama. Kerja sama yang berhasil akan berdampak positif kepada keberhasilan dan harapan masing-masing pihak.
14. Adanya **kemauan** untuk bekerja sama.
15. Adanya **asas keterpaduan** dalam bersikap.
16. Perlunya menumbuhkan **asas resiprokal dan kepercayaan**.

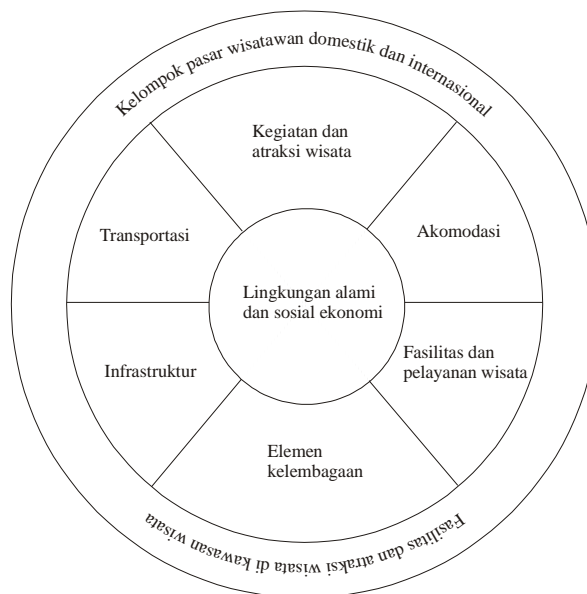
Selain itu agar berhasil melaksanakan kerja sama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip “*good governance*” (Edralin, 1997). Beberapa prinsip diantara prinsip *good governance* yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerja sama antar Pemda yaitu:

1. **Transparansi.** Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutup.
2. **Akuntabilitas.** Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.
3. **Partisipatif.** Dalam lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
4. **Efisiensi.** Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
5. **Efektivitas.** Dalam melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh.
6. **Konsensus.** Dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut.
7. **Saling menguntungkan dan memajukan.** Dalam kerja sama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama

Sedangkan kendala-kendala yang berpotensi mempengaruhi kinerja kerja sama adalah beberapa isu sentral yang muncul ke permukaan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu: pertama, bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah yang ditandai dengan adanya istilah putra daerah dan aset daerah; kedua, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal terutama mengumpulkan PAD (pendapatan asli daerah) yang kemudian diidentikkan dengan *automoney*; ketiga, terkait dengan *timing* dan *political will*, yang dikarenakan otonomi daerah dicanangkan pada saat pemerintah pusat mulai goyah basis kredibilitas dan legitimasinya; keempat, masih adanya *grey area* kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota karena belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan pegawai pusat ke daerah; kelima, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga diharapkan pelayanan publik lebih efektif dan efisien; keenam, lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah. (Kuncoro, 2004).

## **2.5 Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata**

Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, atau berputar-putar. Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, wisata alam dan wisata sosial budaya. Di dalam pariwisata terdapat komponen-komponen wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut (Inskeep, 1991): atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata, akomodasi, fasilitas dan pelayanan wisata, fasilitas dan pelayanan transportasi, infrastruktur, elemen kelembagaan.



Sumber: *Inskeep, 1991*

### **GAMBAR 2.1 KOMPONEN WISATA**

Gambar 2.1 menunjukkan komponen-komponen wisata tersebut dalam suatu hubungan keseluruhan dari lingkungan alami dan sosial ekonomi antara pasar internasional dan wisatawan domestik yang akan dilayani dan kawasan tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat atraksi, penyediaan fasilitas, pelayanan, dan infrastruktur.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan mencapai tujuan pengembangan pariwisata, diperlukan pengelolaan dan pengembangan suatu objek wisata. Pengelolaan pariwisata yaitu upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan potensi alam dan budaya dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Kepariwisataan memerlukan konsep-konsep pengelolaan atau manajemen dan pemasaran ilmiah modern. Manajemen meliputi lima unsur pokok yaitu, pengorganisasian, perencanaan, motivasi, penempatan personal dan penggerakannya, koordinasi dan pengawasannya (Wahab, 2003). Sedangkan pengembangan suatu kawasan objek wisata perlu diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai suatu keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi wisata, apabila tidak dilakukan suatu rencana yang tepat maka akan menyebabkan

kurang optimalnya pengelolaan potensi objek wisata tersebut. Pengembangan pariwisata adalah upaya peningkatan pemanfaatan potensi alam dan budaya, dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Maksud dari pengembangan suatu daerah tujuan wisata adalah untuk menawarkan produk wisatanya dan pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola, maka jelas bahwa pengembangan fisik dan non fisik dari daerah tujuan wisata harus mendukung dan memberikan kesempatan untuk membentuk produk-produk serta pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta pelayanan pasar wisata. Hal ini disebabkan produk pariwisata tidak dapat dibawa ke tempat kediaman wisatawan, tetapi harus dinikmati di tempat dimana produk itu tersedia. Wujud produk wisata ditentukan oleh konsumen sendiri, yaitu wisatawan dan konsumen memperoleh pengalaman dari perjalanan wisata.

Agar dapat memberikan pengelolaan dan pengembangan yang optimal bagi suatu objek wisata, maka diperlukan perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Fandeli ed, 2001). Terintegrasi dalam arti bahwa perencanaan tersebut diupayakan masih merupakan mata rantai dengan perencanaan pada tatanan di atasnya, dengan kata lain perencanaan ini merupakan pendetailan atau penjabaran dari rencana makro atau umum di atasnya, sedangkan komprehensif memiliki arti bahwa perencanaan ini diharapkan dapat menyatukan elemen-elemen yang ada di lapangan dalam satu kesatuan bahasan yang saling melengkapi. Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, karena itu koordinasi antar berbagai sektor terkait melalui proses perencanaan yang tepat sangat penting artinya. Perencanaan juga diharapkan dapat membantu tercapainya kesesuaian antara pasar wisata dengan produk wisata yang dikembangkan tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing pihak.

Menurut Yoeti (2008), ada beberapa alasan mengapa perencanaan pariwisata diperlukan:

1. Memberi pengarahan

Dengan adanya perencanaan, para pelaksana dalam suatu organisasi atau tim mengetahui apa yang hendak dilakukannya dan ke arah mana yang akan dituju, atau apa yang akan dicapai.

2. Membimbing kerjasama

Perencanaan dapat membimbing para petugas bekerja tidak menurutkan kemauannya sendiri. Dengan adanya perencanaan, ia merasa sebagai bagian dari suatu tim, dimana tugas seorang banyak bergantung pada tugas yang lainnya.

3. Menciptakan koordinasi

Bila dalam suatu proyek masing-masing keahlian berjalan secara terpisah, maka kemungkinan besar tidak akan tercapai suatu sinkronisasi dalam pelaksanaan. Karena itu sangat diperukan adanya koordinasi antara beberapa aktivitas yang dilakukan.

4. Menjamin tercapainya kemajuan

Suatu perencanaan umumnya telah menggariskan suatu program yang hendak dilakukan, meliputi tugas yang tanggung jawab tiap individu atau tim dalam proyek yang akan dikerjakan. Bila ada penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan, akan segera dapat dihindarkan. Dengan demikian akan dapat dilakukan koreksi pada saat diketahui, sehingga sistem ini akan mempercepat penyelesaian suatu proyek.

5. Untuk memperkecil resiko

Perencanaan mencakup mengumpulkan data yang relevan (baik yang tersedia maupun yang tidak tersedia) dan secara hati-hati menelaah segala kemungkinan yang terjadi sebelum diambil suatu keputusan. Suatu keputusan yang diambil atas dasar intuisi, kerjaan ini dan kerjaan itu tanpa melakukan suatu penelitian pasar atau tanpa melakukan *rates of return on investment*, sangat dikhawatirkan akan menghadapi resiko besar. Karena itu, perencanaan diharapkan dapat lebih memperkecil resiko yang mungkin.

#### 6. Mendorong dalam pelaksanaan

Perencanaan menjamin bahwa suatu organisasi dapat memperoleh kemajuan secara sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan melalui inisiatif sendiri.

Untuk membuat suatu perencanaan, diperlukan suatu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sedangkan mengambil keputusan diperlukan data dan analisa resiko yang mungkin timbul. Dengan demikian untuk mengetahui data yang perlu dikumpulkan memerlukan tujuan yang hendak dicapai lebih dahulu, sedangkan untuk menentukan suatu tujuan diperlukan suatu pemikiran. Jadi perencanaan merupakan mata rantai yang penting antara pemikiran dan pelaksanaan. Perencanaan kepariwisataan baik lingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional hendaknya menggunakan prinsip-prinsip (Yoeti, 2008) sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengembangan kepariwisataan harus merupakan satu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian negara.
- b. Menghendaki pendekatan terpadu (*integrated approach*) dengan sektor-sektor lainnya.
- c. Harus di bawah koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan.
- d. Perencanaan fisik daerah untuk tujuan wisata harus berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk itu dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.
- e. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan wisata harus didasarkan penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografi yang lebih luas dan tidak meninjau dari segi administrasi saja.
- f. Rencana dan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah harus memperhatikan faktor ekologi daerah yang bersangkutan.
- g. Tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya memperhatikan masalah sosial yang mungkin ditimbulkan.

- h. Untuk daerah yang dekat dengan industri perlu diperhatikan pengadaan fasilitas rekreasi dan hiburan di sekitar daerah yang disebut sebagai *pre-urban*.
- i. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan kemungkinan peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan.

Selain perencanaan, pelaksanaan pariwisata adalah bagian yang penting dari pengelolaan pariwisata. Pelaksanaan yaitu usaha untuk mendapatkan hasil dengan penggerakan orang lain (Fandeli ed, 2001). Pelaksanaan dalam objek wisata alam bisa meliputi perlindungan lingkungan dan pelayanan pengunjung. Perlindungan lingkungan bisa dilakukan dengan pemetaan tapal batas antara hutan yang harus dijaga kelestariannya, perlindungan lingkungan terhadap keamanan kawasan misal pengambilan kayu oleh oknum masyarakat sekitar, pengambilan flora dan fauna tertentu. Untuk pelaksanaan pelayanan kepada pengunjung disediakan sarana dan prasarana yang mendukung, selain itu diperlukan pengembangan destinasi wisata buatan yang mendukung pariwisata alam.

Pengawasan sesuai dengan pengertiannya adalah pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Fandeli ed, 2001). Pengawasan dilakukan secara langsung yaitu pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui laporan dan lisan melalui sarana komunikasi. Hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan.

Di dalam kepariwisataan, elemen kelembagaan organisasi pariwisata diperlukan dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk promosi, persiapan kebutuhan para wisatawan, penelitian, dan informasi pariwisata. Organisasi pariwisata bisa bersifat pemerintahan, semi pemerintahan, dan bukan badan pemerintahan. Fungsi dari organisasi pariwisata adalah perencanaan pengembangan pariwisata, koordinasi antar berbagai badan/instansi pemerintah dan swasta yang mempunyai dampak dalam industri pariwisata, pengawasan bermacam-macam segi jasa-jasa pariwisata, merencanakan dan menerapkan promosi, dan kemungkinan mengawasi kebijakan-kebijakan harga. Menurut Wahab (2003), belum ada kerangka susunan organisasi yang seragam yang dapat

dijadikan pedoman bagi organisasi pariwisata pemerintah. Organisasi itu dapat berbentuk kementerian, komisariat, komite, dewan, lembaga, atau mungkin badan.

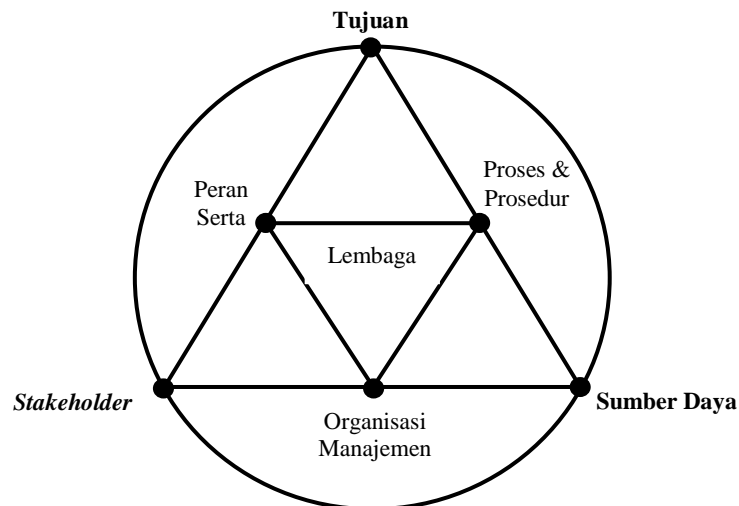
### 2.5.1 Pengertian Kelembagaan

Untuk lebih memahami tentang elemen kelembagaan kerja sama daerah pariwisata diperlukan pengetahuan tentang aspek kelembagaan. Terdapat beberapa macam pengertian mengenai kelembagaan, diantaranya yaitu:

- a. Kelembagaan sebagai sebuah peraturan dalam sebuah “permainan” dalam masyarakat, atau lebih khusus sebagai sistem tata nilai yang membatasi hubungan antar manusia. Jadi kelembagaan berfungsi untuk mengatur hubungan dan interaksi antara komponen-komponen yang ada dalam masyarakat dalam peri kehidupannya (North, 1990).
- b. Menurut Syahyuti (2007), kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (*non formal institution*), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (*formal institution*).

Adapun pengertian lembaga menurut Milton J. (1986, dalam Djogo, 2003) adalah: lembaga diartikan sebagai suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan, dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkan dalam lingkungan.

Kelembagaan dan lembaga adalah sebuah hal yang berbeda. Kelembagaan adalah sesuatu yang didalamnya memiliki tujuan, norma, dan aturan, serta memiliki struktur. Sedangkan lembaga merupakan sesuatu yang berfungsi untuk menjalankan fungsi kelembagaan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Secara ringkas, kata “kelembagaan” akan diikuti oleh kata kerja, sedangkan kata “lembaga” akan diikuti oleh kata benda. Oleh karena itu, Oetomo (2006) mendefinisikan kelembagaan dan lembaga dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Oetomo, 2006

**GAMBAR 2.2**  
**MODEL KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN**

Menurut Huse dan Cummings pengembangan organisasi adalah suatu sistem menyeluruh yang menerapkan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan jangka panjang. Ada beberapa pendekatan untuk pengembangan suatu kelembagaan/organisasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut: (Harjito, 2001)

- 1) Pendekatan Tujuan; teknik ini melihat organisasi sebagai suatu kebutuhan yang dapat menunjukkan efektivitasnya baik produk dan pelayanannya melalui beberapa kegiatan dan langkah analisa ketidakefektifan organisasi, perumusan tujuan, perumusan gambaran keadaan sekarang, identifikasi kemudahan dan hambatan, mengembangkan serangkaian kegiatan.
- 2) Pendekatan Sistem; teknik ini menekankan pentingnya input, proses, dan output sebagai kajian efektivitas organisasi dengan melalui beberapa kegiatan dan langkah menentukan lokasi ketidakefektifan organisasi, menentukan masalah, analisa masalah, mengembangkan serangkaian kegiatan.
- 3) Pendekatan Lingkungan; teknik ini menekankan adaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui beberapa kegiatan dan langkah-langkah menemukan adanya perubahan yang mengganggu organisasi, analisis perubahan, mencari cara penanggulangan.

Dalam aspek kelembagaan (Suryantono,2006) paling penting yang diperhatikan adalah bentuk organisasi baik formal atau informal, perencanaan organisasi, pelaksanaan pengendalian, perencanaan tenaga kerja (SDM), pola organisasi, sistem dan prosedur pola organisasi pemerintahan, peraturan pelaksanaan pendanaan, tingkat kemampuan personil (*skill*), beban lingkup kerja, dan pola organisasi kemasyarakatan.

### **2.5.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Beban kerja dan pengelompokan kerja yang dilaksanakan
- b. Menciptakan pengendalian internal
- c. Menciptakan beban kerja yang seimbang
- d. Rentang kendali sesuai dengan batas kemampuan
- e. Penamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Pedoman penyusunan struktur organisasi Dinas Pelaksana Daerah

Dalam penyusunan suatu struktur organisasi diperlukan adanya pemahaman mengenai tujuan akhir dari organisasi itu sendiri, sehingga dalam pembuatan bagan keorganisasian terlihat adanya garis horizontal maupun vertikal yang mampu mendukung kinerja masing-masing bagian. Dengan adanya ketegasan dan kejelasan dari masing-masing bagian atau seksi dalam organisasi tersebut, sangat membantu semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing.

### **2.5.3 Tata Laksana Kerja**

Lingkup kerja, wewenang, tanggung jawab, serta interaksi antar unit organisasi merupakan bagian dari tata kerja. Penyusunan tata laksana kerja, penting untuk diperhatikan karena:

- a) Perlu diciptakan pengendalian kelembagaan secara otomatis
- b) Pembebanan yang merata dan selaras untuk semua unit dan personil
- c) Pendelegasian tugas dan wewenang yang proporsional dan berimbang
- d) Perlu dicari birokrasi yang singkat
- e) Keteraturan dan kejelasan penugasan

Dalam pembagian kerja diperlukan dan diperhatikan mengenai kemampuan dan pemahaman masing-masing personel, sehingga dalam membuat uraian tugas tidak menyimpang dari yang diinginkan dan diharapkan oleh organisasi.

#### **2.5.4 Personalia**

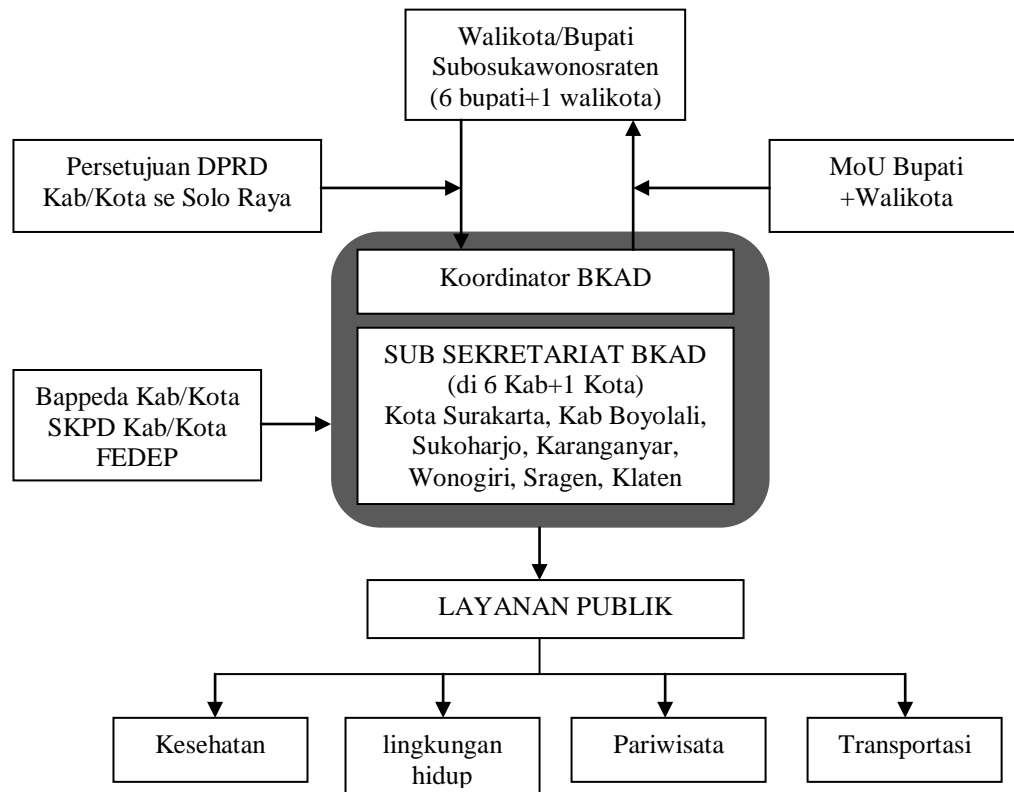
Untuk menjalankan dan mengendalikan tugas pengelolaan pariwisata diperlukan personel yang memiliki kemampuan teknis operasional dan manajemen yang baik. Kebutuhan personel yang cakap dan mempunyai tanggung jawab yang baik dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan untuk seluruh personel.

### **2.6 *Best Practice* Kelembagaan Kerja Sama Daerah dan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata**

#### **2.6.1 BKSAD/BKAD Subosukawonosraten**

Amanat dari PP 50/2007 pasal 24 menjelaskan dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk Badan Kerja sama. Badan kerja sama sebagaimana dimaksud adalah bukan perangkat daerah. Kawasan Subosukawonosraten merupakan model kerja sama antar daerah yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Tujuan kerja sama adalah meningkatkan daya saing ekonomi wilayah melalui penguatan manajemen wilayah, peningkatan pemasaran wilayah, penciptaan iklim bisnis yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha, serta memberikan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, pada sektor-sektor unggulan di wilayah Subosukawonosraten.

a. Struktur Organisasi BKAD Subosukawonosraten



Sumber : [www.lekad.org](http://www.lekad.org), 2009

**GAMBAR 2.3**  
**STRUKTUR ORGANISASI BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN**

b. Tugas Pokok dan Fungsi

BKAD Subosukawonosraten dipimpin oleh Koordinator BKAD yang dijabat oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Surakarta. Di dalam menjalankan BKAD, koordinator dibantu Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Urusan Umum serta Urusan Program dan Pelaporan yang ditempati oleh staf Asisten 1 Bidang Pemerintahan dari Pemerintahan Kota Surakarta. Untuk melaksanakan kerja sama di bidang pelayanan publik tersebut BKAD berkoordinasi dengan SKPD terkait di bidang kesehatan, lingkungan hidup, pariwisata, transportasi.

Di samping Sekretariat BKAD di Surakarta, di setiap kabupaten/kota juga terdapat sub sekretariat yang juga ditempati oleh staf pemerintah kabupaten/kota

masing-masing anggota KSAD Subosukawonosraten. BKAD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Badan Kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD
- 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan

c. Kewenangan BKAD

Mengkoordinasikan daerah-daerah anggota di dalam melakukan perencanaan program kegiatan bersama

d. Sumber Pembiayaan

- Pembiayaan pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing
- Pembiayaan bersumber dari lembaga non pemerintah dengan tetap menyesuaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

e. Personil/Sumber Daya Manusia

Pengisian personil BKAD bersumber dari PNS SKPD di wilayah yang berketempatan menjadi sekretariat.

Beberapa capaian yang dapat dijadikan pembelajaran yaitu antara lain :

- a. Dimasukkannya anggaran untuk kebutuhan kegiatan promosi pariwisata bersama di masing-masing SKPD kab/kota
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat (internal dan eksternal Solo Raya) dari adanya branding wilayah SOLO *the spirit of Java*
- c. Terbentuknya forum pariwisata Solo Raya yang secara rutin melaksanakan aktivitas promosi bersama
- d. Tersedianya jaringan informasi kerja sama antar daerah berbasis IT.
- e. Lancarnya koordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan dan administrasi pemerintah (misalnya koordinasi kependudukan, koordinasi perencanaan pembangunan, koordinasi trayek angkutan umum, dll)
- f. Tersedianya sarana untuk promosi/aktivitas bersama Solo Raya (Graha Solo Raya) yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

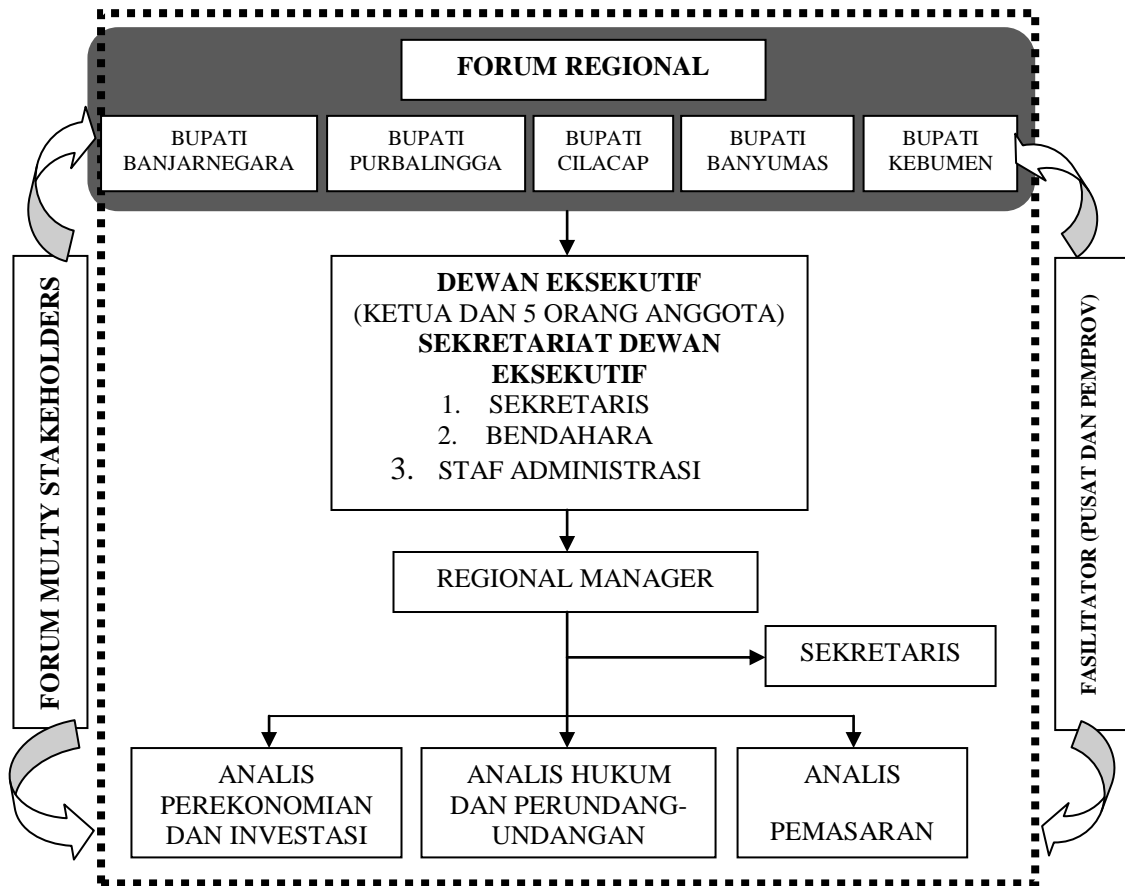
- g. Terjalannya kerja sama antar pelaku swasta melalui fasilitasi BKAD (misal, konsorsium ASITA Solo dengan RSI Yarsis dalam pengembangan paket wisata kesehatan)
- h. Meningkatnya nilai tambah (*value added*) UKM di sektor mebel rotan dan susu sapi perah
- i. Meningkatnya kerja sama diantara pelaku usaha di sektor mebel dan pariwisata

Hal yang dapat dijadikan pembelajaran bersama adalah pada BKAD Subosukawonosraten melahirkan kesepakatan bersama untuk membentuk sebuah badan hukum, yang dikenal dengan PT Solo Raya, yang diharapkan badan hukum ini dapat memperkuat strategi pemasaran regional bagi daerah-daerah di wilayah eks Karisidenan Surakarta. Dengan melihat capaian diatas, kerja sama daerah telah mampu mengefisienkan promosi bersama untuk peningkatan ekonomi wilayah, lancarnya koordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan dan administrasi pemerintah, lancarnya koordinasi dengan masyarakat dan pelaku usaha, dan melahirkan badan usaha profesional untuk memperkuat pemasaran regional.

### **2.6.2 Regional Management (RM) Barlingmascakeb**

Barlingmascakeb terdiri dari 5 (lima) Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Regional Management (RM) lahir atas kebutuhan bersama dalam semangat pengembangan ekonomi wilayah. Regional Managemen adalah lembaga kerja sama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dengan tujuan untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan antar daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya daerah.

a. Struktur Organisasi RM Barlingmascakeb



Sumber : [www.lekad.org](http://www.lekad.org), 2009

**GAMBAR 2.4**  
**STRUKTUR ORGANISASI RM BARLINGMASCAKEB**

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Masing-masing komponen Regional Mangemen tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Forum Regional adalah pemilik kerja sama dan pengambil kebijakan yang bersifat strategis dan memberikan arahan kepada dewan eksekutif
- Dewan Eksekutif berfungsi sebagai kelompok pengarah atau steering commite yang menterjemahkan kebijakan forum regional menjadi program strategis Barlingmascakeb. Dewan Eksekutif ini juga bertugas untuk melakukan penguatan internal organisasi agar kerja sama antar daerah bisa berjalan secara efektif dan efisien.

- Regional Manager merupakan pelaksana harian (operasional) yang melaksanakan program dan kegiatan RM Barlingmascakeb yang telah ditentukan oleh forum regional dan dewan eksekutif

c. Kewenangan RM

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan melalui Forum Regional dan Dewan Eksekutif

d. Sumber Pembiayaan

- Tetap  
Sharing pendanaan dari APBD Kab/Kota anggota dengan menggunakan pos Hibah
- Tidak Tetap  
Berdasarkan penawaran kerja sama dengan lembaga non pemerintah/badan swasta

e. Personil/Sumber Daya Manusia

Pengisian personil berdasarkan masing-masing struktur terdiri dari PNS pada struktur Forum Regional serta Dewan Eksekutif sedangkan pada Regional Manager diisi oleh tenaga profesional.

Beberapa capaian yang telah dimiliki oleh RM Barlingmascakeb diantaranya :

a. Pasar Lelang Komoditas Agro

Salah satu contoh keberhasilan pasar lelang adalah meningkatnya transaksi secara signifikan antara lain Pasar lelang XII di Banyumas dengan nilai transaksi Rp. 24.385.990.000,00 naik menjadi Rp 46.474.525.000,00 di pasar lelang XIII di Kebumen.

b. Promosi Produk

Promosi produk yang cukup berhasil yaitu adanya pesanan kerajinan Pandan ke Cina, Taiwan, dan Singapura kemudian adanya pesanan Minyak Nilam ke Nepal dan daun Nilam ke Jerman, Malaysia, dan India sebesar 10 ton/bulan

c. Bantuan Mesin

Dengan kerja sama daerah mendapatkan sumber pembiayaan diantaranya bantuan mesin ke Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 70.000.000,00,

Kabupaten Kebumen Rp. 74.000.000,00 dan Kabupaten Purbalingga Rp. 37.000.000,00

Perhitungan antara biaya operasional dan manfaat yang diperoleh dari pasar lelang dan bantuan mesin yang diterima RM Barlingmascakeb benar-benar terlihat adanya gambaran manfaat yang diperoleh dari adanya suatu kerja sama antar daerah. Dari biaya operasional sebesar 750 juta mendapatkan manfaat sebesar 181 juta dari bantuan mesin untuk Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga dan 2,77 Milyar dari keuntungan yang diperoleh petani dari 3 transaksi pasar lelang XIII sampai pasar lelang XIV.

Di bidang pariwisata capaian RM Barlingmascakeb cukup berhasil diantaranya memfasilitasi pengusaha transportasi Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dalam menerima pesanan bis pariwisata dari luar daerah sebanyak 12 buah, mendatangkan turis dari Belanda, Korea, dan Jepang ke objek wisata Dieng (kerja sama Barlingmascakeb dengan *tour leader* Yogyakarta), mendatangkan turis New Zealand ke Purbalingga, mendatangkan *tour leader* dan tamu ke Kabupaten Cilacap sebanyak 21 orang (kerja sama Barlingmascakeb dengan *tour leader* Yogyakarta). Dengan melihat capaian RM Barlimascakeb bisa dikatakan bahwa kerja sama daerah telah mampu meningkatkan ekonomi wilayah, efektif dan efisiensinya promosi, dan mendatangkan sumber pendanaan lain (bantuan).

### **2.6.3 Sekretariat Bersama Kartamantul**

Latar belakang dibentuknya kerja sama Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul) adalah karena adanya ketidakjelasan tentang kewenangan dan tanggung jawab pelayanan publik pada daerah-daerah perbatasan tersebut, selain itu juga kerja sama ini dibentuk karena ketiga daerah tersebut menghadapi permasalahan yang sama yaitu resiko pencemaran lingkungan akibat sistem pembuangan sampah dan pengelolaan air limbah yang buruk karena tidak memenuhi standar teknis dan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pencemaran lingkungan tidak memandang batas wilayah administrasi di tiap-tiap daerah. Untuk memudahkan koordinasi antar daerah tersebut, maka pada tahun 1997 dibentuklah Badan Sekretariat Kerja sama Pembangunan Yogyakarta,

Sleman, dan Bantul melalui Keputusan Gubernur selaku kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor 200/KPTS/1997. Sekretariat Bersama merupakan sebagai suatu metode untuk mengoptimalkan keterpaduan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan wilayah perbatasan.

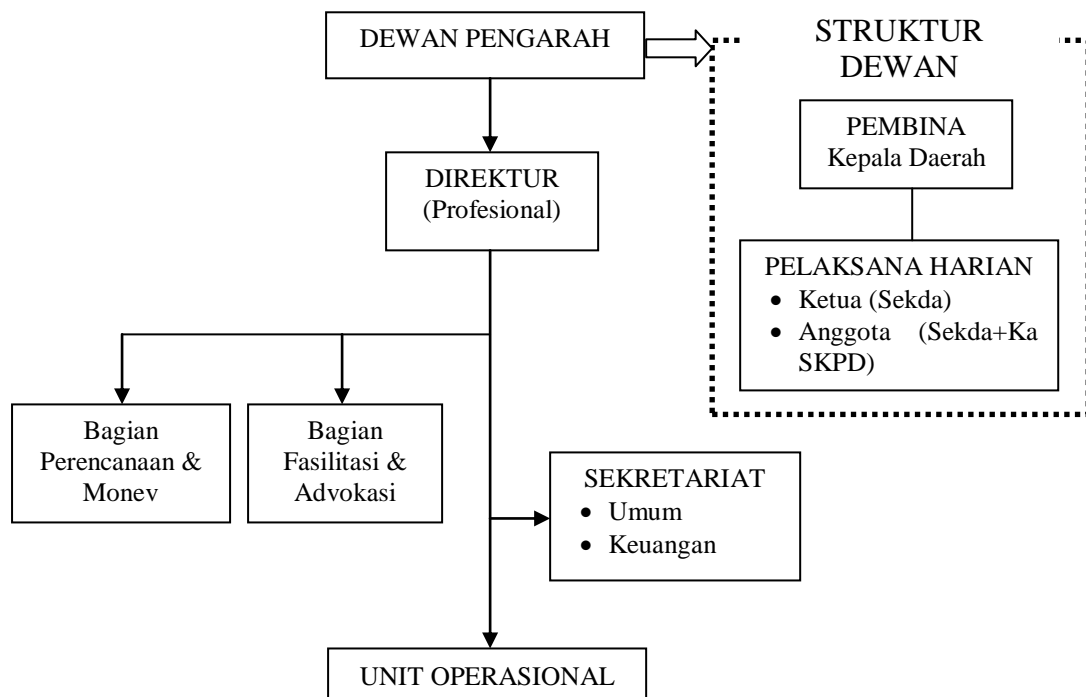
Sampai saat ini ada 6 (enam) sektor yang menjadi fokus kerja sama ketiga daerah tersebut yaitu kerja sama sektor air bersih, jalan, transportasi, drainase, air limbah dan persampahan. Sedangkan kerja sama dalam hal tata ruang masih dalam tahap penyempurnaan. Dalam kegiatan sehari-harinya Sekber mempunyai kantor yang dalam operasionalnya hanya diisi oleh 3 orang yaitu *office manager*, asisten teknis, dan asisten administrasi.

Selain didukung struktur organisasi yang kuat Sekber Kartamantul juga mempunyai visi dan misi sebagai landasan kerja mereka. Adapun visi dari Sekber Kartamantul adalah menjadi lembaga yang menjembatani terwujudnya kerja sama yang setara, adil, partisipatif, transparan, dan demokratis, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah, dan sehat yang didukung oleh sarana-prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran, dan peran serta masyarakat yang tinggi.

Sedangkan misi dari sekretariat bersama kartamantul adalah:

1. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil.
2. Melakukan mediasi penyelesaian masalah.
3. Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi.
4. Melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan.
5. Membangun jaringan kerja yang kuat.
6. Memberikan inisiasi perubahan.

a. Struktur Organisasi Sekber Kartamantul



Sumber : [www.lekad.org](http://www.lekad.org), 2009

**GAMBAR 2.5**  
**STRUKTUR ORGANISASI SEKBER KARTAMANTUL**

- Organisasi Sekretariat Bersama terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota
  - Ketua Sekber dijabat Sekretaris Daerah, Sekretaris Sekber dijabat Kepala Bappeda, sedangkan Bendahara dijabat oleh Kepala Instansi Keuangan dari masing-masing para pihak secara bergantian. Ketua, Sekretaris, Bendahara berasal dari kabupaten atau kota yang sama
  - Anggota adalah instansi teknis dari kabupaten/kota
  - Dalam upaya memperlancar kegiatan, Sekretariat Bersama dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan. Staf tersebut diangkat dari PNS atau non PNS, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekretariat Bersama
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- Dewan Pengarah, memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan bersama terhadap program atau kegiatan yang dapat dilakukan bersama

sehingga berkontribusi positif terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing

- Direktur, memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan, mengawal serta memfasilitasi di lapangan terkait kebijakan yang telah dirumuskan dan dimandatkan oleh dewan pengarah. Dalam pelaksanaannya direktur dapat dibantu staf profesional serta tim teknis dari SKPD terkait.

c. Kewenangan Sekber

- Sekber memiliki kewenangan melakukan koordinasi dengan daerah anggota di dalam melakukan perencanaan serta pengawasan program bersama
- Melakukan fasilitasi di dalam mengidentifikasi kebutuhan serta pembagian pembiayaan di dalam operasionalisasi kegiatan

d. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan bagi lembaga Sekber adalah APBD dari daerah masing-masing dengan menggunakan pos hibah serta pos kegiatan program yang sudah ada dari masing-masing SKPD terkait.

e. Personil/Sumber Daya Manusia

Pada Model Sekretariat Bersama sumber daya manusia yang digunakan berasal dari PNS dan Staf Profesional. Koordinator Sekber berasal dari PNS yang biasanya diduduki oleh Sekretaris Daerah yang berketempatan menjadi koordinator Sekber, sedangkan untuk menjalankan operasional sehari-hari dilakukan oleh seorang staf profesional dengan posisi sebagai direktur.

Pembelajaran yang dapat diambil dari Sekber adalah tingginya pelibatan berbagai pihak pada proses kerja sama, ini kemudian melahirkan komitmen kerja sama antar tiga wilayah tersebut untuk terus menjajaki program/kegiatan lainnya terkait peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa pembelajaran yang dapat menjadi kunci sukses adalah :

- a. Motivasi dan tuntutan kebutuhan kerja sama
- b. Budaya saling toleransi, musyawarah dan kesetaraan serta kebersamaan menjadi landasan utama
- c. Karakteristik wilayah (secara geografis) menyatu dalam suatu sistem yang fungsional

- d. Adanya dukungan pemerintah provinsi
- e. Adanya dukungan eksternal misalnya perguruan tinggi dan lembaga donor
- f. Adanya proyek riil kerja sama sektoral (Tempat pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Bersama)
- g. Kepemimpinan (*leadership*)
- h. Regulasi untuk kepentingan bersama
- i. Manajemen organisasi yang tertata dalam Sekretariat Bersama
- j. Keterlibatan masyarakat dan LSM yang cukup tinggi

Beberapa hasil kerja sama yang cukup berhasil diantaranya peningkatan kinerja Pengelolaan TPA Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul dan sinkronisasi penataan ruang dimana telah berhasil pengadaaan foto udara wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY), pembuatan peta dasar APY 1:5000, kesepakatan penggunaan satu peta dasar APY untuk produk perencanaan tata ruang kab/kota, menyusun RUTR kawasan perkotaan Kartamantul, *Pilot Project* Kerja sama Tata Ruang.

#### **2.6.4 Bali Tourism Development Corporation (BTDC)**

Proyek Nusa Dua, sebagai bagian dari rencana induk pengembangan Pariwisata Bali, merupakan pembangunan suatu kawasan Pariwisata dengan pemukiman wisatawan secara terpusat, yang jauh dari pusat kehidupan sehari-hari masyarakat Bali pada umumnya. Dengan demikian pengaruh langsung para wisatawan, khususnya pengaruh negatif akan dapat ditekan. Lahan yang memenuhi syarat ada di kawasan bukit, yaitu Nusa Dua, lahan yang tidak produktif, namun memiliki pantai dan berpasir putih yang indah, berpenduduk jarang, dan sangat dekat dengan Bandar Udara Ngurah Rai. Letak lahan tersebut terpisah dari masyarakat tradisional Bali.

Dalam rangka pelaksanaan rencana Nusa Dua, sebagai Kawasan Pariwisata telah dibentuk suatu Badan Usaha yaitu PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau lebih dikenal dengan *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC), yang bertujuan utama menyelenggarakan tersedianya prasarana dan sarana, mengundang investor untuk membangun hotel serta mengelola dan memelihara Kawasan Pariwisata Nusa Dua. Disamping itu, dibentuk Badan

Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali (BPRIP) dengan tugas konsultasi dan koordinasi, dengan Keppres No.26 tahun 1972 dan PP.No.27 tahun 1972 .

Badan usaha BTDC Nusa Dua mengelola kawasan seluas kurang lebih 350 Ha, yang semula tanah tandus dan tidak produktif, menjadi kawasan pariwisata yang menarik di Bali. Kawasan ini bahkan telah terkenal di manca negara sebagai salah satu dari 6 kawasan pariwisata yang terbaik di dunia. Pembangunan prasarana kawasan Nusa Dua dilakukan oleh BTDC dengan sumber pembiayaan yang dipinjam dari World Bank sesuai *appraisal* yang dibuat pada bulan Mei 1974. Pinjaman World Bank telah dilunasi oleh BTDC lebih awal dari berakhirnya waktu pelunasan pinjaman.

Maksud, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nusa Dua yaitu mencerminkan karakteristik standar internasional berskala tinggi bagi semua fasilitas yang direncanakan terutama, prasarana, peningkatan kualitas estetik kawasan terutama *landscape*-nya, serta budaya dan daya tarik pemandangan Bali yang unik. Serta dibangun sebagai kawasan pariwisata skala internasional dengan cara mengundang partisipasi hotel yang memiliki jaringan pemasaran internasional, menyajikan daya tarik yang unik dari Bali melalui pengadaan festival Budaya dan sarana hiburan lainnya, serta menciptakan panduan yang serasi dalam pengembangan kawasan yang tercermin dalam aneka ragam sarana-sarana yang disajikan maupun dengan menumbuhkan suasana yang aman dan nyaman. Preservasi dan perlindungan terhadap pohon kelapa merupakan ciri khusus dan vegetasi utama di kawasan ini dan mengatur variasi daerah konsesi yang cukup luas melalui penataan yang serasi.

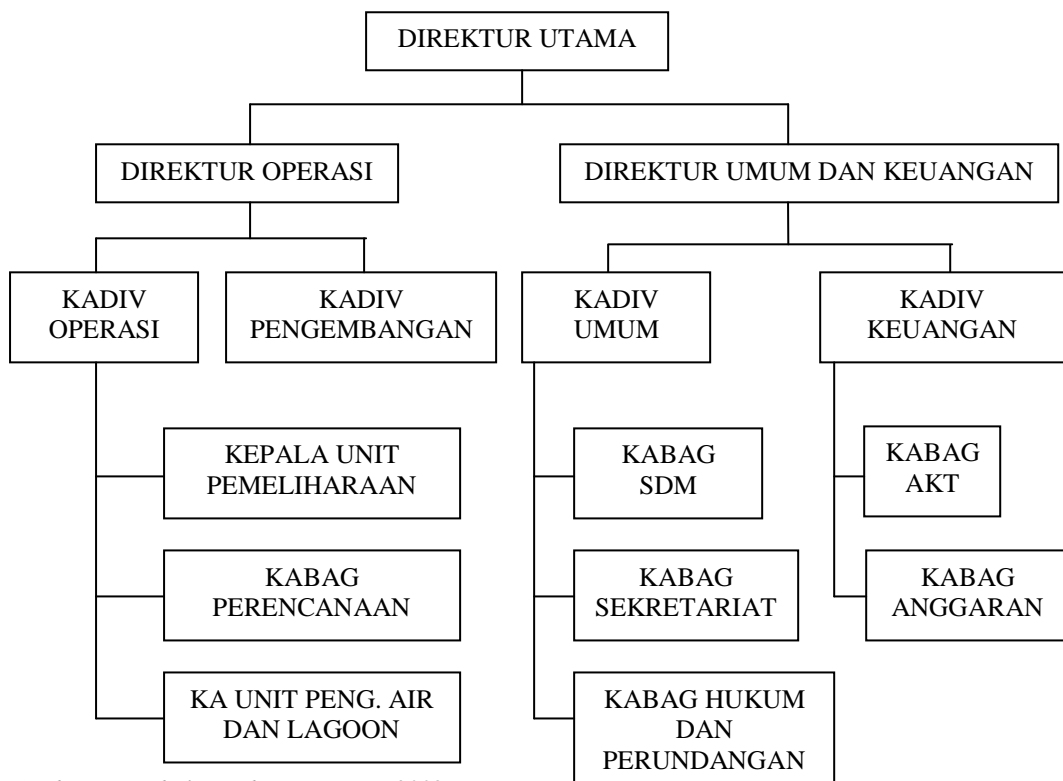
1. Konsep Pengembangan Nusa Dua

Kawasan Pariwisata Nusa Dua adalah merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Bali.

2. Pemutusan pengembangan mempunyai maksud untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan.
3. Efisiensi operasional untuk semua infrastruktur dan fasilitas umum.
4. Lahan disewakan kepada investor dengan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi.
5. Peraturan tata ruang menetapkan ketentuan fisik konstruksi antara lain

- Tinggi bangunan maksimum 15 meter
  - Batas sempadan antara bangunan dan pantai
  - Perbandingan antara luas lahan
6. Pembentukan *Design Committee* dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengarahkan desain bangunan/hotel.

Filsafat pembangunan yang dipersyaratkan bahwa kawasan pariwisata berfungsi sebagai suatu kesatuan yang serasi dan menyeluruh dengan dilengkapi berbagai unsur-unsur lain, sesuai yang direncanakan dan berfungsi sebagai pelengkap. Hanya melalui pendekatan yang demikian dapat dijamin terpeliharanya suatu penampilan dan pelayanan bermutu tinggi serta penerapan desain arsitektur yang peka ke dalam seluruh sarannya. Direksi BTDC telah berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan lingkungan berkelanjutan dalam mengelola kawasan pariwisata Nusa Dua. Kebijakan ini ditinjau kembali setiap tahun dan jika diperlukan akan diadakan pembaharuan kembali sesuai perkembangan kebijakan lingkungan regional dan international.



Sumber : [www.balinusaduaresort.com](http://www.balinusaduaresort.com), 2008

**GAMBAR 2.6**  
**STRUKTUR ORGANISASI BTDC**

Bali *Tourism Development Corporation* (BTDC) Nusa Dua memiliki sejarah keterlibatan yang *intens* terhadap pengembangan pariwisata nasional serta telah memainkan peran sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berimplikasi luas bagi masyarakat Bali. Keterlibatan tersebut telah melahirkan reputasi tersendiri bagi BTDC yang pengakuannya tidak datang secara lokal, nasional, tetapi juga secara internasional. Nusa Dua merupakan daerah gersang yang tidak menjanjikan secara ekonomis. Semuanya berubah ketika BTDC hadir dan mulai beroperasinya belasan hotel kelas dunia. BTDC menjadi pemicu kebijakan pemerintah untuk menjadikan Bali sebagai salah satu pintu masuk wisatawan dunia dengan memperkenalkan *direct flight* ke Pulau Dewata. BTDC telah mengharumkan nama Bali di tingkat nasional dan Internasional, terbukti setelah meraih sejumlah penghargaan predikat terbaik serta menerima penghargaan kalpataru dan sertifikat *Green Globe* sebagai satu satunya *resort* di dunia. BTDC juga berperan melahirkan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua serta terlibat aktif dalam bentukan Majelis utama desa Pekraman dan membidani lahirnya *Bali Tourism Friends*, sebagai organisasi yang peduli pada cita-cita *Tourism Sustainable Development* serta mendorong pengelolaan Bali sebagai *one island management*.

Prestasi–prestasi yang diraih oleh BTDC antara lain sebagai berikut :

1. Dinobatkan sebagai Kawasan Pariwisata terbaik di Dunia dari 6 kawasan yang ada oleh Sekjen WTO (*World Tourism Organisation*) pada tahun 1991.
2. Memperoleh PATA *Green Leaf* dari PATA tahun 1998 atas komitmen BTDC terhadap pelestarian lingkungan.
3. Memperoleh Penghargaan Kalpataru dari Pemerintah RI tahun 1999.
4. BTDC dinobatkan sebagai BUMN terbaik tahun 2002 (aset dibawah satu trilyun dari majalah Investor).
5. Penghargaan terhadap BTDC sebagai perusahaan yang nihil kecelakaan kerja (*Zero Exident*) berturut- turut sejak tahun 1999-2003.
6. Penghargaan *Green Globe 21* dari lembaga independen yang memperhatikan masalah lingkungan yang berskala internasional, yang sangat mengharukan bahwa kawasan Pariwisata Nusa Dua adalah kawasan pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi *Green Globe 21* untuk kategori *resort*.

7. Meraih penghargaan sebagai BUMN terbaik tahun 2005, kategori jasa dan perdagangan menurut majalah Investor tahun 2005.
8. PT.(Persero) Pengembangan Pariwisata Bali/BTDC Nusa Dua memperoleh penghargaan *Indonesian Quality Award* (IQA), dari menteri BUMN tanggal 14 Desember 2006.
9. Penghargaan dari Kepolisian Daerah (POLDA) Bali, atas Partisipasi dan Prestasi dalam mengelola keamanan dilingkungan Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Bulan Januari 2007.
10. Penghargaan Trihita Karana Award sebagai pengelola Kawasan Pariwisata terbaik tahun 2007, dari Bali *Travel News* tanggal 4 Desember 2007.
11. Penghargaan *Green Globe Community Standard for Community* 2007.
12. Penghargaan *Indonesiaan Quality Award* (IQA) Bulan Desember 2007.

## 2.7 Sintesa Teori

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerja sama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih yang mempunyai batas wilayah secara administratif, dalam posisi yang setingkat, seimbang dan terpadu untuk mencapai tujuan bersama.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perlunya kerja sama daerah (Abdurrahman, 2005) antara lain: faktor keterbatasan daerah, faktor kesamaan kepentingan, berkembangnya paradigma baru perlunya wadah komunikatif yang menunjang pendekatan perencanaan partisipatif sesuai dengan semangat otonomi daerah, jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi perlunya menggalang persatuan dan kesatuan dalam mempererat kerja sama antar daerah, sinergi antar daerah, peluang perolehan kerja sama dan sumber dana dari program pembangunan baik nasional maupun internasional, sebagai wadah komunikasi utama bagi *stakeholder dalam* kegiatan pembangunan, jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal pembangunan (3K).

3. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka hendaknya sektor yang dikerjasamakan memiliki persyaratan (Hoesein, 2009) sebagai berikut: penilaian berdasarkan sektor dengan kebutuhan kerja sama antar daerah di wilayah yang tinggi dan mendesak, memiliki potensi yang berpengaruh signifikan terkait pengembangan pembangunan di daerah dan wilayah, setidaknya terkait 2 daerah (kabupaten/kota) yang bertetangga, dapat mewujudkan prinsip-prinsip dasar dari tujuan kerja sama antar daerah, aktor kunci yang mendukung (*champion*), memiliki potensi pengembangan.
4. Dalam menerapkan bentuk-bentuk kerja sama daerah harus menerapkan prinsip-prinsip (Tarigan, 2009) : perlunya inklusivitas dalam kerja sama untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan menerapkan kaidah-kaidah partisipatif, mempertahankan komitmen dan semangat kerja sama, selalu mempelajari pilihan/alternatif, dan mengambil pilihan yang paling realistis, memperhatikan detail teknis dalam kerja sama, evaluasi secara berkala dan menjaga koridor kerja sama agar tetap mengarah pada tujuan awal kerja sama, responsif terhadap permasalahan yang muncul.
5. Ada beberapa model bentuk kerja sama antar daerah menurut Taylor dalam Tarigan (2009), yaitu diantaranya: *Handshake Agreement*, *Fee for service contracts (service agreements)*, *Joint Agreements* (pengusahaan bersama), *Jointly-formed authorities* (pembentukan otoritas bersama), *Regional Bodies*.
6. Elemen yang dianggap sebagai aktor kunci kerja sama antar daerah adalah pemerintah daerah kab/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pihak ketiga yang memiliki komitmen serta kompetensi terhadap isu yang akan dikerjasamakan baik masyarakat setempat, masyarakat usaha, maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Masing-masing elemen harus berperan dalam mendukung keberhasilan kerja sama antar daerah.
7. Faktor-faktor yang mendukung sebuah kerja sama antar daerah (Sanctyeka, 2009), yaitu: komitmen pimpinan daerah, identifikasi kebutuhan, pengintegrasian dan harmonisasi, partisipatif, analisa kelembagaan atau model kelembagaan, *Champion* sebagai aktor yang

berfungsi sebagai penggerak dan memotivasi.

8. Selain adanya faktor-faktor pendukung terdapat kendala atau hambatan dalam suatu kerja sama antar daerah diantaranya (Sanctyeka, 2009), yaitu: perbedaan kepentingan dan prioritas, belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya melakukan kerja sama, masalah dana, tidak ada dokumen legalitas sebagai payung kerja sama.
9. Kinerja yang baik dalam suatu kerja sama antar daerah memiliki karakteristik sebagai berikut (Kusnadi, 2002) : rasional, konsisten, tepat, efisien, tertantang, terarah, disiplin, sistematis, dapat dicapai, disepakati, terkait dengan waktu, berorientasi kepada kerja sama bersama.
10. Agar berhasil melaksanakan kerja sama tersebut dibutuhkan prinsip “*good governance*” diantaranya (Edralin, 1997), yaitu : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, konsensus, saling menguntungkan dan memajukan.
11. Agar dapat memberikan pengelolaan dan pengembangan yang optimal bagi suatu objek wisata maka diperlukan perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif.
12. Di dalam kepariwisataan fungsi elemen kelembagaan pariwisata adalah perencanaan pengembangan pariwisata, koordinasi antar berbagai badan/instansi pemerintah dan swasta yang mempunyai dampak dalam industri pariwisata, pengawasan bermacam-macam segi jasa-jasa pariwisata, merencanakan dan menerapkan promosi, dan kemungkinan mengawasi kebijakan-kebijakan harga.
13. Dalam aspek kelembagaan paling penting yang diperhatikan adalah bentuk organisasi baik formal atau informal, perencanaan organisasi, pelaksanaan pengendalian, perencanaan tenaga kerja (SDM), pola organisasi, sistem dan prosedur pola organisasi pemerintahan, peraturan pelaksanaan pendanaan, tingkat kemampuan personil (*skill*), beban lingkup kerja, dan pola organisasi kemasyarakatan.

**TABEL II.2**  
**PENDAPAT BEBERAPA PAKAR TENTANG VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN**

No	Peraturan/Pakar	Variabel yang dipertimbangkan	Variabel yang terbentuk
1.	Norton dalam Winarso (2002)	Faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kerja sama antar pemerintah lokal : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran dan kompetensi tiap pelaku</li> <li>• tekanan dari pemerintah/atasan</li> <li>• kebutuhan implementasi peraturan</li> <li>• ketersediaan format-format legal kerja sama</li> <li>• kemauan untuk bekerja sama</li> <li>• format keterwakilan dalam organisasi kerja sama</li> </ul>	Faktor pendorong terbentuknya kerja sama daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan daerah</li> <li>• Kemauan dan kesamaan kepentingan</li> <li>• Peluang perolehan kerja sama dan sumber dana</li> <li>• Wadah komunikasi stakeholders</li> <li>• Adanya format-format legal kerja sama</li> <li>• Format keterwakilan dalam organisasi kerja sama</li> </ul>
2.	Benjamin Abdurrahman (2005)	faktor-faktor yang menjadi penyebab perlunya kerja sama daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor keterbatasan daerah</li> <li>• Faktor kesamaan kepentingan</li> <li>• Berkembangnya paradigma baru</li> <li>• Jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi</li> <li>• Sinergi antar daerah</li> <li>• Peluang perolehan kerja sama dan sumber dana</li> <li>• Wadah komunikasi stakeholders</li> <li>• Jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawaban terhadap disintegrasi</li> </ul>
3.	Antonius Tarigan (2009)	Prinsip-prinsip dalam menerapkan bentuk-bentuk kerja sama daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya inklusivitas dalam kerja sama untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan menerapkan kaidah-kaidah partisipatif.</li> <li>• Mempertahankan komitmen dan semangat kerja sama.</li> <li>• Selalu mempelajari pilihan/alternatif, dan mengambil pilihan yang paling realistis.</li> <li>• Memperhatikan detail teknis dalam kerja sama.</li> <li>• Evaluasi secara berkala dan menjaga koridor kerja sama agar tetap mengarah pada tujuan awal kerja sama.</li> <li>• Responsif terhadap permasalahan yang muncul.</li> </ul>	Prinsip dalam menerapkan bentuk kerja sama daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya inklusivitas dalam kerja sama untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan menerapkan kaidah-kaidah partisipatif.</li> <li>• Mempertahankan komitmen dan semangat kerja sama.</li> <li>• Selalu mempelajari pilihan/alternatif, dan mengambil pilihan yang paling realistis.</li> <li>• Memperhatikan detail teknis dalam kerja sama.</li> <li>• Evaluasi secara berkala dan menjaga koridor</li> </ul>

Lanjutan

No	Peraturan/Pakar	Variabel yang dipertimbangkan	Variabel yang terbentuk
			<p>kerja sama agar tetap mengarah pada tujuan awal kerja sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsif terhadap permasalahan yang muncul.</li> </ul>
4.	Andi Oetomo (2006)	<p>Lingkungan Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan Pembangunan</li> <li>• Sumber Daya yang dimiliki</li> <li>• Kondisi <i>Stakeholder</i></li> </ul>	<p>Lingkungan Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan Pembangunan</li> <li>• Sumber Daya yang dimiliki</li> <li>• Kondisi <i>Stakeholder</i></li> </ul>
5.	Andi Oetomo (2006)	<p>Unsur-unsur Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Serta <i>Stakeholder</i></li> <li>• Mekanisme</li> <li>• Manajemen dan Organisasi</li> </ul>	<p>Unsur-unsur Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Serta <i>Stakeholder</i></li> <li>• Mekanisme</li> <li>• Manajemen dan Organisasi</li> </ul>
6.	Warsono dalam Sanctyeka, 2009	<p>Peran pemerintah daerah/kabupaten dalam kerja sama antar daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen kepala daerah</li> <li>• Pengalokasian sumber daya daerah</li> <li>• Kejelasan terhadap kebutuhan daerah atas kerja sama</li> </ul>	<p>Peran pemerintah daerah/kabupaten dalam kerja sama antar daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen kepala daerah</li> <li>• Pengalokasian sumber daya daerah</li> <li>• Kejelasan terhadap kebutuhan daerah atas kerja sama</li> <li>• Format kelembagaan yang sesuai dengan tujuan atau misi</li> <li>• Pelibatkan stakeholder dalam kelembagaan</li> </ul>
7.	Pratikno dan masudi dalam Sanctyeka (2009)	<p>Peran pemerintah daerah/kabupaten dalam kerja sama antar daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format kelembagaan yang sesuai dengan tujuan atau misi</li> <li>• Pelibatkan stakeholder dalam kelembagaan</li> </ul>	
8.	Thres Sanctyeka (2009)	<p>Faktor-faktor pendukung kerja sama antar daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan daerah</li> <li>• Identifikasi kebutuhan</li> <li>• Pengintegrasian dan harmonisasi</li> <li>• Partisipatif</li> <li>• Analisa kelembagaan atau model kelembagaan</li> <li>• <i>Champion</i>.</li> </ul>	<p>Faktor pendukung kerja sama antar daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan daerah</li> <li>• Identifikasi kebutuhan</li> <li>• Pengintegrasian dan harmonisasi</li> <li>• Partisipatif</li> <li>• Analisa kelembagaan atau model kelembagaan</li> <li>• <i>Champion</i>.</li> </ul>

Lanjutan

No	Peraturan/Pakar	Variabel yang dipertimbangkan	Variabel yang terbentuk
9.	Direktorat Kerja sama Pembangunan Sektoral dan Daerah	Faktor-faktor hambatan kerja sama antar daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan kepentingan dan prioritas</li> <li>• Besarnya harapan terhadap pemerintah pusat khususnya dalam hal pendanaan</li> <li>• Kuatnya peran pemerintah pusat</li> <li>• Masalah dana</li> <li>• Tidak ada dokumen legalitas sebagai payung kerja sama</li> </ul>	Faktor-faktor hambatan kerja sama antar daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan kepentingan dan prioritas</li> <li>• Belum tumbuhnya kesadaran melakukan kerja sama</li> <li>• Masalah dana</li> <li>• Tidak ada dokumen legalitas sebagai payung kerja sama</li> <li>• Belum adanya mekanisme dan prosedur yang jelas, aplikatif dan tepat</li> <li>• <i>Timing</i> dan <i>political will</i></li> <li>• Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah</li> </ul>
10.	Benjamin Abdurrahman (2005)	Faktor-faktor hambatan kerja sama antar daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya kesiapan perangkat perundangundangan</li> <li>• Adanya kebiasaan strategi regionalisasi desentralistik</li> </ul>	
11.	Setiawan dalam Winarso ed (2002)	Faktor-faktor hambatan kerja sama antar daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tumbuhnya kesadaran melakukan kerja sama</li> <li>• Belum adanya mekanisme dan prosedur yang jelas, aplikatif dan tepat</li> </ul>	
12.	Mudrajad Kuncoro (2004)	Faktor-faktor hambatan kinerja kerja sama antar daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah</li> <li>• Mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain terutama dalam mengumpulkan PAD (pendapatan asli daerah)</li> <li>• <i>Timing</i> dan <i>political will</i></li> <li>• Belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan pegawai pusat ke daerah</li> <li>• Tujuan otonomi daerah</li> <li>• Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah</li> </ul>	

Sumber : Penulis, 2010

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

#### **3.1 Sejarah dan Perkembangan Dataran Tinggi Dieng**

Daerah yang terletak di ketinggian  $\pm 2.063$  m di atas permukaan air laut ini merupakan suatu dataran yang dilingkari oleh bukit-bukit. Kondisi ini membuat Dieng memiliki panorama yang indah, yang ditunjang pula dengan udara yang sejuk.

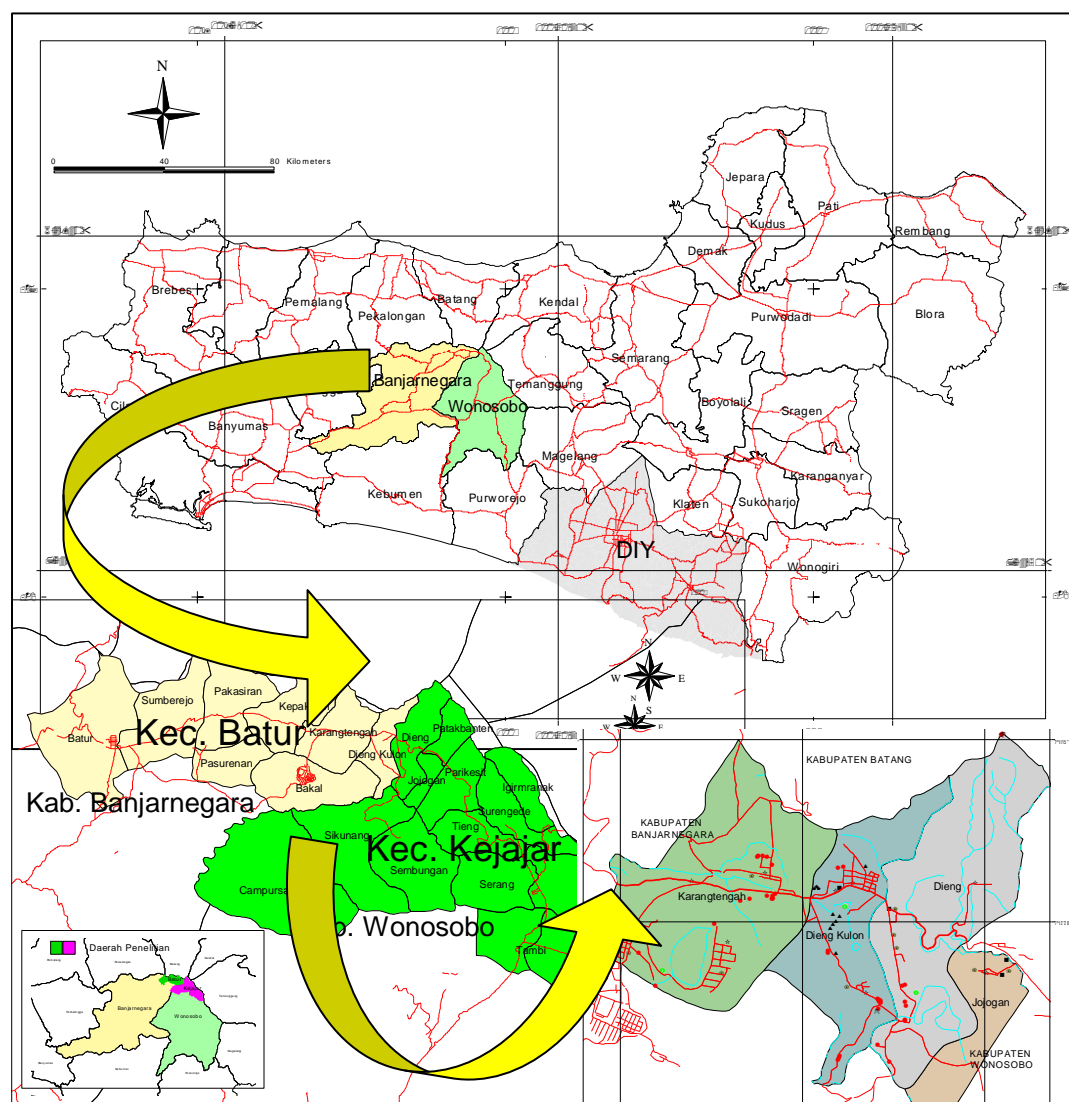
Menurut sejarah, Dataran Tinggi Dieng dulunya merupakan daerah kepundan gunung berapi yang sangat luas yang kemudian berubah menjadi rawa-rawa dan danau yang pada akhirnya berubah menjadi dataran. Proses terbentuknya Dataran Tinggi Dieng, terjadi pada akhir pleistosen atas Gunung Dieng lama mengalami *gravitational collaps* yang menyebabkan terbentuknya struktur *Baranchos* yaitu struktur yang membentuk kaldera Dieng. Setelah terbentuknya kaldera Dieng, aktivitas vulkanisme berlanjut dengan aktivitas pusat kerucut tengah yang terdiri dari dua buah gunung, yaitu Gunung Pagonan dengan Kawah Pager Kandeng dan Gunung Pamonan di selatan dengan dua kawah, yaitu Sibanteng dan Telaga Merdada.

Awal abad ke-19 bangunan candi ditemukan di Dataran Tinggi Dieng, setelah sekian lama tertimbun, diantara hutan lebat rapat dan rawa-rawa yang menyelimutinya. Sebanyak 13 belas inskripsi pernah ditemukan diantara reruntuhan batu candi dengan aksara kawi yang sangat tua. Satu inskripsi yang ditemukan dekat Candi Arjuna menunjuk tahun 731 Caka atau 809 M. Sama tuanya dengan piring emas yang ditemukan pada salah sebuah candi. Inskripsi, yang sekarang tersimpan di Museum Nasional menyebut nama *Dihyang*. Kata *Dihyang* ini barangkali karena proses waktu berubah bunyi menjadi Dieng. Kata *hyang* sendiri di nusantara dan di Semenanjung Indocina senantiasa berkait dengan segala yang termasuk alam gaib. Sebagaimana salah satu kata di Jawa untuk menyebut surga adalah *kahyangan*, tempat para *hyang*.

## 3.2 Karakteristik Fisik Kawasan Dataran Tinggi Dieng

### 3.2.1 Lokasi dan Batas Wilayah

Secara administratif, Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara terletak di 2 (dua) desa dalam wilayah Kecamatan Batur yaitu Desa Dieng Kulon dan Desa Karangtengah. Sedangkan pada Kabupaten Wonosobo terletak di 2 (dua) desa dalam wilayah Kecamatan Kejajar yaitu Desa Dieng Wetan dan Desa Jojogan. Gambar 3.1 menunjukkan letak kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo, 2009

**GAMBAR 3.1**  
**PETA KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

Batas-batas administrasi wilayah studi adalah:

- Sebelah Barat : Desa Kepakisan (Kec. Batur Kabupaten Banjarnegara)
- Sebelah Utara : Desa Pranten (Kabupaten Batang)
- Sebelah Selatan : Desa Bakal (Kabupaten Banjarnegara); Desa Sikunang (Kabupaten Wonosobo)
- Sebelah Timur: Desa Patakbanteng; Desa Parikesit (Kabupaten Wonosobo)

### **3.2.2 Kondisi Topografi**

Wilayah perencanaan Dataran Tinggi Dieng mempunyai ketinggian  $\pm 2.000$  m di atas permukaan air laut kondisi topografinya merupakan topografi lapangan dari mulai datar sampai bergunung-gunung. Secara keseluruhan kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan bukit-bukit dengan permukaan tebing yang miring dengan kontur yang jaraknya relatif pendek, maka kawasan Dataran Tinggi Dieng mempunyai kemiringan relatif tinggi. Kondisi topografi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian :

#### 1. Dataran Tinggi Primer

Merupakan kompleks dataran tinggi rata-rata 2093 m dpal. Komplek ini terletak di lingkungan Gunung Prau ( $\pm 2.569$  m), Juranggawah ( $\pm 2.450$  m), Gunung Panganan ( $\pm 2.245$  m).

#### 2. Dataran Tinggi Sekunder

Dataran tinggi sekunder merupakan kompleks dengan ketinggian antara 1.950 m di atas permukaan air laut. Komplek ini merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh Gunung Nogosari ( $\pm 2.415$  m) dan Gunung Gajah Mungkur ( $\pm 2.101$  m).

#### 3. Dataran Tinggi Batu Pekasiran

Dataran Tinggi Batu Pekasiran merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata  $\pm 1.630$  m di atas permukaan air laut dan terletak di kompleks Batu Pekasiran.

### **3.2.3 Kondisi Klimatologi**

Keadaan iklim di daerah Dieng, secara umum hampir sama dengan iklim di wilayah lain di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara yang silih

berganti antara musim penghujan dan musim kemarau sepanjang tahun. Dengan ketinggian  $\pm 2.093$  meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di daerah ini cukup dingin. Suhu udara maksimal rata-rata  $24,41^{\circ}\text{C}$  dan suhu terendah adalah  $14,19^{\circ}\text{C}$ . Puncak terendah dialami pada bulan Juli hingga Agustus yang mencapai  $5^{\circ}\text{C}$ . Hal ini menyebabkan pada bulan-bulan ini sering terjadi hujan es bahkan terkadang salju. Selain itu cuaca cepat sekali berubah antara keadaan berawan dan cerah.

Curah hujan di daerah Dieng cukup tinggi yakni mencapai 3.217,5 mm/tahun dengan jumlah hujan rata-rata tahunan sebanyak 114 hari. Pada musim penghujan, suhu udara cukup tinggi sehingga terasa lebih hangat dibanding pada musim kemarau. Hanya saja saat ini setiap datang musim hujan, Dieng selalu mengalami banjir lumpur. Hal ini terjadi karena adanya erosi dari pegunungan yang dijadikan lahan pertanian kentang. Sehingga tidak bisa menahan aliran air.

#### **3.2.4 Kondisi Hidrologi**

Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah perencanaan dilalui oleh beberapa aliran sungai. Air sungai ini dipergunakan untuk keperluan pertanian dan pengairan. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- a. Kali Tulis, yang merupakan batas administrasi antara daerah Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dengan Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Debit air sungai ini sekitar 120 liter/detik pada saat minimum.
- b. Sungai Serayu yang mempunyai mata air di Desa Dieng Wetan yang dikenal dengan Tuk Bimolukar, dengan debit air 541 liter/detik pada saat maksimal dan 342 liter/detik pada saat minimum.
- c. Selain sungai yang mengalir di wilayah perencanaan, terdapat sumber air yang digunakan penduduk setempat untuk keperluan sehari-hari yaitu sumber air Tuk Bimolukar, Gembirung dan sumber air Kali Tulis yang berada di sisi Utara desa.

### 3.3 Kondisi Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk Dieng bermata pencaharian sebagai petani, baik petani sendiri maupun buruh tani, buruh industri dan lain sebagian lainnya sebagai pedagang, buruh bangunan, pengangkutan, dan lain-lain. Pola ini mempengaruhi sosial budaya masyarakatnya yaitu gotong royong dan sikap tenggang rasa.

**TABEL III.1**  
**JUMLAH PENDUDUK KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG**

DESA	LUAS DESA	JUMLAH PENDUDUK
DIENG KULON	337.846	3.466
KARANG TENGAH	488.811	5.086
DIENG WETAN	282.000	2.129
JOJOGAN	126.000	1.448

Sumber : Kecamatan Batur dan Kejajar dalam Angka, 2008

Kawasan Dieng selain panoramanya yang indah, juga memiliki budaya khas berupa kesenian daerah yang memberikan andil dalam pengembangan kawasan pariwisata Dataran Tinggi Dieng. Kesenian-kesenian daerah ini dilakukan pada even-even tertentu, kesenian tersebut antara lain: upacara pemotongan rambut gembel, upacara ujudan, lengger, angguk.



Sumber : [www. cybertech.cbn.net.id](http://www.cybertech.cbn.net.id), 2009

**GAMBAR 3.2**  
**FOTO RUWATAN CUKUR RAMBUT GEMBEL**

### **3.4 Potensi Kawasan Dataran Tinggi Dieng**

#### **3.4.1 Potensi Hutan Lindung**

Hutan yang berada di Kawasan Dataran Tinggi Dieng seluruhnya berstatus sebagai Hutan Lindung. Oleh karena itu, Kawasan Dieng sebenarnya mempunyai fungsi sebagai kawasan resapan air, bagi wilayah di bawahnya.

Perkembangan yang terjadi saat ini hutan lindung di Kawasan Dieng, baik yang berada di Kabupaten Banjarnegara maupun yang berada di Kabupaten Wonosobo kini telah rusak, tanaman kayu hutan habis dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sebagian dari lahan hutan dimanfaatkan pula untuk kegiatan pertanian.

Dengan rusaknya hutan lindung di Kawasan Dieng, kini beberapa telaga telah kering seperti Telaga Siterus, Telaga Sewiwi, dan beberapa mata air telah hilang, masyarakat pegunungan Dieng di saat musim kemarau sudah kesulitan mendapatkan sumber air bersih untuk kebutuhan keluarga, dan kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan pertanian.

#### **3.4.2 Potensi Pertanian**

Pertanian adalah sala satu potensi yang dimiliki Kawasan Dataran Tinggi Dieng, yang berhawa sejuk sehingga sepanjang musim lahan pertanian bisa ditanami. Kegiatan masyarakat di sektor pertanian merupakan kegiatan sebagian besar masyarakat Dieng, dengan jenis tanamannya berupa tanaman kentang, sayur-mayur, karika, dan jenis lainnya.

Kentang pada saat ini merupakan tanaman primadona baik bagi masyarakat Dieng Banjarnegara maupun masyarakat Dieng Wonosobo, hampir semua lahan yang ada di kawasan Dieng diolah untuk tanaman kentang. Secara ekonomis kentang membawa keuntungan bagi masyarakat, karena produksi kentang Dieng, mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan DKI Jakarta.

Namun demikian pola tanam kentang ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, sehingga apa yang terjadi saat ini di Kawasan Dieng

lingkungannya sangat rusak, dan kandungan erosi sangat tinggi, sehingga tingkat kesuburan lahan pun semakin menurun.



*Sumber : [www.life-photoz.blogspot.com](http://www.life-photoz.blogspot.com), 2009*

**GAMBAR 3.3**  
**FOTO PERTANIAN KENTANG DIENG**

### **3.4.3 Potensi Panas Bumi**

Kawasan Dieng memiliki kandungan panas bumi, dimana dalam perut bumi kawasan ini terdapat potensi energi panas bumi yang sangat besar, dan terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

Saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Panas Bumi Dieng, dengan kapasitas yang dioperasikan menghasilkan energi listrik sebesar 3 x 60 MW, sehingga potensi ini akan sangat bermanfaat bagi kebutuhan energi listrik nasional, baik kebutuhan saat ini maupun yang akan datang.

Panas bumi disamping digunakan untuk kepentingan energi, teknologi pengelolanya merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama para pemerhati wisata teknologi.

### **3.4.4 Potensi Pariwisata**

Potensi pariwisata yang ada meliputi keindahan fisik alam, kebudayaan masyarakat, maupun beberapa objek. Di samping mempunyai alam yang sangat indah, Dataran Tinggi Dieng terkenal juga dengan peninggalan-peninggalan kunonya. Potensi alam yang ada meliputi panorama alam. Ditunjang dengan hawa yang sejuk, topografi yang berbukit menjadikan suatu potensi dengan suasana yang bervariasi. Potensi Budaya yang ada dan menunjang adalah pola kehidupan

masyarakat desa, tradisi dan adat istiadat yang tetap dipertahankan. Potensi pariwisata yang ada dapat dibagi menjadi:

a. Objek wisata alam

Merupakan perpaduan antara kehidupan alam pegunungan dan kejadian alam yang mengagumkan, seperti :

- 1) Telaga warna
- 2) Telaga pengilon
- 3) Gua Semar, Gua sumur, Gua jaran, Gua Jimat
- 4) Kawah sikidang

b. Objek wisata budaya

Merupakan objek wisata fisik dan kebudayaan, seperti :

- 1) Kelompok candi di Dataran Tinggi Dieng (*Dieng Plateau*) yang merupakan kumpulan dari beberapa candi. Kelompok candi ini merupakan kelompok candi Hindu tertua di Indonesia. Nama-nama candi ini diambil dari tokoh-tokoh pewayangan dari cerita Mahabharata. Kelompok candi ini letaknya menyebar dengan nama-nama seperti Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Semar yang semuanya terletak dalam satu kompleks. Pada sebelah utara Telaga Balekambang terdapat candi Gatotkaca dan disebelah selatannya lagi terdapat Candi Bima. Di samping candi terdapat juga sisa batur (pondasi) candi.



Sumber : [www. echoarianto.files.wordpress.com](http://www.echoarianto.files.wordpress.com), 2009

**GAMBAR 3.4**  
**FOTO KELOMPOK CANDI DIENG**

## 2) Tuk Bimolukar

Objek wisata ini berupa sumber mata air yang dipercaya dapat membuat orang awet muda. Tuk Bimolukar ini merupakan sumber mata air Sungai Serayu yang terletak di pintu Dataran Tinggi Dieng.

## c. Objek wisata buatan

Merupakan tempat atau bangunan yang dibuat dan dibangun sebagai objek wisata seperti Dieng Plateau Theatre yang berupa bangunan *theatre* yang memutar film tentang potensi wisata dan sumber daya alam Dataran Tinggi Dieng. Bangunan ini terhubung dengan objek Telaga Warna.



Sumber : [www.wonosobokab.go.id](http://www.wonosobokab.go.id), 2009

**GAMBAR 3.5**  
**FOTO DIENG PLATEAU THEATRE**

### **3.5 Kondisi Kunjungan Wisatawan Dataran Tinggi Dieng**

Pada priode tahun 1990-an, jumlah wisatawan yang berkunjung cukup banyak, yaitu rata-rata 130.000 orang per tahun. Data tahun 1993 wisatawan nusantara yang berkunjung berjumlah 79.169 orang, dan wisatawan mancanegara berjumlah 30.961 orang sehingga dari sektor pariwisata mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat seperti berkembangnya rumah penginapan, rumah makan, dan penjual cinderamata. Namun demikian sejak tahun 1997 dari tahun ke tahun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Dieng, baik wisatawan nusantara maupun manca negara terus mengalami penurunan Data tahun 2001, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung sebanyak 57.970 orang, sedangkan wisatawan manca negara turun drastis dan hanya mencapai 5.824 orang. Sedangkan pada tahun

2006 jumlah wisatawan nusantara sebanyak 57.048 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 4.728 Orang.

**TABEL III.2**  
**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN**

NO	TAHUN	JUMLAH WISATAWAN	
		Domestik	Mancanegara
1	1990	81.674	42.987
2	1991	80.067	39.758
3	1992	81.846	32.761
4	1993	79.169	30.961
5	1994	82.198	28.647
6	1995	76.398	26.197
7	1996	74.398	24.597
8	1997	71.864	22.757
9	1998	54.923	11.440
10	1999	69.054	10.993
11	2000	61.162	11.338
12	2001	57.970	5.824
13	2002	61.398	7.338
14	2003	55.516	4.716
15	2004	61.380	6.676
16	2005	57.763	6.838
17	2006	57.048	4.728
18	2007	77.169	5.231

*Sumber : BPS Banjarnegara dan Wonosobo 1990-2008*

Penyebab utama penurunan kunjungan wisatawan ke kawasan Dieng adalah krisis ekonomi dan juga karena adanya penurunan kualitas lingkungan kawasan Dataran Tinggi Dieng, seperti rusaknya hutan lindung, rusaknya keaslian situs purbakala, kumuhnya kawasan karena banyaknya sampah berserakan, terjadinya banjir dan endapan lumpur, serta cemaran bau dari pupuk kandang yang dibongkar di tepi jalan.

### **3.6 Kerja Sama Pariwisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng**

#### **3.6.1 Kerja Sama Periode Tahun 1974-1977**

Mulai terbentuk kerja sama antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo, tentang pembinaan objek-objek wisata di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dalam kerja sama tersebut diatur struktur pengelolaan Kawasan Wisata Dieng sebagai berikut:

- Ketua : Bupati Kabupaten Wonosobo
- Wakil Ketua : Kasubdit Pariwisata Kabupaten Banjarnegara

Secara spesifik bentuk kerja sama tersebut belum mengatur adanya pembagian pendapatan antara ke dua belah pihak, namun disepakati pengelola kawasan tersebut adalah Kabupaten Wonosobo

#### **3.6.2 Kerja Sama Periode Tahun 1977-1978**

Lahir surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. HK.14 Tahun 1997, tentang Daerah Kesatuan Wisata Dataran Tinggi Dieng dengan pembagian wilayah secara administratif sebagai berikut:

- a. Kabupaten Banjarnegara meliputi :
  - Desa Dieng Kulon
  - Desa Karang Tengah
  - Desa Kepakisan
  - Desa Pekasiran
- b. Desa Bakal Kabupaten Wonosobo meliputi :
  - Desa Dieng Wetan
  - Desa Sembungan

#### **3.6.3 Kerja Sama Periode Tahun 1978-1992**

Lahir kerja sama Kabupaten Banjarnegara dengan Kab. Dati II Wonosobo, mengenai “Penyempurnaan Bagi hasil Pendapatan Retribusi di Dataran Tinggi Dieng” dengan pengelola Kabupaten Wonosobo. Dalam kerja sama tersebut disepakati pembagian hasil 60% untuk Kabupaten Banjarnegara dan 40% untuk Kabupaten Wonosobo

### **3.6.4 Kerja Sama Periode Tahun 1992-1995**

Kerja sama antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo diperluas dengan instansi dan lembaga yang terkait dengan Kawasan Wisata Dieng. Adapun instansi terkait tersebut antara lain: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Perhutani.

Dalam kerja sama tersebut disepakati adanya perubahan bagi hasil. Adapun pembagian hasil yang disepakati sebagai berikut : Biaya Operasional 20% sisa diasumsi 100%, kemudian diambil untuk bagian Purbakala 5% dan Perhutani 5%, selanjutnya sisa diasumsi 100% kemudian dibagi dengan proporsi 60% untuk Kabupaten Banjarnegara dan 40% untuk Kabupaten Wonosobo.

Adanya surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 23 Nopember 1993 tentang kerja sama Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng, sehingga kemudian pada tahun 1994 ada keputusan koordinasi antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo yang dituangkan dalam program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

#### **3.6.4.1 Program Jangka Pendek**

Koordinasi yang dilakukan dalam Program jangka pendek yaitu:

1. Penyelesaian konsep kerja sama pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng.
2. Pola pembagian pendapatan retribusi wisatawan, kendaraan, parkir.
3. Hal-hal yang belum disepakati antara lain:
  - a. Manajemen pengelolaan objek wisata.
  - b. Pembagian pendapatan perbulan.
  - c. Program tahunan untuk pembinaan dan pengembangan objek wisata (cagar budaya dan cagar alam).

#### **3.6.4.2 Program Jangka Menengah**

1. Menetapkan status pengelolaan OWDT Dieng dengan alternatif:
  - a. Badan Pengelola Harian yang terdiri dari unsur Pemda Tingkat II Wonosobo dan Banjarnegara.
  - b. Kerja sama antara Badan Pengelola Harian dimaksud dengan Perhutani.

2. Penentuan sumbangan potensi masing-masing daerah untuk pengembangan objek wisata Dataran Tinggi Dieng melalui studi.

#### **3.6.4.3 Program Jangka Panjang**

Menyusun pola pengelolaan jangka panjang kawasan objek wisata Dataran Tinggi Dieng secara terpadu oleh instansi-instansi terkait.

#### **3.6.5 Kerja Sama Periode Tahun 1995-1996**

Disepakati adanya kerja sama daerah dengan adanya Keputusan Bersama Bupati Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Wonosobo Nomor 04/1995 Nomor 20/1995 tanggal 20 Juli 1995 tentang Kerja sama Pengelolaan Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng.

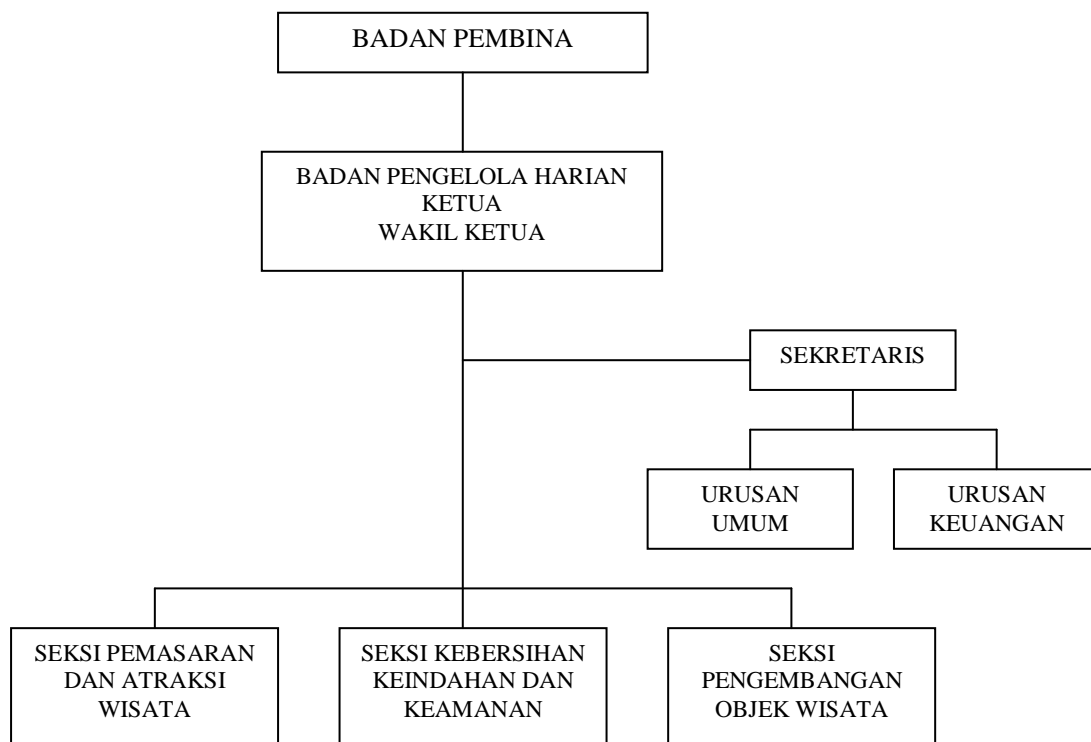
Objek wisata Dataran Tinggi Dieng yang dimaksud adalah wisata yang terletak di Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang meliputi Desa Dieng Kulon, Karangtengah, Bakal, Kepakisan, dan Pekasiran di Kec. Batur Kabupaten Banjarnegara dan Desa Dieng Wetan dan Desa Sembungan di Kec. Kejajar Kabupaten Wonosobo. Kerja sama meliputi pengelolaan objek wisata dan pembagian hasil pendapatan retribusi wisatawan, kendaraan wisata, dan parkir.

Untuk melaksanakan keputusan bersama ini dibentuk Badan Pembina dan Badan Pengelola Harian. Badan Pembina bertugas mengadakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan bersama terhadap pengembangan objek wisata Dataran Tinggi Dieng yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati Kabupaten Wonosobo.

Sedangkan tugas Badan Pengelola Harian sebagai berikut a) Menyusun rencana pemeliharaan, pengembangan, dan promosi objek wisata dan daya tarik wisata Dataran Tinggi Dieng; b) Mengelola administrasi dan keuangan objek wisata di Dataran Tinggi Dieng; c) Menangani kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan objek wisata. Badan Pengelola Harian terdiri dari unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo.

Pembagian hasil diatur sebagai berikut: setelah dipotong biaya operasional, upah pungut, bagian perhutani dan SPSP, sisanya untuk Kabupaten Banjarnegara 55% dan Kabupaten Wonosobo 45%. Pendapatan masing-masing kabupaten dikembalikan untuk pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian objek wisata Dataran Tinggi Dieng.



(Sumber : Lampiran SKB Nomor 04/1995 Nomor 20/1995)

**GAMBAR 3.5**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBINA**  
**DAN BADAN PENGELOLA HARIAN**

### 3.6.6 Kerja Sama Periode Tahun 1996-2000

Adanya keputusan bersama antara Bupati Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 43 Tahun 1996 Nomor 17 Tahun 1996 tentang penetapan Lokasi Pemungutan Retribusi dan Besarnya Tarif Retribusi Wisatawan, Kendaraan Wisata dan Parkir Kendaraan Wisata di Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng.

Lokasi pemungutan Retribusi pada jalan masuk menuju objek wisata yang tidak mengganggu lalu lintas kendaraan antara lain:

- a. Pos I di Portir Dieng Wetan.
- b. Pos II di Portir Soeharto-Whitlam.
- c. Pos III di Portir Aswatama.
- d. Pos IV di Portir Sikidang.
- e. Pos V di Portir Telaga Warna.

### **3.6.7 Kerja Sama Periode Tahun 2000-2002**

Terhadap SKB tahun 1995 dan 1996 oleh kalangan DPRD Kabupaten Banjarnegara dirasa belum mencerminkan suatu keadilan, sehingga muncullah berbagai saran dan usulan dari masyarakat lewat DPRD Banjarnegara untuk meninjau kembali peraturan pembagian hasil pendapatan Objek Wisata Dataran Tinggi Dieng. Keinginan DPRD Banjarnegara tersebut dituangkan pada surat Bupati Banjarnegara kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2000 nomor 556/1053 perihal Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dieng.

### **3.6.8 Kerja Sama Periode Tahun 2002-2005**

Adanya keputusan bersama antara Bupati Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 485 Tahun 2002 Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Bidang-bidang pokok yang dikerjasamakan meliputi:

#### **A. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan**

Bidang pariwisata dan kebudayaan mempunyai kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan promosi terpadu
- 2) Kegiatan pengelolaan produk wisata dan budaya
- 3) Kegiatan pengembangan produk wisata, budaya, dan penunjangnya

#### **B. Bidang Konservasi Alam dan Cagar Budaya**

- 1) Rehabilitasi kawasan hutan, lahan pertanian, dan cagar budaya
- 2) Pengelolaan Kawasan hutan, lahan pertanian dan cagar budaya

#### **C. Bidang sarana dan prasarana**

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas umum

- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas umum
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan dan fasilitas umum

D. Bidang pertanahan

- 1) Inventarisasi status kepemilikan tanah di wilayah kawasan
- 2) Penyelesaian status kepemilikan tanah
- 3) Pemetaan tanah

E. Bidang pemberdayaan Masyarakat

- 1) Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Peningkatan kemampuan kelompok
- 3) Penguatan Kelompok

F. Bidang Keamanan

- 1) Penanganan keamanan akibat bencana alam
- 2) Penanganan keamanan akibat manusia

G. Bidang Pendanaan

- 1) Penyediaan dana lewat APBD masing-masing yang seimbang
- 2) Upaya bersama menggali dana dari sumber-sumber dalam maupun luar forum.

Bentuk Kerja sama pengelolaan dan pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng berupa forum. Unsur forum terdiri dari 1) Dewan Penasehat yang terdiri Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memberikan arahan dan mengambil kebijakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan kawasan; 2) Pelaksana yang terdiri dari Instansi yang berwenang di kedua kabupaten sebagai pengambil kebijakan, bertanggung jawab atas semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan. Tugas pokoknya mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program-program pengelolaan dan pengembangan kawasan. Kerja sama ini ditetapkan mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun.

### **3.6.9 Kerja Sama Periode Tahun 2005- 2006**

Adanya Surat Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara Nomor 01.A Nomor 180/01 Nomor 497.A/2005 tanggal 3 Januari 2005 tentang Pengembangan Kepariwisata di

Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah di bidang pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Ruang lingkup kerja sama meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pengembangan Kepariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Adanya keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Sekretariat Bersama pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Tugas Sekretariat Bersama (Sekber) Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng:

- a. Mempersiapkan Pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng
- b. Mempersiapkan Pembentukan Badan Pengelolaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng
- c. Menyusun jadwal waktu (*time schedule*) tahapan proses pembentukan Badan Pengembangan dan Badan Pengelolaan
- d. Memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Wonosobo dalam masa peralihan (transisi) selama belum terbentuknya Badan Pengembangan dan Badan Pengelolaan
- e. Menetapkan objek wisata yang akan dikerjasamakan
- f. Menyusun konsep lembaga pengelola
- g. Menyusun konsep mekanisme kerja
- h. Menyusun konsep sistem pendanaan
- i. Menyusun konsep pembagian pendapatan
- j. Menyusun Konsep kerja sama dengan pelaku pariwisata

#### **3.6.10 Kerja Sama Periode Tahun 2006-2008**

Adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor : 556/2796 Nomor 050/582 Nomor 556/742/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Uji Coba Pelaksanaan Pungutan Karcis Masuk Terusan Kawasan Wisata Dataran Tinggi

Dieng. Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini untuk memudahkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi :

- a. Objek dan daya tarik wisata di Kawasan Poros

Objek wisata yang dikenakan karcis masuk terusan adalah telaga warna/pengilon, Dieng Plateau Theater di Kabupaten Wonosobo dan Kawah Sikidang, Komplek Candi Arjuna di Kabupaten Banjarnegara.

- b. Pengadaan Karcis Masuk terusan

Pengadaan karcis masuk disediakan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah

- c. Tarif Karcis Masuk terusan

- d. Tempat dan Pelaksana Pungutan Karcis Masuk terusan

- e. Pembagian hasil.

Pembagian hasil 50% untuk Kabupaten Banjarnegara dan 50% untuk Kabupaten Wonosobo. Jangka waktu uji coba sampai tanggal 30 Juni 2007.

Setelah berakhirnya perjanjian kerja sama sampai pada tanggal 30 Juni 2007 kerja sama uji coba pungutan karcis terusan diperpanjang kembali sampai dengan 31 Desember 2007.

### **3.6.11 Kerja Sama Periode Tahun 2008-2012**

Adanya penjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 050/1979 Nomor 556/598.A Nomor 556/242/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Pungutan Karcis Masuk Terusan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Maksud dan tujuan serta ruang lingkup sama dengan perjanjian kerja sama uji coba pungutan karcis pada tahun 2006. Tarif karcis masuk terusan untuk wisatawan nusantara sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Tempat pungutan karcis masuk terusan terletak di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dan Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan karcis masuk terusan. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KERJA SAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

Kerja sama antar daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara pada dasarnya telah melalui proses yang panjang dan mengalami pasang surut komitmen yang dibuat oleh *stakeholder* di kedua kabupaten. Dimana dengan pasang surutnya komitmen juga mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian atas dukungan dan hambatan yang terjadi pada kerja sama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dan format kelembagaan yang efektif, efisien, menguntungkan kedua belah pihak, dan mampu untuk mengembangkan kepariwisataan di Dataran Tinggi Dieng.

#### **4.1 Analisis Faktor-faktor Pendorong Kerja Sama Daerah Pariwisata**

Analisis faktor-faktor pendorong kerja sama daerah pariwisata dengan mengidentifikasi persepsi masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama daerah Kawasan Wisata Dieng dan identifikasi faktor-faktor pendorong kerja sama antar daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

##### **4.1.1 Analisis Persepsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Analisis persepsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten tentang kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng untuk mengetahui pemahaman masing-masing pihak tentang arti pentingnya kerja sama antar daerah. Analisis ini dengan melihat dokumen perencanaan daerah yang ada dan wawancara dengan *stakeholders* pada

masing-masing pihak yang berkepentingan dalam kerja sama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

#### **4.1.1.1 Analisis Persepsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Dalam RTRW Kabupaten Wonosobo tahun 2004 menyebutkan persinggungan antar wilayah sebagai akibat dari terjadinya titik temu aktivitas di wilayah-wilayah perbatasan memerlukan kerja sama antar daerah. Sebagai konsekuensi dari konstelasi wilayah Kabupaten Wonosobo terhadap wilayah sekitarnya adalah saling keterkaitan yang dapat bersifat komplementer, atau sub ordinat satu dengan lainnya. Kedua sifat keterkaitan ini berimplikasi pada pertemuan dua kepentingan, dengan tujuan masing-masing yang harus terakomodasi didalamnya.

Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng berada dalam wilayah perbatasan administratif Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dengan berada pada dua wilayah yang berbeda maka dalam upaya pengembangannya harus menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata tanpa batas atau lebih sering dikenal dengan *borderless tourism*, yaitu karakteristik pariwisata yang merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah administratif. Selain daerah pariwisata, kawasan Dieng mempunyai potensi gas bumi, holtikultura sehingga mempunyai banyak kepentingan dan permasalahan. Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan di Kawasan Wisata Dieng harus memiliki orientasi membangun daya tarik kolektif untuk menarik arus kunjungan wisatawan dari berbagai objek wisata di kawasan wisata. Persepsi ini berdasarkan informasi oleh Setyo Nugroho dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“...Kawasan wisata Dieng adalah kawasan wisata di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Dengan karakteristik satu kawasan berbeda wilayah administratif, maka pola pendekatan pengembangan pariwisata adalah *Borderless*. Yaitu kegiatan pariwisata yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah. Potensi dataran tinggi Dieng adalah pariwisata, gas bumi, holtikultura yang tentunya mempunyai banyak perbedaan kepentingan antar sektor dan antar wilayah. Permasalahan besar Dataran Tinggi Dieng adalah degradasi lingkungan di Pegunungan Dieng yang tidak berada pada wilayah Kabupaten Wonosobo saja.

Dengan adanya potensi dan permasalahan tersebut dalam penanganannya harus dengan kerja sama antar sektor dan wilayah sehingga pengembangan kawasan dapat terpadu, terintegrasi, dan komprehensif” (RP01/DOR1/1/1)

#### **4.1.1.2 Analisis Persepsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Baik disadari maupun tidak atau baik secara formal maupun tidak formal, bahwa antar wilayah kabupaten terjadi saling ketergantungan atau kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Ketergantungan atau kerja sama ini dapat terjadi karena masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga terjadi saling mengisi antara keduanya.

Faktor-faktor yang menjadikan adanya kerja sama antar daerah adalah adanya kepentingan bersama antar kedua belah pihak dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu adanya hubungan saling membutuhkan atau prinsip *supply and demand*, karena keunggulan dan kekurangan masing-masing wilayah. Dengan tersedianya potensi unggulan yang dibutuhkan di wilayah lain merupakan faktor terjadinya kerja sama. Hal ini berdasarkan informasi dari Dyah Setyanggar dari Bappeda Kabupaten Banjarnegara (2010), dari hasil wawancara bahwa :

”...antar wilayah kabupaten terjadi saling ketergantungan dikarenakan masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Hal ini menjadikan kebutuhan akan kerja sama begitu besar karena adanya hubungan saling membutuhkan atau prinsip *supply and demand*. Dengan ketergantungan diperlukan suatu kerja sama antar wilayah...” (RP05/DOR1/1/2)

Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan prioritas pembangunan dan perhatian khusus karena tingkat perkembangan wilayah di masa mendatang akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dengan memiliki potensi yang besar akan aset wisata baik wisata alam (keindahan alam dan fenomena alam), dan wisata budaya (peninggalan sejarah) akan tetapi memiliki kekurangan, diantaranya aksesibilitas ke kawasan Dieng terlalu jauh dan belum memadainya fasilitas penunjang dan pelayanan. Oleh karenanya diperlukan kerja sama antar sektor dan antar wilayah. Persepsi ini dijelaskan oleh Edi Sarwono dari Bagian Tapem Setda Kabupaten Banjarnegara (2010), dari hasil wawancara bahwa:

”...Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi yang besar pada sektor pariwisata. Selain potensi yang besar akan tetapi memiliki keterbatasan daerah untuk pengelolaan dan pengembangan. Keterbatasan daerah yang paling dirasakan adalah aksesibilitas kawasan. Dikarenakan jarak yang jauh dari Kota Banjarnegara, wisatawan sebagian besar melalui kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya dalam penanganannya harus dilakukan kerja sama lintas kabupaten terutama dengan Kabupaten Wonosobo...” (RP06/DOR1/1/1)

#### **4.1.1.3 Analisis Persepsi Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2006, mengenai *Blue Print* Pengembangan Destinasi Pariwisata Indonesia yang dilihat dari tiga variabel : *Market Perception* (persepsi wisatawan mengenai destinasi wisata menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting dalam penetapan suatu objek atau kawasan sebagai suatu destinasi pariwisata), *Borderless* (Pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah. Pengembangan pariwisata harus diarahkan secara terpadu lintas wilayah untuk membangun daya tarik kolektif yang kuat dan *Cluster* (“konsentrasi geografis dari mata rantai usaha produksi sektor tertentu dan institusi pendukungnya yang membentuk jaringan kerja sinergis dan komplementer”), didapati 34 destinasi yang diminati oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ketika melakukan perjalanan wisatanya di Indonesia. Dari ke 34 destinasi yang ada tersebut, Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng termasuk didalamnya yang tergabung dalam *cluster* Borobudur-Yogyakarta dan Solo.

Dalam perwilayahan, Kawasan Dieng sebagai kawasan andalan dalam pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Kawasan andalan merupakan kawasan wisata dengan objek dan daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat, serta mulai ditawarkan pada pasar internasional. Dampak pembangunannya atau kontribusi perekonomian terasa pada skala daerah. Kawasan Dieng juga merupakan kawasan konservasi sehingga dalam pengembangannya harus seimbang antara pariwisata dan pengendalian konservasi untuk mengembalikan panorama alam.

Dengan adanya otonomi daerah maka kewenangan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dilakukan oleh daerah. Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mengembangkan perekonomian secara makro dibutuhkan kerja sama lintas wilayah. Sehingga pengembangan saling terintegrasi dan komprehensif antar daerah. Persepsi ini dijelaskan oleh Raharja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (2010), dari hasil wawancara bahwa :

”...Dataran Tinggi Dieng dalam RIPP Jawa Tengah termasuk dalam kawasan andalan yang mempunyai fungsi kuat dalam skala regional. Dengan adanya otonomi daerah kewenangan pengelolaan dan pengembangan objek wisata dilakukan oleh daerah. Karena berada pada dua wilayah administratif yang berbeda untuk lebih mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang berimbas pada hilangnya panorama alam yang dimiliki membutuhkan kerja sama lintas wilayah” (RP07/DOR1/1/1)

**TABEL IV.1**  
**PERSEPSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH KAWASAN WISATA**  
**DIENG**

Persepsi Kerja Sama Daerah Pariwisata Dieng		
Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	Provinsi Jawa Tengah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena keunggulan dan kekurangan masing-masing wilayah terjadi hubungan saling membutuhkan atau prinsip <i>supply and demand</i> sehingga dibutuhkan kerja sama daerah</li> <li>• Pariwisata Dieng merupakan kawasan prioritas pembangunan dan perhatian khusus karena tingkat perkembangan wilayah dan memiliki potensi wisata alam dan budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata Dieng berada pada perbatasan administratif dalam pengembangannya menggunakan pendekatan <i>borderless tourism</i></li> <li>• Potensi pariwisata, gas bumi, dan holtikultura memiliki perbedaan kepentingan baik sektor dan antar wilayah yang dalam penanganan perlu peningkatan kerja sama antar sektor dan antar wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Dieng sebagai kawasan andalan yang mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional.</li> <li>• Karena berada pada dua wilayah administratif yang berbeda untuk lebih mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang berimbas pada hilangnya panorama alam yang dimiliki membutuhkan kerja sama lintas wilayah</li> </ul>

Sumber: Hasil analisis penulis, 2010

#### **4.1.2 Analisis Faktor-faktor Pendorong Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Faktor-faktor pendorong yang dianalisis dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng menggunakan variabel-variabel yang telah terbentuk dari beberapa teori kajian kerja sama antar daerah. Variabel tersebut yaitu keterbatasan daerah, kemauan dan kesamaan kepentingan, peluang perolehan sumber dana, wadah komunikasi *stakeholders*, adanya format-format legal kerja sama, organisasi kerja sama, dan jawaban terhadap disintegrasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya faktor pendorong lain yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan dengan menganalisis dokumen perencanaan, dokumen rapat koordinasi, serta wawancara dengan *stakeholders* yang terlibat dengan kerja sama daerah.

##### **4.1.2.1 Analisis Faktor Pendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Ada beberapa faktor pendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo melakukan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yaitu :

a. **Potensi Daerah dan Keterbatasan Daerah.**

Potensi dan keterbatasan daerah ini diantaranya produk wisata. Dimana didalamnya adalah atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan aktivitas. Potensi dan keterbatasan kedua kabupaten terhadap produk wisata dijelaskan sebagai berikut :

- **Atraksi**

Atraksi alam di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dibagi menjadi dua katagori kawasan, yaitu kawasan poros dan kawasan jeruji. Objek wisata kawasan poros pada kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng bisa dilihat di Tabel IV.2.

**TABEL IV.2**  
**OBJEK WISATA KAWASAN POROS WISATA DIENG**

No	Objek Wisata	Lokasi		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Telaga Warna	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
2	Telaga Pengilon	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
3	Kawah Sikendang	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
4	Gua Semar	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
5	Gua Sumur	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
6	Gua Jaran	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
7	Batu Semar	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
8	Dieng <i>Plateau Theater</i>	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
9	Tuk Bimolukar	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
10	Watu Kelir	Dieng Wetan	Kejajar	Wonosobo
11	Kelompok Candi Arjuna	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara
12	Candi Dwarawati	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara
13	Candi Gatotkaca	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara
14	Candi Bima	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara
15	Museum Kepurbakalaan	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara
16	Kawah Sikidang	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara
17	Telaga Balekambang	Dieng Kulon	Batur	Banjarnegara

*Sumber: Hasil analisis penulis 2010*

Dari objek wisata kawasan poros diatas, Telaga Warna, Telaga Pengilon, Gua Semar, Gua Sumur, Gua Jaran, Batu Semar berada dalam satu kompleks yaitu kompleks Telaga Warna. *Mapping* telaah potensi yang pernah dilakukan pada tahun 2005 menyebutkan, objek wisata Dieng yang menarik di wilayah Kabupaten Wonosobo adalah kompleks Telaga Warna, dan Dieng *Plateau Theater*. Untuk Kawah Sikendang, Tuk Bimolukar, Watu Kelir tidak menarik. Akan tetapi kompleks Telaga Warna kewenangan pengelolaan masih menjadi permasalahan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pengelolaannya dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Sehingga praktis objek wisata poros yang menarik dan dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo adalah objek wisata buatan yaitu Dieng *Plateau Theatre* (DPT). Hal ini berdasarkan informasi dari Rully E.B dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa :

“..Mapping yang dilakukan tahun 2005 objek wisata di kawasan poros Dieng yang menarik adalah Telaga Warna dan Dieng *Plateau Theatre*. Akan tetapi pengelolaan Telaga Warna masih tarik ulur dengan BKSDA karena adanya aturan PP No. 18 tahun 1994...” (RP02/DOR2/1/2)

Sedangkan daya tarik kepariwisataan di kawasan poros Kabupaten Banjarnegara yang termasuk menarik untuk dikunjungi adalah Kelompok Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Bima, Museum Kepurbakalaan Kailasa, Kawah Sikidang, Telaga Balekambang. Hanya Candi Dwarawati yang tidak menarik untuk kunjungan wisatawan. Karena kawasan poros adalah sebagai penggerak pariwisata di Dataran Tinggi Dieng dengan banyaknya objek wisata yang menarik dikunjungi menjadi potensi besar bagi kepariwisataan Kabupaten Banjarnegara di Dataran Tinggi Dieng.

Untuk daya tarik kawasan jeruji kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng bisa dilihat dalam tabel di bawah ini dengan jarak dari kawasan poros :

**TABEL IV.3**  
**SEBARAN OBJEK WISATA DI KAWASAN JERUJI WISATA DIENG**

No	Objek Wisata	Lokasi		Jarak Dari Kawasan Poros (kurang lebih)
		Desa	Kecamatan	
1	Ondo Budho	Sikunang	Kejajar	4 Km
2	Telaga Cebong	Sembungan	Kejajar	6 Km
3	Gardu Pandang	Tieng	Kejajar	6 Km
4	Gunung Sikunir	Sembungan	Kejajar	6 Km
5	Air Terjun Sikarim	Sembungan	Kejajar	9 Km
6	Air Terjun Seloka	Sembungan	Kejajar	9 Km
7	Agro Wisata Tambi	Tambi	Kejajar	10 Km
8	Telaga Menjer	Maron	Kejajar	18 Km
9	Telaga Merdada	Karang Tengah	Batur	5 Km
10	Kawah Sileri	Kepakisan	Batur	6 Km
11	Pemandian Air Panas Bitingan	Kepakisan	Batur	9 Km
12	Curug Sirawe	Kepakisan	Batur	9 Km
13	Sumur Jalatunda	Pekasiran	Batur	8 Km
14	Gua Jimat	Pekasiran	Batur	7 Km
15	Kawah Candradimuka	Pekasiran	Batur	10 Km
16	Telaga Dringo	Pekasiran	Batur	11 Km

Sumber: Hasil analisis penulis, 2010

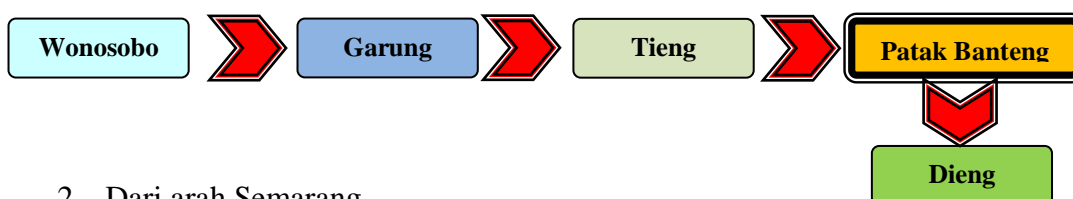
Dari *mapping* telaah potensi yang dilakukan daya tarik kepariwisataan yang menarik dalam wilayah Kabupaten Wonosobo adalah gardu pandang Tieng, agrowisata Tambi, dan Telaga Menjer. Untuk Gardu Pandang Tieng pengamatan di lapangan kondisi fisik bangunan kurang terawat. Potensi agro wisata Tambi memiliki sinergitas antara pesona alam dengan atraksi buatan yang mampu menciptakan aktivitas yang memiliki *value added* bagi wisatawan, misalnya *outbound training*, memetik daun teh dan lain sebagainya. Akan tetapi objek wisata ini mempunyai jarak yang cukup jauh dari Dataran Tinggi Dieng.

Daya tarik kepariwisataan di kawasan jeruji Kabupaten Banjarnegara yang termasuk menarik untuk dikunjungi adalah Kawah Sileri, Sumur Jalatunda, Gua Jimat. Untuk Telaga Merdada, Pemandian Air Panas Bitingan, Curug Sirawe, Kawah Candradimuka, Telaga Dringo dikategorikan sebagai objek wisata yang tidak menarik. Dengan memiliki 6 (enam) objek wisata yang menarik dikunjungi di kawasan poros dan 3 (tiga) objek wisata yang menarik di kawasan jeruji membuat potensi atraksi wisata di Kabupaten Banjarnegara cukup besar. Potensi ini bisa dikatakan 90% (persen) potensi atraksi wisata di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

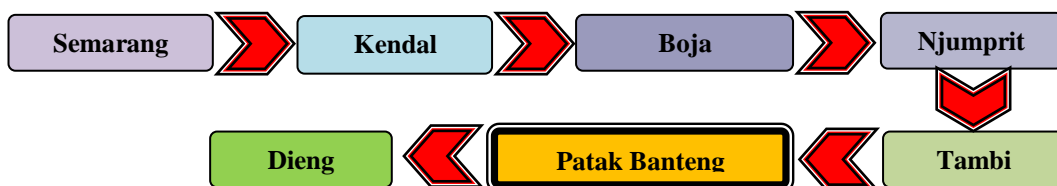
- **Aksesibilitas**

Untuk Aksesibilitas menuju Dieng secara geografis terdapat 5 (lima) pintu masuk yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengakses Kawasan Wisata Dieng. Aksesibilitas menuju kawasan Dieng bisa digambarkan dalam gambar diagram sebagai berikut :

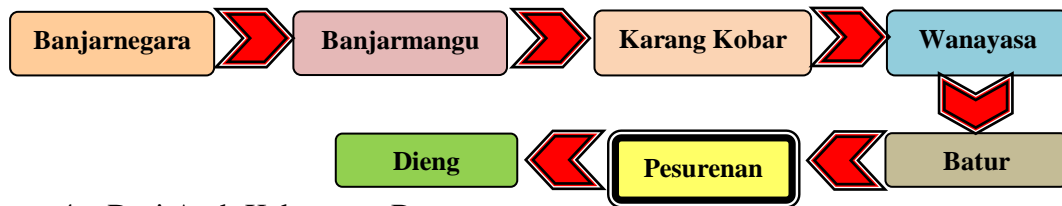
1. Dari Arah Kabupaten Wonosobo



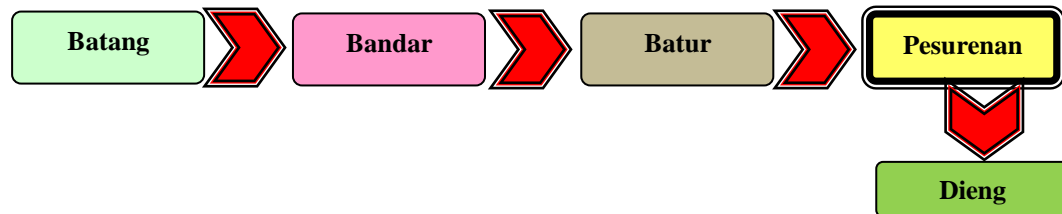
2. Dari arah Semarang



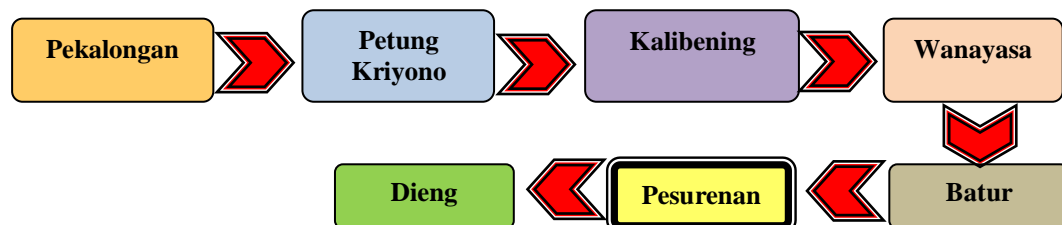
## 3. Dari arah Kabupaten Banjarnegara



## 4. Dari Arah Kabupaten Batang



## 5. Dari Arah Kabupaten Pekalongan



Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

**GAMBAR 4.1**  
**JALUR AKSESIBILITAS MENUJU KAWASAN DIENG**

Secara garis besar bisa dijelaskan aliran wisatawan dari arah timur, dalam hal ini dari Kabupaten Wonosobo dan Kendal akan bertemu pada satu daerah yaitu di daerah Patak Banteng sehingga tempat ini secara geografis relevan untuk dijadikan sebagai pintu masuk untuk memasuki Kawasan Wisata Dieng. Setelah melewati Patak Banteng wisatawan langsung menuju ke kawasan wisata Dieng. Sampai sejauh ini, banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Kawasan Wisata Dieng hanya menggunakan aksesibilitas dari Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dikarenakan posisi Kabupaten Wonosobo paling dekat dengan objek andalan wisata di Jawa Tengah lain yaitu Candi Borobudur dan Kota Yogyakarta dan Solo sebagai *core tourism region* yang masuk dalam cluster Borobudur-Yogyakarta dan Solo. Selain itu kawasan Dieng bagian koridor Semarang-Ambarawa-Wonosobo dengan pusat pengembangan di Semarang. Jarak Kawasan Dieng dengan Kota Wonosobo hanya berjarak 26 km dan Dengan kondisi jalan yang

relatif baik. Hal ini terbukti dengan kejadian musibah tanah longsor yang memutuskan jalan Wonosobo-Dieng pada tanggal 27 Februari 2009 sehingga wisatawan ke Dieng berkurang drastis jumlahnya sampai 90 %.



Sumber : [www.matanews.com](http://www.matanews.com), 2009

#### **GAMBAR 4.2** **FOTO LONGSOR AKSESIBILITAS KE DIENG DI DESA TIENG** **KABUPATEN WONOSOBO**

Meskipun kondisi jalan utama menuju Dieng relatif baik, akan tetapi tidak adanya alternatif jalan lain dan sempitnya jalan yang tidak bisa dilalui bus pariwisata besar menjadikan keterbatasan daerah dan hambatan dalam pengembangan pariwisata. Hal ini berdasarkan informasi oleh Rully E.B dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2010), dari hasil wawancara bahwa:

“...Wisatawan kebanyakan menuju Dieng setelah berkunjung dari Borobudur di Kabupaten Magelang. Dikarenakan Kota Semarang dan Yogyakarta sebagai pintu masuk wisatawan maka sebagian besar wisatawan yang menuju Dieng melalui Wonosobo karena jarak yang ditempuh lebih dekat. Terbukti pada kejadian longsor bulan Februari tahun 2009 yang memutuskan aksesibilitas ke Dieng dari Wonosobo jumlah kunjungan bisa turun sampai dengan 90%. Hal ini menjadi keprihatinan pemerintah kabupaten karena akses ke Dieng sempit dan seringnya terjadi longsor yang bisa memutuskan akses...” (RP02/DOR2/2/2)

Untuk aliran wisatawan dari arah barat, dalam hal ini dari Kabupaten Banjarnegara, Pekalongan, dan Batang akan bertemu pada satu daerah yaitu di daerah Pesurenan sehingga tempat ini secara geografis relevan untuk dijadikan sebagai pintu masuk untuk memasuki kawasan wisata Dieng. Setelah melewati

pesurenan wisatawan memiliki dua alternatif alur wisata untuk melakukan perjalanan wisata menuju ke Kawasan “Poros” Wisata Dieng yaitu:

- Langsung menuju objek wisata Jalatunda yang diteruskan menuju ke Kawasan “Poros” Wisata Dieng.
- Melalui Desa Grogol dan Desa Condong Catur (kedua desa tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara) melewati objek wisata Telaga Merdada yang diteruskan menuju ke Kawasan “Poros” Wisata Dieng,

Akan tetapi karena aksesibilitas ini tidak termasuk dalam cluster Borobudur-Yogyakarta dan Solo dan hanya aksesibilitas dari kawasan pantura menjadikan aksesibilitas ini tidak banyak dilewati oleh wisatawan. Jarak yang jauh dan tidak adanya titik penunjang kejenuhan wisatawan jalur aksesibilitas dari Banjarnegara menjadi tidak menarik untuk dilewati. Adanya kecenderungan kunjungan wisatawan kawasan Dieng setelah berkunjung dari Candi Borobudur Kabupaten Magelang dan dalam 1 (satu) hari perjalanan menjadikan aksesibilitas dari Kabupaten Banjarnegara tidak banyak dilewati. Jarak Yogyakarta dengan Kabupaten Banjarnegara sekitar 137 km sedangkan jarak Kabupaten Banjarnegara dengan Kawasan Dieng 56 km. Jarak ini sangat jauh bila dibandingkan dengan jarak Kabupaten Wonosobo yang hanya 107 km dari Yogyakarta dan 120 km dari Semarang. Hal ini berdasarkan informasi oleh Ibnu Hasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“...Kabupaten Banjarnegara memang mempunyai keterbatasan dalam akses jalan menuju kawasan Dieng. Selain jarak yang jauh, tidak adanya titik-titik yang menarik di sepanjang perjalanan menjadikan sebagian besar wisatawan lebih memilih lewat akses dari Kabupaten Wonosobo...” (RP04/DOR2/1/6)

- **Amenitas**

Dari observasi di lapangan amenitas di Kawasan Dieng baik yang berada pada wilayah Kabupaten Banjarnegara maupun Wonosobo masih kurang. Akomodasi yang tersedia hanya losmen dan *homestay*, warung makan, pusat informasi turis yang pembangunannya terhenti, produk souvenir (kerajinan) yang belum benar-benar khas dari Dieng. Akan tetapi fasilitas pendukung yang menunjang kawasan wisata di Kota Wonosobo cukup lengkap, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng

kebanyakan menginap di Kabupaten Wonosobo. Fasilitas hotel yang dimiliki adalah hotel bintang empat dan kawasan agrowisata Tambi dengan panorama alam perkebunan teh menjadi daya tarik wisatawan untuk menginap di Kabupaten Wonosobo.

- **Aktivitas**

Untuk aktivitas pariwisata Kabupaten Banjarnegara selangkah lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo. Untuk aktivitas di kawasan dieng Banjarnegara sudah menawarkan paket wisata Dieng Kulon. Wisatawan tak hanya diajak untuk menikmati keindahan, keunikan dan misteri di balik indahnya alam Dieng, namun juga berinteraksi dengan kegiatan dan budaya masyarakat setempat, menikmati sensasi dingin di puncak dieng ditemani hangatnya minuman purwaceng yang dipercaya dapat meningkatkan stamina dan vitalitas pria, namun juga dapat merasakan nikmatnya menjadi petani kentang di dieng serta asyik dan rumitnya membatik kayu. Paket kegiatan wisata itu yaitu :

1. Paket Kendi (Kentang Dieng). Paket ini mencakup menginap di *homestay* , makan dan minum, kunjungan ke objek wisata, berkebun kentang, membatik kayu, memasak makanan khas dieng dan menikmati kesenian tradisonal serta membawa souvenir cantik sebagai kenang-kenangan
2. Paket Purdi (Purwaceng Dieng). Paket berupa fasilitas menginap di *homestay*, kunjungan objek wisata, berkebun kentang, membatik kayu, memasak makanan khas dieng.

Hal ini informasi dari Ibnu Hasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“...Selain mengembangkan objek wisata yang ada, Kabupaten Banjarnegara berupaya meningkatkan atraksi di kawasan Dieng dengan menawarkan paket-paket kegiatan wisata diantaranya paket kendi (kentang dieng) dan paket purdi (purwaceng dieng)...” (RP04/DOR2/2/1)

Aktivitas di Telaga Warna sebagai cakupan objek wisata yang berada di Kabupaten Wonosobo bisa dikatakan tidak ada. Walaupun memiliki telaga yang cukup luas, tidak ada aktivitas seperti memancing, berperahu, olah raga air, dan restoran untuk menikmati pemandangan di sekitarnya. Wisatawan hanya 10 menit sampai 15 menit menikmati objek wisata alam di telaga warna setelah itu meninggalkan objek.

#### b. Kemauan Dan Kesamaan Kepentingan

Kawasan Dieng adalah kawasan yang mempunyai potensi wisata tinggi akan tetapi cenderung mengalami degradasi lingkungan karena eksploitasi ekonomi. Perencanaan pengembangan pariwisata yang terpadu serta perlunya pengaturan pola pemanfaatan ruang kawasan sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga memerlukan kerja sama lintas sektoral dan wilayah di sekitarnya. Selain pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten, Kompleks Candi Dieng adalah suatu wujud bangunan bersejarah yang perlu dilestarikan. Panorama Dieng adalah panorama alam yang langka yang tergantung dari pelestarian lingkungan di Kawasan Dieng. Penanganan degradasi lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kabupaten Wonosobo karena wilayah pegunungan Dieng berada dalam 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, Kendal, dan Temanggung. Hal ini berdasarkan informasi oleh Setyo Nugroho dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“Kabupaten Wonosobo mempunyai kemauan dan kepentingan dalam kerja sama daerah pariwisata dengan Kabupaten Banjarnegara. Karena pariwisata merupakan potensi sebagai sumber PAD dan penanganan degradasi lingkungan di Dieng tidak bisa ditangani sendiri oleh Kabupaten Wonosobo karena letaknya di beberapa kabupaten. Selain itu Candi Dieng adalah bangunan bersejarah yang pelestariannya harus tetap dijaga. Kerja sama daerah diharapkan bisa mengoptimalkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan yang ada” (RP01/DOR2/2/1)

Kesamaan kepentingan juga dirasakan Kabupaten Banjarnegara bahwa pengembangan pariwisata di Dieng akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis bagi daerah dan masyarakat di sekitarnya. Keuntungan ekonomis berupa pendapatan asli Daerah (PAD) dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Dieng Banjarnegara. Selain itu upaya untuk mensinergikan program-program bagi pemulihan degradasi lingkungan yang terjadi di kawasan pegunungan Dieng. Hal ini informasi oleh Dyah Setyanggar dari Bappeda Kabupaten Banjarnegara (2010), dari hasil wawancara bahwa:

“...Kerja sama daerah dalam pengembangan pariwisata Dieng diharapkan akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis berupa PAD dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu dibutuhkan keterpaduan untuk menangani permasalahan di kawasan terutama permasalahan degradasi lingkungan karena pola pertanian kentang yang tidak ramah lingkungan...” (RP05/DOR2/2/2)

### c. Penganggaran yang Minim

Adanya keterbatasan pendanaan baik dalam pengembangan pariwisata maupun penyediaan infrastruktur kawasan Dieng menjadi faktor pendorong kedua Kabupaten untuk bekerja sama. Kedua kabupaten memerlukan sumber-sumber pembiayaan lain di luar APBD kabupaten. Dengan adanya kerja sama lintas wilayah diharapkan akan mendapatkan sumber dana lain seperti APBD Provinsi maupun dari investasi swasta. Mengingat PAD Kabupaten Wonosobo yang didapat dari pariwisata Dieng hanya rata-rata 250 juta/tahun. Investasi pariwisata yang membutuhkan dana tidak sedikit dan tidak bisa langsung dinikmati hasilnya adalah salah satu permasalahan dalam kewenangan daerah dalam mengelola objek wisata. Hal ini berdasarkan informasi oleh Rully E.B dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“...Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk pengembangan pariwisata sangat minim. Target PAD dari Dieng hanya rata-rata 250 juta/tahun. Oleh karenanya diperlukan sumber pembiayaan lain...” (RP02/DOR2/3/4)

Untuk infrastruktur khususnya jalan pendanaan oleh pemerintah provinsi karena memang jalan utama menuju dieng adalah kelas jalan provinsi yang kewenangannya oleh pemerintah provinsi.

Untuk Kabupaten Banjarnegara yang paling berat dirasakan adalah pendanaan aksesibilitas menuju Dieng yang membutuhkan dana besar dan keterpaduan dengan kabupaten lain. Kabupaten Banjarnegara memandang pembangunan alternatif akses menuju Kawasan Dieng sangat penting sehingga tidak tergantung akses dari Kabupaten Wonosobo yang sempit dan seringnya longsor yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu Kabupaten Banjarnegara membutuhkan pendanaan dalam pengembangan destinasi wisata. Hal ini informasi oleh Dyah Setyanggar dari Bappeda Kabupaten Banjarnegara (2010), dari hasil wawancara bahwa:

“Kabupaten Banjarnegara memiliki keterbatasan dalam pendanaan pembangunan. Dengan ada kerja sama daerah diharapkan mendapatkan sumber pembiayaan lain untuk pembangunan. Untuk pariwisata dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pengembangan destinasi wisata dan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pariwisata” (RP05/DOR2/3/1)

#### d. Wadah Koordinasi Antar Stakeholder

Koordinasi dilakukan antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan masyarakat, diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat pariwisata dan Kelompok-kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Koordinasi ini biasanya merumuskan kerja sama dalam keamanan, kebersihan, pengarahannya rute pengunjung, pengelolaan parkir, serta akomodasi. Hal ini berdasarkan informasi oleh Setyo Nugroho dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“...Koordinasi kerja sama daerah dilakukan secara insidental misalnya pada masa lebaran. Semua *stakeholders* berkumpul untuk merumuskan dari arahan wisatawan, pengelolaan parkir, keamanan dan lain-lain” (RP01/DOR2/4/3)

Wadah koordinasi ini sangat penting karena mengingat Dieng di kawasan yang sama sering timbul permasalahan di tingkat pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Walaupun tidak secara berkala melakukan koordinasi akan tetapi koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Dieng selalu dilakukan di tataran pelaksanaan di lapangan. Apalagi beberapa objek bukan hanya wewenang pemerintah kabupaten seperti kompleks candi yang masih dibawah kewenangan Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) dan peran BKSDA di pegunungan Dieng. Dengan kerja sama antar daerah akan lebih mudah dalam mencapai keterpaduan dalam pengembangan kawasan. Hal ini berdasarkan informasi oleh Ibnu Hasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara (2010), dari hasil wawancara bahwa:

“...Koordinasi yang dilakukan dalam kerja sama dengan Kabupaten Wonosobo selalu dilakukan walau tidak secara berkala. Koordinasi sangat penting mengingat sering timbulnya permasalahan di lapangan. Dengan kerja sama daerah diharapkan tercapai keterpaduan dalam pengembangan kawasan...” (RP04/DOR2/5/3)

#### e. Format-Format Legal Kerja sama

Perjalanan format legal kerja sama daerah tentang pengembangan wisata Dieng sudah dilakukan sejak kawasan Dieng mulai ‘dijual’ sebagai destinasi pariwisata. Pimpinan Daerah sudah sejak dulu sudah menyadari pentingnya kerja sama antar daerah dan adanya format legal kerja sama. Adanya surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. HK.14 Tahun 1977, tentang “Daerah Kesatuan Wisata Dataran Tinggi Dieng” yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten

Wonosobo menjadi pendorong untuk kedua kabupaten melakukan kerja sama daerah. Kerja sama daerah yang masih dilaksanakan sampai dengan tahun 2012 adalah adanya perjanjian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Pungutan Karcis Masuk Terusan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Perjanjian ini berdasarkan adanya Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara pada tahun 2005 tentang Pengembangan Kepariwisata di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Kerja sama yang pernah dilakukan selalu ditindaklanjuti adanya format legal kerja sama. Walaupun pada kenyataannya terjadi pasang surut komitmen kedua belah pihak dalam kerja sama pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

f. Organisasi Kerja sama

Organisasi kerja sama yang pernah terbentuk berupa forum dan sekretariat bersama. Akan tetapi organisasi ini tidak berjalan karena adanya beberapa permasalahan. Kerja sama yang dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo pada saat ini tidak dengan adanya organisasi kerja sama. Hubungan kerja sama hanya koordinatif lintas wilayah. Adanya kerja sama tiket terusan hanya koordinasi dalam pengadaan karcis masuk terusan, penentuan tarif masuk terusan, penentuan tempat dan pelaksanaan pungutan karcis masuk terusan, dan pembagian hasil 50% (persen) untuk Kabupaten Banjarnegara dan 50% (persen) untuk Kabupaten Wonosobo. Karena kerja sama yang ada sekarang hanya mengenai tiketing objek wisata dan pengelolaan serta pengembangan pariwisata masih dilakukan oleh masing-masing kabupaten maka dirasakan oleh kedua kabupaten tidak perlu adanya organisasi kerja sama.

g. Jawaban Terhadap Disitegrasi

Dengan adanya kerja sama antar daerah telah meredam adanya disintegritas dan ego sentimen kedaerahan. Koordinasi yang dilakukan secara insidental melalui kerja sama telah berhasil meredam permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata di perbatasan administratif. Permasalahan yang sering terjadi adanya ketegangan arahan kedatangan pengunjung di pintu masuk kawasan wisata Dieng pada musim ramai wisatawan. Kedatangan

wisatawan ke Dieng sebagian besar melalui Kabupaten Wonosobo dan melalui pintu masuk di Desa Patak Banteng dimana terdapat pertigaan yang bisa mengarahkan ke objek wisata. Untuk ke kanan sebagian besar mengarah kepada objek wisata di Kabupaten Banjarnegara dan untuk ke kiri mengarah pada objek wisata di Kabupaten Wonosobo. Dengan kerja sama antar daerah maka bisa disepakati untuk arahan perjalanan kedatangan pengunjung. Wisatawan diarahkan ke kiri yang mengarah pada objek wisata di Kabupaten Wonosobo terlebih dahulu. Selain itu dengan kerja sama antar Daerah bisa disepakati pengelolaan parkir di masing-masing objek wisata. Hal ini berdasarkan informasi oleh Tri Untoro dari Bappeda Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“...Koordinasi lintas kabupaten untuk pariwisata Dieng telah meredam permasalahan-permasalahan pelaksanaan pengelolaan pariwisata. Permasalahan yang sering muncul yaitu pengarahan arus wisatawan di musim lebaran dan pengelolaan lahan parkir” (RP03/DOR2/3/4)

Untuk kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng kepentingan yang ada bukan hanya sektor pariwisata, banyak permasalahan diantaranya permukiman, infrastruktur, dan degradasi lingkungan. Karena banyaknya kepentingan maka kerja sama daerah diharapkan dapat meredam ego kedaerahan. Hal ini berdasarkan informasi oleh Edi Sarwono dari Bagian Tapem Setda Kabupaten Banjarnegara (2010), hasil dari wawancara bahwa:

“...Kabupaten Banjarnegara perlu bekerja sama dengan kabupaten Wonosobo dalam menangani kawasan Dieng karena berbagai kepentingan dan permasalahan. Karena berbatasan administratif diharapkan bisa meredam konflik dan ego sektora” (RP06/DOR2/3/4)

**TABEL IV.4**  
**SINTESA ANALISIS GAP/KESENJANGAN FAKTOR PENDORONG KERJA SAMA ANTAR DAERAH KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
a.	Potensi dan keterbatasan daerah			
	Atraksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di kawasan poros yang menarik kelompok candi Arjuna, candi Gatotkaca, Candi Bima, Museum Kailasa, Kawah Sikidang, Telaga Balekambang</li> <li>• Di kawasan jeruji yang menarik Kawah Sileri, Sumur Jalatunda, Gua Jimat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di kawasan poros yang menarik Kompleks Telaga Warna dan DPT</li> <li>• Komplek Telaga Warna masih terjadi permasalahan pengelolaan dengan BKSDA</li> <li>• Di kawasan jeruji yang menarik Gardu Pandang tieng, agro wisata Tambi, Telaga Menjer dan terlalu jauh dengan kawasan poros</li> </ul>	Kabupaten Banjarnegara lebih unggul memiliki potensi atraksi wisata
		<b>Baik</b>	<b>Kurang</b>	
	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jauh dan tidak menarik untuk dilewati</li> <li>• Bukan termasuk dalam custer pariwisata Borobudur Yogyakarta dan Solo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekat dan menarik dilewati dengan adanya panorama Dieng</li> <li>• Termasuk dalam cluster Borobudur Yogyakarta Solo dan koridor Semarang Ambarawa Wonosobo</li> <li>• Sempit dan ancaman bencana lonsor sehingga aksesibilitas ke Dieng terancam</li> </ul>	Wisatawan sebagian besar melewati Kabupaten Wonosobo karena dekat dan sepanjang akses adanya panorama pegunungan Dieng yang indah. Akan tetapi karena jalan sempit dan adanya ancaman tanah longsor hal ini menjadi hambatan yang serius dalam aksesibilitas ke kawasan Dieng
		<b>Kurang</b>	<b>Cukup</b>	

lanjutan

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
	Amenitas	Amenitas cukup memadai, hanya penginapan yang kurang memadai sedang amenities pendukung di kota Kabupaten Banjarnegara cukup dengan mempunyai hotel bintang satu	Amenitas di Kawasan Dieng masih kurang akan tetapi fasilitas pendukung di kota Kabupaten Wonosobo lengkap dengan fasilitas hotel bintang empat dan villa di agro wisata Tambi yang cukup menarik	Amenitas di Kawasan Dieng kurang memadai tetapi amenities pendukung di masing-masing kota berbeda dengan fasilitas pendukung yang lebih lengkap di kota Kabupaten Wonosobo
		<b>Cukup</b>	<b>Baik</b>	
	Aktivitas	Sudah menawarkan paket wisata Dieng Kulon, wisatawan tak hanya diajak untuk menikmati keindahan, keunikan dan misteri di balik indahnya alam Dieng tapi juga berinteraksi dengan kegiatan dan budaya masyarakat setempat	Walaupun memiliki telaga yang cukup luas tidak ada aktivitas seperti memancing, berperahu, oleh raga air dan restaurant untuk menikmati pemandangan di sekitarnya	Aktivitas di Kawasan Dieng belum maksimal dikembangkan walaupun mempunyai potensi yang besar alam dan budayanya
		<b>Cukup</b>	<b>Kurang</b>	
b.	Kemauan dan Kesamaan Kepentingan	Pengembangan pariwisata di Dieng akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis berupa PAD dan penyediaan lapangan kerja selain itu upaya mensinergikan program-program bagi pemulihan degradasi lingkungan	Kawasan Dieng mempunyai potensi wisata tinggi tapi cenderung mengalami degradasi lingkungan yang parah karena eksploitasi ekonomi memerlukan keterpaduan perencanaan pengembangan pariwisata dan pola pemanfaatan ruang kawasan selain itu wujud bangunan bersejarah yang perlu dilestarikan	Kedua Kabupaten mempunyai kemauan dan kesamaan kepentingan dalam pengembangan kawasan Dieng karena mempunyai potensi tinggi tetapi mengalami degradasi lingkungan yang parah
		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	

lanjutan

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
c.	Penganggaran	Kabupaten Banjarnegara memiliki keterbatasan dana terutama dalam menangani keterbatasan akses menuju kawasan Dieng	Kabupaten Wonosobo memiliki keterbatasan dana dengan kerja sama daerah diharapkan mendapat sumber dana lain di luar APBD (pusat, provinsi, dan investasi)	Kedua kabupaten memiliki pendanaan yang terbatas dan harapannya dengan kerja sama daerah mendapatkan sumber pendanaan pembangunan yang lain
		<b>Kurang</b>	<b>Kurang</b>	
d.	Wadah koordinasi	Dengan adanya kerja sama daerah merupakan suatu wadah koordinasi semua stakeholders mengingat adanya permasalahan di pengelolaan dan pengembangan kawasan Dieng	Kerja sama daerah merupakan wadah koordinasi antar stakeholders baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta maupun masyarakat.	Kedua kabupaten menyadari bahwa kerja sama daerah dapat menjadi wadah koordinasi semua stakeholders
		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
e.	Format-format legal kerja sama	format legal kerja sama daerah sudah dilakukan dengan Kabupaten Wonosobo tentang pengembangan wisata Dieng sudah dilakukan sejak kawasan Dieng mulai 'dijual' sebagai destinasi pariwisata	Kerja sama yang pernah dilakukan selalu ditindaklanjuti dengan format legal kerja sama walaupun pada kenyataannya terjadi pasang surut komitmen kedua belah pihak dalam kerja sama pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng	Format legal kerja sama selalu dilakukan kedua kabupaten dalam kerja sama pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng
		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
f.	Organisasi kerja sama	Sekber yang terbentuk tidak berjalan karena tidak mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Selain itu adan beberapa permasalahan tentang kewenangan di objek wisata.	Pernah terbentuk organisasi kerja sama berupa forum dan sekber tetapi tidak berjalan karena adanya beberapa kendala. Kerja sama dilakukan hanya bersifat koordinatif	Bentuk organisasi pariwisata belum bisa disepakati karena kedua kabupaten
		<b>Kurang</b>	<b>Kurang</b>	

lanjutan

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
g.	Jawaban terhadap disintegrasi	Kepentingan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng bukan hanya sektor pariwisata, permasalahan yang lain diantaranya permukiman, infrastruktur, dan degradasi lingkungan. Dengan kerja sama daerah diharapkan dapat meredam konflik dan ego sektoral yang ada.	Koordinasi yang dilakukan telah meredam permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata di perbatasan administratif.	Kedua kabupaten merasa bahwa kerja sama daerah dapat meredam konflik atau permasalahan di perbatasan administratif
		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	

Sumber: Hasil analisis penulis, 2010

#### **4.2 Analisis Kebijakan-kebijakan yang Telah Dilakukan dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Analisis kebijakan dilakukan dengan melihat kebijakan-kebijakan pihak yang terlibat dalam kerja sama daerah dan dengan mengidentifikasi dukungan pihak yang terlibat dan hambatan-bambatan yang terjadi dalam kerjama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Analisis dengan melihat dokumen-dokumen perencanaan yang ada, Surat Perjanjian Kerja Sama Antar daerah, notulen rapat-rapat koordinasi serta wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kerja sama daerah.

##### **4.2.1 Analisis Kebijakan Kabupaten Wonosobo dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Kebijakan kerja sama antar daerah telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Wonosobo tahun 2004 dimana disebutkan melalui lembaga kerja sama antar daerah dalam wilayah perbatasan memungkinkan koordinasi dalam upaya pengoptimalan pengembangan potensi wilayah perbatasan. Mengingat kepentingan yang terjalin tersebut, maka harus ada pranata pembangunan yang dapat mewujudkan dan mewedahi secara optimal kepentingan kedua belah pihak. Pranata yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kelembagaan yang secara eksplisit dapat mengelola permasalahan yang terjadi pada tata ruang pertemuan antar wilayah (wilayah perbatasan). Persinggungan antar wilayah sebagai akibat dari terjadinya titik temu aktivitas di wilayah-wilayah perbatasan memerlukan kerja sama antar daerah. Mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi pola kerja sama hendaknya melihat dari perspektif bidang yang dikerja samakan, lembaga yang terlibat baik dari sektor privat (swasta/masyarakat) maupun publik (pemerintah daerah), perangkat aturan yang disepakati sebagai pegangan atas visi yang hendak dituju. Selengkapnya bentuk bentuk dari kelembagaan antar daerah ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama antar wilayah yang berbatasan, dengan tujuan kemajuan bersama. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam konteks ini dapat memprioritaskan lembaga kerja sama ini diimplementasikan pada kawasan perkotaan di perbatasan dengan daerah

kabupaten atau kota terdekat. Kabupaten Wonosobo, perbatasan dengan Batang, Kendal, Temanggung, Purworejo, Kebumen, dan Banjarnegara.

Untuk Kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo dikarenakan RIPP Kabupaten Wonosobo belum ada. Strategi pengembangan kegiatan ekonomi sektor pariwisata yaitu:

- a. Mengembangkan objek wisata yang memiliki potensi yang tinggi, sebagai upaya menarik wisatawan lebih banyak lagi untuk berkunjung ke Kabupaten Wonosobo.
- b. Menyediakan fasilitas pendukung pariwisata yang memadai.
- c. Melakukan promosi objek wisata dan kerja sama dengan agen perjalanan.
- d. Melakukan pembinaan dan kerja sama wisata melalui berbagai lembaga sebagai upaya pelestarian budaya dan peningkatan sektor pariwisata.

Kebijakan kerja sama antar daerah antara kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara dimulai tahun 1974 tentang pembinaan objek-objek wisata di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Setelah melalui jatuh bangun komitmen, kerja sama disempurnakan dengan adanya Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo Nomor 485 Tahun 2002 dan nomor 17 tahun 2002 tentang Kerja sama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng dengan melibatkan seluruh dinas–dinas terkait di kedua kabupaten tersebut. Penyempurnaan kerja sama tersebut meliputi beberapa bidang antara lain: (1) Pariwisata dan Kebudayaan; (2) Konservasi Alam dan Cagar Budaya; (3) Sarana dan Prasarana; (4) Pertanahan; (5) Pemberdayaan Masyarakat; (6) Keamanan; (7) Pendanaan. Dalam perkembangannya kerja sama yang ada belum menghasilkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan. Kerja sama yang dilakukan hanya bersifat koordinasi lintas wilayah. Kerja sama yang masih berjalan adalah pengadaan dan penjualan tiket terusan bersama 4 (empat) objek wisata di kawasan poros. Organisasi kerja sama yang pernah ada tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Optimalisasi keberhasilan kerja sama ditentukan oleh dukungan komitmen pimpinan daerah. Komitmen pimpinan daerah didasari pemahaman bersama terhadap keuntungan yang didapat bagi masing-masing daerah ketika

menjalankan sebuah kerja sama antar daerah. Komitmen pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo sebenarnya cukup mendukung. Hal ini dibuktikan dengan adanya terus-menerus kesepakatan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Akan tetapi dalam tataran pelaksanaan wujud komitmen tersebut menjadi kurang. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk kerja sama antar daerah pada tahun 2009. Untuk pendanaan di tahun-tahun mendatang dimungkinkan juga tidak ada karena alokasi pendanaan di daerah banyak tersita oleh adanya pemilihan kepala daerah yang membutuhkan biaya yang besar. Komitmen pimpinan daerah dalam kerja sama daerah hanya diteruskan kepada SKPD yang berkepentingan untuk melakukan koordinasi lintas wilayah. Hal ini berdasarkan informasi oleh Setyo Nugroho dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa :

”...penganggaran kerja sama daerah tahun 2009 tidak ada, dan kemungkinan untuk tahun-tahun mendatang juga tidak ada dikarenakan anggaran tersita untuk pilkada tahun 2010...” (RP01/DUH2/1/3)

Untuk sektor kerja sama yang dilakukan pada saat ini adalah sektor pariwisata. Belum ada identifikasi kebutuhan, hanya ada telaah *mapping* potensi daerah sektor pariwisata yang telah dilaksanakan. Padahal isu dan permasalahan Kawasan Dieng bukan hanya pariwisata, akan tetapi adanya kerusakan ekosistem karena kegiatan pertanian berlebihan. Kegiatan budidaya pertanian dan permukiman telah merambah kawasan hutan lindung. Sekitar 7.758 hektare (4.758 hektare di Banjarnegara dan 3.000 hektare di Wonosobo) sudah menjadi tanah kritis. Peningkatan kebutuhan lahan tersebut telah mendorong konversi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya. Untuk itu diperlukan pengintegrasian penanganan masalah hutan, lahan dan lingkungan antar kabupaten di kawasan Dieng maupun dalam lingkup DAS Serayu. Inisiatif pemulihan kawasan dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Non Government Organization (NGO), masyarakat, dan donor internasional dengan bentuk Program Pemulihan Dieng (PPD).

Kebutuhan isu kerja sama antar daerah telah sejalan dengan sistem perencanaan daerah yang sudah ada antara lain RTRW dan RPJM Kabupaten. Akan tetapi untuk kerja sama antar daerah pada sektor pariwisata dengan

Kabupaten Banjarnegara pada kawasan Dieng tidak tercantum dalam sistem perencanaan daerah. Hal ini dikarenakan karena tidak ada kelembagaan pada kerja sama tersebut. Adanya perbedaan wadah koordinasi, dimana kabupaten Wonosobo ditempatkan pada kawasan strategis yang membutuhkan kerja sama antar daerah dengan Purworejo dan Temanggung (Purwomanggung) dan perbedaan pada wadah Badan Koordinasi Pembangunan Lintas (Bakorlin) Wilayah menjadikan kerja sama daerah pengelolaan Dieng belum secara jelas tercantum dalam sistem perencanaan daerah.

Kerja sama daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pungutan karcis masuk terusan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng hanya melibatkan pemerintah baik provinsi dan kabupaten. Akan tetapi dalam evaluasi pelaksanaan perjanjian melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada. Ini bisa dibuktikan adanya identifikasi permasalahan implementasi karcis terusan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng pada tahun 2007 yang dihadiri dari semua *stakeholders*. Baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, unsur masyarakat yang diwakili Forum Pengembangan Pariwisata Kawasan Dieng (FPPKD), dan dari institusi pendidikan yang diwakili oleh Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Dalam koordinasi lintas wilayah dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata selalu melibatkan semua *stakeholders*. Misalnya pada rapat-rapat persiapan menghadapi lebaran dan liburan sekolah dimana ada lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat dimana terdapat kelompok-kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan LSM Peduli Dieng selalu dilibatkan. Hal ini berdasarkan informasi oleh Setyo Nugroho dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa :

”... koordinasi yang dilakukan dalam rangka kerja sama daerah selalu melibatkan semua stakeholder dari birokrasi sampai masyarakat, LSM dan kelompok sadar wisata selalu ikut dalam rapat-rapat koordinasi...” (RP01/DUH2/2/2)

Kelembagaan kerja sama yang ada sekarang tidak berjalan dan tidak ada. Hanya masih ada papan nama Sekretariat Bersama Pengelolaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng di Gedung Suharto Whitlam di kompleks Candi Arjuna. Akan tetapi struktur organisasi, kegiatan sudah tidak ada. Pengelolaan dan

pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dilakukan oleh masing-masing kabupaten dengan membentuk UPTD. Untuk kabupaten Wonosobo membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Garung di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo. UPTD ini bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penelitian, pengkajian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.



Sumber : Dokumentasi penulis, 2009

### GAMBAR 4.3 FOTO PAPAN NAMA SEKBER PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata andil provinsi sangat besar. Provinsi Jawa Tengah telah membangun objek buatan yaitu Dieng *Plateau Theatre* (DPT) di Kabupaten Wonosobo yang menelan biaya dua milyar rupiah. selain itu perbaikan infrastruktur kawasan Dieng. Dalam proses inisiatif, pelaksanaan sampai dengan evaluasi peran Provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan sebagai *champion* atau aktor penggerak kerja sama antar daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Dalam kerja sama pengembangan kepariwisataan di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, inisiatif berawal dari Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Dalam

pelaksanaan kerja sama tiket masuk terusan kawasan poros, pihak provinsi sebagai pencetak karcis masuk. Dan pada tahap evaluasi kerja sama daerah, Provinsi Jawa Tengah selalu ikut dan duduk bersama dalam melakukan evaluasi dan mencari solusi permasalahan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari rapat-rapat yang menyangkut kerja sama pariwisata Dieng.

Kabupaten Wonosobo menyadari tidak optimalnya kerja sama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dengan Kabupaten Banjarnegara. Tidak optimalnya kerja sama ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pengembangan pariwisata dan kerja sama daerah. Hambatan itu diantaranya adalah masalah potensi wisata di Dataran Tinggi Dieng. Wonosobo hanya memiliki 2 (dua) objek menarik di Kawasan poros yang dikerja samakan, akan tetapi ada permasalahan pada objek Telaga Warna karena kewenangan pengelolaan masih dalam persoalan apakah dikelola daerah atau BKSDA. Karena objek ini menjadi salah satu objek yang dikerjasamakan, maka keberlanjutan kerja sama menjadi terancam dengan adanya permasalahan tersebut. Pada saat ini pengelolaannya masih dilakukan oleh daerah dengan bagi hasil dengan BKSDA. Hambatan yang lain yaitu tidak adanya alokasi dana untuk program kerja sama daerah. Dalam RPJM Daerah pagu anggaran untuk lima tahun dalam program kemitraan dengan daerah/kota lain dalam agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya 10 juta rupiah. Kelembagaan kerja sama yang telah ada yaitu berbentuk Sekretariat Bersama tidak optimal karena pengelolaan masih sendiri-sendiri. Sekber tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata karena awal terbentuknya hanya didasari keinginan mempunyai badan yang profesional. Sedangkan Badan profesional pada akhirnya tidak terbentuk karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua kabupaten. Kepentingan itu antara lain potensi yang berimplikasi pada persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hambatan yang lain ketidakjelasan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah menyangkut pengembangan destinasi pariwisata. Setelah dibangun Dieng *Plateau Theatre* dimana didalamnya terdapat pertunjukan bioskop yang materinya berupa informasi peristiwa alam Dieng kemudian membangun destinasi wisata buatan lain yaitu Museum Kailasa di Kabupaten Banjarnegara dimana di dalamnya menyimpan arca-arca purbakala dan

teater yang memutar film dokumenter tentang Dieng. Dengan adanya destinasi buatan yang sama di satu kawasan menjadikan ego memajukan destinasi masing-masing menjadi muncul dan menghambat kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di Dataran Tinggi Dieng.

#### **4.2.2 Analisis Kebijakan Kabupaten Banjarnegara dalam Kerja sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Di dalam RTRW Kabupaten Banjarnegara tahun 2003, wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan segala keunggulannya dan kelemahannya sangat memungkinkan untuk melaksanakan kerja sama (baik secara formal maupun tidak formal) dengan berbagai pemerintah kabupaten, terutama kabupaten di sekitar, yakni Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kab. Banyumas, Kabupaten Purbalingga. Adapun bidang atau sektor yang dijadikan objek kerja sama tersebut adalah terlihat dalam Tabel 4.5 berikut ini :

**TABEL IV.5  
MATRIK KERJA SAMA LINTAS KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Kabupaten	Bidang/Sektor Kerja sama
1.	Pekalongan	Transportasi, perdagangan, kehutanan, pariwisata
2.	Wonosobo	Transportasi, Kehutanan, Pariwisata
3.	Kebumen	Transportasi, Kehutanan, Pariwisata
4.	Purbalingga	Transportasi, Kehutanan, Pariwisata
5.	Banyumas	Transportasi, perdagangan, Pariwisata, pengembangan sumber daya manusia

*Sumber : RTRW Kab. Banjarnegara tahun 2003*

Pada saat sekarang Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kelembagaan kerja sama Daerah Regional Manager (RM) Barlingmascakeb. Suatu manajemen kerja sama antar daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja sama pembangunan di 5 (lima) kabupaten. RPJM Kabupaten Banjarnegara sudah disesuaikan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, utamanya

kebijakan pembangunan wilayah terpadu Barlingmascakeb. Selain Barlingmascakep, Kabupaten Banjarnegara juga masuk pada forum koordinasi/komunikasi Bakorlin III. Yang termasuk dalam Bakorlin III yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Dengan adanya Bakorlin ini, Kabupaten Banjarnegara mendapat manfaat sebagai forum untuk tukar-menukar pengalaman di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai forum untuk pemecahan permasalahan pembangunan yang lintas kabupaten baik masalah pendidikan, kesehatan, sarana transportasi maupun lingkungan.

Secara umum wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi alamnya ditunjang dengan kondisi sosial budaya tradisional potensial sebagai objek kunjungan wisata. Potensi-potensi objek wisata tersebut adalah:

- a. Kawasan Dieng sebagai wisata alam dan wisata budaya
- b. Desa Klampok sebagai binaan berupa kerajinan keramik
- c. Kawasan waduk Panglima Besar Soedirman sebagai wisata air

Paling tidak ada 2 (dua) hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan objek kunjungan wisata yaitu:

1. Adanya dinamika atau perubahan-perubahan baik tatanan maupun jenis atraksi sebagai penunjangnya
2. Pelayanan khususnya pelayanan kebersihan dan kerapian kawasan objek kunjungan

Dalam kebijakan Kabupaten Banjarnegara, kawasan Dieng dalam perkembangannya diperlukan upaya-upaya:

- 1) Menilai potensi-potensi yang layak sebagai objek atau atraksi wisata saat ini dan pengembangannya di masa mendatang yang sesuai dengan selera pasar dan wisatawan sasaran
- 2) Menentukan situasi pariwisata yang diinginkan atau sesuai selera pasar, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai situasi tersebut.
- 3) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, dan Magelang untuk membangun jalur dan paket wisata terpadu

- 4) Menciptakan jalur Banjarnegara-Banjarmangu-karangkoobar-Pejawaran-Batur-Dieng atau Sigaluh-Madukara-Pagentan-Batur menjadi jalur yang menarik/menyenangkan dengan penentuan titik-titik objek penunjang dan kemudahan menikmati perjalanan.

Selain kebijakan yang tercantum dalam RTRW, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara tahun 2009 dalam programnya pengembangan sektor pariwisata memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Program ini antara lain dilaksanakan dengan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri, pemilihan duta wisata.

- b. Program pengembangan destinasi pariwisata

Program ini memuat pengembangan objek pariwisata unggulan, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.

- c. Program Pengembangan Kemitraan

Program pengembangan kemitraan dilaksanakan dengan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo dan Dinbudpar Jateng dalam pengelolaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng

Dengan melihat kebijakan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, baik dalam kebijakan kerja sama antar daerah maupun kebijakan pariwisata, sudah menyadari pentingnya kerja sama lintas kabupaten dalam pengembangan kepariwisataan. Selain itu, kebijakan yang ada mendukung adanya kerja sama dengan Kabupaten Wonosobo dalam sektor pariwisata khususnya pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

Dukungan komitmen pimpinan daerah Kabupaten Banjarnegara dalam kerja sama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng bisa dilihat dengan kemauan untuk terus merajut kerja sama dengan Kabupaten Wonosobo. Kerja sama yang dilakukan memang pernah mengalami pasang surut. Hal tersebut

timbul adanya bagi hasil pendapatan atas pengelolaan bersama. Pada akhirnya kerja sama yang dilaksanakan mengabaikan pendapatan bersama yang berarti pengelolaan oleh masing-masing kabupaten. Komitmen penganggaran pada akhirnya hanya dalam pengadaan tiket masuk terusan, dimana pendanaannya bersama dengan Kabupaten Wonosobo.

Identifikasi kebutuhan daerah terhadap objek yang akan dikerjakan samakan dengan Kabupaten Wonosobo belum ada. Untuk sektor pariwisata dikarenakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dilakukan oleh masing-masing kabupaten, maka kerja sama cukup hanya koordinasi lintas wilayah saja. Harapan Kabupaten Banjarnegara objek yang dikerjakan samakan tidak hanya pada sektor pariwisata. Sektor lingkungan, infrastruktur, dan pembangunan akses adalah beberapa sektor yang mungkin bisa menjadi objek kerja sama. Hal ini berdasarkan informasi oleh Ibnu Hasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara (2009), dari hasil wawancara bahwa :

”...Identifikasi kebutuhan daerah terhadap objek yang dikerjakan samakan belum ada. Harapan kami karena isu di Dieng bukan saja sektor pariwisata, sektor lain menjadi sektor yang bisa dikerjakan samakan. Contohnya Lingkungan, infrastruktur dan pembangunan akses...” (RP04/DUH2/2/1)

Isu kerja sama antar daerah sudah sinergis dan sejalan dengan sistem perencanaan daerah di Kabupaten Banjarnegara. RPJM Kabupaten Banjarnegara sudah disesuaikan dengan kerja sama yang dilakukan dalam Barlingmascakeb. Untuk kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan pariwisata di kawasan Dieng sudah masuk dalam RTRW dan Rencana Strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk pengintegrasian penganggaran Kabupaten Banjarnegara pada RPJM telah mengalokasikan dana satu milyar rupiah sebagai pagu anggaran 5 (lima) tahunan untuk program kerja sama lintas kabupaten. Akan tetapi alokasi ini untuk kerja sama antar daerah dengan kelembagaan Barlingmascakep. Untuk kerja sama wisata Dieng dengan Kabupaten Wonosobo belum ada penganggaran dikarenakan kelembagaan yang belum ada.

Kerja sama yang dilakukan dengan Kabupaten Wonosobo dipandang sudah partisipatif oleh Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dibuktikan dengan selalu melibatkan semua *stakeholder* dalam setiap rapat koordinasi pengembangan kawasan Dieng. Dari mulai pemerintah kabupaten, masyarakat yang diwakili

Pokdarwis, maupun dari LSM Peduli Pariwisata dan Lingkungan. Dengan adanya partisipatif ini ego kedaerahan pada tataran pelaksanaan pengelolaan di lapangan bisa diatasi. Dari pengarahan arus wisatawan, pengelolaan parkir, keamanan, kebersihan tidak pernah terjadi permasalahan. Permasalahan timbul lebih dikarenakan belum adanya perencanaan dan kebijakan yang tidak terpadu dan terintegrasi karena kawasan Dieng memang belum mempunyai Rencana Induk Pengembangan Kawasan yang terintegrasi.

Kelembagaan kerja sama dalam bentuk sekber sudah tidak ada walaupun papan nama masih terpasang pada Gedung Suharto Whitlem Komplek Candi Arjuna. Kabupaten Banjarnegara mengelola kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. UPT ini bertugas dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, melaksanakan kerja sama pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, memantau dan mengawasi pengelolaan/pemanfaatan bangunan dan fasilitas wisata dalam rangka pengontrolan kondisi fisik bangunan, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dan sarana kebersihan wisata, serta perlengkapannya untuk mewujudkan lingkungan wisata yang bersih, rapi, dan indah.

Kabupaten Banjarnegara merasakan andil yang besar dari Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan dan kerja sama pariwisata di Dataran Tinggi Dieng. Provinsi Jawa Tengah membangun Museum Kailasa di kawasan Dieng Kabupaten Banjarnegara. Museum didirikan di komplek Gedung Arca milik Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah, di seberang Candi Gatotkaca Dieng Banjarnegara. Museum yang diresmikan oleh Menbudpar tanggal 28 Juli 2008 ini berisi artefak dan cerita tentang geologi, flora-fauna, kehidupan sehari-hari, kepercayaan, serta kesenian Dieng. Selain itu, porsi terbesar adalah warisan arkeologis Dieng. Di kompleks museum terdapat juga restoran, toko cinderamata, mushola, dan gazebo. Dari gazebo dan restoran ini dapat dilihat keseluruhan Dataran Tinggi Dieng. Bagian atas atap museum digunakan sebagai panggung terbuka, sementara di dalam museum terdapat teater yang memutar film

dokumenter tentang Dieng. Selain itu Provinsi juga memberikan bantuan pendanaan dalam perbaikan dan pemeliharaan fasilitas di kompleks Candi Arjuna. Untuk kerja sama daerah kawasan Dieng, provinsi menjadi mediator dalam setiap koordinasi kerja sama dan mencetak karcis masuk terusan dalam kerja sama pungutan karcis masuk terusan Dieng.

Hambatan yang dirasakan oleh Kabupaten Banjarnegara dalam kerja sama pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran tinggi Dieng adalah kebijakan daerah yang menimbulkan ego daerah. Hal ini bisa dilihat dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Dieng yang kurang terpadu bahkan membuat ketidaknyamanan wisatawan. Kabupaten Wonosobo memungut karcis masuk di daerah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo yang banyak dikeluhkan oleh banyak wisatawan karena karcis masuk tersebut bukan masuk pada objek wisata akan tetapi karcis masuk pada akses ke kawasan Dieng dan melihat panorama pegunungan Dieng di sepanjang jalur akses. Karena kurang adanya informasi yang jelas dan memadai tentang pungutan karcis/retribusi ini wisatawan menjadi tidak nyaman karena pada setiap objek wisata di Dataran Tinggi Dieng dilakukan pungutan karcis masuk kembali. Pungutan Karcis masuk di daerah Garung ini kebanyakan hanya memungut kendaraan dari luar daerah karena memang akses jalur tersebut merupakan akses jalan umum. Untuk tidak berjalannya Sekber dikarenakan sektor yang dikerja samakan. Kabupaten Banjarnegara memandang untuk sektor pariwisata pada saat sekarang masih bisa ditangani dengan pengelolaan sendiri dengan perkembangan kawasan semakin baik. Memang diperlukan kerja sama akan tetapi masih bisa dilaksanakan dengan bersifat koordinatif saja untuk kegiatan-kegiatan yang insidental. Tidak adanya perencanaan yang terintegrasi juga menjadi hambatan dalam kerja sama. Untuk pariwisata tidak terintegrasinya perencanaan pariwisata antar 2 (dua) kabupaten menjadikan adanya dua kepentingan yang berbeda dan prioritas pengembangan menjadi berbeda. Hal ini berdasarkan informasi oleh Ibnu Hasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara (2009), dari hasil wawancara bahwa :

”....Wisatawan sering merasa tidak nyaman mengenai tiketing di Dieng. Salah satunya tiket yang ditarik di Garung Kabupaten Wonosobo. Karena tidak disertai penjelasan mereka merasa sudah membayar tiket untuk masuk kawasan Dieng. Padahal tiket tersebut hanya untuk melintasi akses menuju Dieng dengan

melintasi panorama Dieng di setiap objek masih ditarik tiket lagi....” (RP04/DUH3/1/2)

”... Harapan kami karena isu di Dieng bukan saja sektor pariwisata, sektor lain menjadi sektor yang bisa dikerja samakan. Contohnya Lingkungan, infrastruktur dan pembangunan akses...” (RP04/DUH2/2/1)

”...Hambatan lain adalah tidak terintegrasinya perencanaan di Dieng. Hal ini membuat adanya dua kepentingan yang berbeda dan prioritas pengembangan pariwisata” (RP04/DUH3/1/3)

#### **4.2.3 Analisis Kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Kerja sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Dalam Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang pada Kebijakan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, pembangunan daerah pada bidang ekonomi diprioritaskan pada bidang ekonomi yang meliputi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri kecil, menengah, dan koperasi yang didukung oleh sektor-sektor lainnya. Kawasan Dieng merupakan bagian dari koridor Semarang-Ambarawa-Wonosobo dengan pusat pengembangan di Semarang. Sedangkan dalam pengembangan perwilayahan berdasarkan prioritas Kawasan Dieng merupakan salah satu kawasan andalan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah,

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, guna mencapai optimalisasi sistem perkotaan wilayah, baik sistem antar kota maupun sistem pembangunan antara kota dengan daerah belakangnya, maka ditetapkan wilayah pembangunan yang ditujukan bagi upaya peningkatan keterkaitan antar wilayah ataupun antar daerah kabupaten/kota yang tergabung dalam satuan wilayah pembangunan. Berdasarkan pembagian Satuan Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo berada pada Wilayah Pembangunan VII dan termasuk pada kawasan Purwomanggung. Sedangkan Kabupaten Banjarnegara berada pada Wilayah Pembangunan VI dan Kabupaten Banjarnegara sebagai pusat dari Wilayah Pembangunan VI. Dalam sistem Perkotaan Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara masuk dalam Kawasan Barlingmascakeb dengan pusat kegiatan nasional berada di Purwokerto dan Banjarnegara sebagai pusat kegiatan lokal.

Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata Jawa Tengah mengacu pada konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata Jawa Tengah juga

menggunakan konsep *borderless* (pengembangan pariwisata tanpa batas) yaitu batas administrasi. Hal ini karena pengembangan suatu kawasan wisata tidak harus mengikuti garis batas administrasi. Bisa saja objek dan daya tarik wisata yang masuk dalam wilayah Jawa Tengah mempunyai keterkaitan dengan objek dan daya tarik wisata di provinsi yang bertetangga dengan Jawa Tengah, sehingga dalam pengembangannya harus dilakukan secara terpadu.

Pengembangan keruangan/kewilayahan pariwisata Jawa Tengah perlu memperhatikan beberapa aspek pokok berikut ini :

1. Pengembangan keterkaitan ke dalam dan keluar (*backward and outward linkages*)

Pengembangan kepariwisataan Jawa Tengah secara spasial agar memiliki keterkaitan keluar, yaitu mengembangkan jaringan keterkaitan dengan wilayah-wilayah provinsi disekitarnya, serta memiliki keterkaitan ke dalam, yaitu memunculkan pengembangan kawasan-kawasan unggulan pariwisata dan mendorong pengembangan kawasan-kawasan lain di sekitarnya.

2. Pengembangan pariwisata tanpa batas (*borderless tourism*)

Pengembangan pariwisata, khususnya pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi hanya pada teritori tertentu atau dibatasi secara administratif, tetapi perlu mempertimbangkan konteks regional dalam mengaitkan produk-produk yang dikembangkan dan membangun semangat kerja sama secara sinergis dengan Provinsi lain, untuk membangun daya tarik kolektif yang lebih kuat dalam menarik arus kunjungan wisatawan.

Strategi yang diterapkan dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya mengembangkan kepariwisataan Jawa Tengah dalam konteks regional terpadu dengan rencana-rencana implemantasi program pengembangan yang mencakup pengembangan jaring-jaring kunjungan wisatawan melalui kerja sama pengembangan produk wisata terpadu dalam bentuk perencanaan paket-paket wisata regional, dimana terdapat pengembangan paket wisata alam dan budaya Dieng Plateau (Pemalang-Dieng, Batang-Dieng, Semarang-Sukorejo-Dieng), kerja sama pengembangan jalur dan koridor wisata terpadu, yang mencakup didalamnya pengembangan fasilitas akomodasi dan penunjang wisata, simpul-

simpul transit serta infrastruktur di sepanjang jalur dan koridor utama wisata, kerja sama di sepanjang jalur dan koridor utama wisata, kerja sama pengembangan pemasaran produk wisata secara terpadu.

Dalam implementasi di lapangan khususnya pada pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan pendanaan dalam pembangunan daya tarik wisata dan perbaikan serta pemeliharaan fasilitas objek wisata. Pembangunan objek wisata buatan Dieng *Plateau Theatre*, Museum Kailasa, Renovasi kompleks candi Arjuna, Pembangunan Tourism Information Center (TIC) wujud dari kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan kepariwisataan. Dalam kerja sama Daerah Provinsi Jawa Tengah selalu terlibat dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Dalam kerja sama yang masih berlangsung yaitu kerja sama pungutan karcis masuk terusan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, pihak Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Karcis Masuk Terusan dan selalu terlibat dalam evaluasi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan rapat-rapat identifikasi permasalahan implementasi karcis terusan, keterlibatan *Focus Group Discussion* (FGD) evaluasi pelaksanaan uji coba tiket terusan pada tahun 2007. Pembahasan Evaluasi karcis terusan pada tahun 2008 dan sampai sekarang sebagai pihak pencetak dan desain karcis terusan. Hal ini berdasarkan informasi oleh Raharja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (2010), dari hasil wawancara bahwa:

“Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan pendanaan dalam pembangunan daya tarik wisata dan perbaikan serta pemeliharaan fasilitas objek wisata. Pembangunan objek wisata buatan Dieng *Plateau Theatre*, Museum Kailasa, Renovasi kompleks candi Arjuna, Pembangunan Tourism Information Center (TIC) wujud dari kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan kepariwisataan...”  
(RP07/DUH/1/1)

**TABEL IV.6**  
**SINTESA ANALISIS GAP/KESENJANGAN KEBIJAKAN DAERAH DAN DUKUNGAN DAN HAMBATAN KERJA SAMA**  
**ANTAR DAERAH KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
A	<b>Kebijakan Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama antar daerah tertuang dalam RTRW tahun 2003 dan RPJM</li> <li>• Masuk dalam kerja sama regional Barlingmascakeb</li> <li>• Kerja sama masuk dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• Kontinue melakukan kerja sama antar daerah</li> <li>• Pengelolaan oleh SKPD yaitu Dinas Pariwisata kabupaten dengan membentuk UPTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama antar daerah tertuang dalam RTRW tahun 2004 dan RPJM</li> <li>• Kontinue melakukan kesepakatan kerja sama antar daerah</li> <li>• Pengelolaan oleh SKPD yaitu Dinas Pariwisata kabupaten dengan membentuk UPTD</li> </ul>	
		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
B	<b>Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kerja sama daerah</b>			
a.	Dukungan pimpinan daerah	Dukungan bisa dilihat dengan kemauan untuk terus merajut kerja sama dengan Kabupaten Wonosobo.	Cukup mendukung dalam hal adanya terus menerus format legal kerja sama akan tetapi di tataran pelaksanaan menjadi kurang karena tidak ada alokasi dana untuk kerja sama antar daerah	Dukungan masing-masing pimpinan daerah cukup karena masih mempunyai kemauan dalam bekerja sama akan tetapi tidak mengalokasikan penganggaran dalam kerja sama daerah
		<b>Cukup</b>	<b>Cukup</b>	

lanjutan

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
b.	Identifikasi kebutuhan daerah	belum ada identifikasi kebutuhan daerah terhadap sektor yang dikerja samakan. Harapannya bukan sektor pariwisata saja yang dikerja samakan	sektor kerja sama hanya pariwisata belum ada identifikasi kebutuhan daerah pada kawasan Dieng	Identifikasi sektor yang dikerja samakan belum ada walaupun ada permasalahan sektor lain. Pariwisata menjadi sektor kerja sama karena kerja sama daerah ini sudah ada sejak dahulu
		<b>Kurang</b>	<b>Kurang</b>	
c.	Sinergis terhadap sistem perencanaan daerah	Sudah sinergis dan sejalan dengan sistem perencanaan daerah karena sudah masuk dalam RTRW dan Renstra	Telah sejalan dengan RTRW dan RPJM akan tetapi karena kerja sama kawasan Dieng tidak ada kelembagaan, sehingga belum secara jelas tercantum dalam sistem perencanaan daerah	Kedua kabupaten sudah mensinergiskan isu kerja sama daerah dalam sistem perencanaan daerah akan tetapi masih belum spesifik kerja sama daerah kawasann Dieng
		<b>Baik</b>	<b>Cukup</b>	
d.	Partisipatif	Dipandang sudah partisipatif dalam setiap rapat koordinasi pengembangan Dieng melibatkan pemerintah kabupaten, masyarakat, LSM.	Dalam evaluasi dan rapat-rapat koordinasi kerja sama daerah melibatkan seluruh <i>stakeholders</i> yang ada	Dalam koordinasi kerja sama daerah telah melibatkan semua <i>stakeholders</i>
		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
e.	Model kelembagaan	Kelembagaan kerja sama sudah tidak ada. Pengelolaan dan pengembangan di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dengan membentuk UPTD	kelembagaan kerja sama tidak berjalan dan tidak ada. Pengelolaan dan pengembangan kawasan Dieng dilakukan oleh masing-masing kabupaten dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Pengelolaan dan pengembangan kawasan Dieng dilakukan oleh masing-masing kabupaten dengan membentuk UPTD
		<b>Kurang</b>	<b>Kurang</b>	

lanjutan

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
f.	<i>Champion</i> (aktor penggerak)	Provinsi Jawa Tengah menjadi mediator dalam setiap koordinasi kerja sama dan sebagai pihak yang mendesain dan mencetak karcis masuk terusan Dieng selain itu berperan dalam pengembangan destinasi wisata	Dalam proses inisiatif, pelaksanaan sampai dengan evaluasi peran Provinsi Jawa Tengah sebagai champion dalam pengembangan pariwisata dan kerja sama daerah	Provinsi Jawa Tengah sebagai aktor penggerak pengembangan pariwisata dan kerja sama daerah pariwisata kawasan Dieng
		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
<b>C</b>	<b>Hambatan</b>			
a.	Ego daerah	Kebijakan yang kurang terpadu yang membuat ketidaknyamanan wisatawan misalnya pungutan karcis di Garung untuk melihat panorama Dieng di sepanjang akses ke Dieng	perencanaan yang tidak terpadu menjadikan ego daerah untuk memajukan destinasi wisata masing-masing contoh pembangunan museum Kailasa Banjarnegara yang didalamnya memuat teater yang sama dengan di Dieng Platatau Theatre (DPT) Wonosobo	Ego daerah masih ada terutama dalam kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten
b.	Identifikasi kebutuhan kerja sama	sektor pariwisata masih bisa ditangani dengan pengelolaan sendiri dan perkembangan kawasan semakin baik	-	
c.	Potensi wisata dan kewenangan pengelolaan	-	Kabupaten Wonosobo mengalokasikan 2 (dua) objek wisata dalam kerja sama daerah akan tetapi masih mempunyai permasalahan dalam kewenangan pengelolaan dengan BKSDA.	

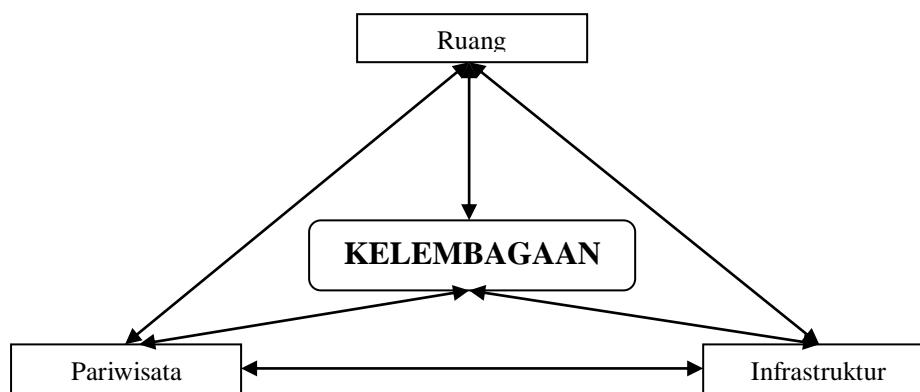
lanjutan

No.	Aspek Analisis	Kondisi		Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	
d.	Alokasi Dana	Ada alokasi dana program kerja sama daerah tapi bukan kerja sama Dieng dengan Kabupaten Wonosobo	Tidak ada alokasi dana program kerja sama daerah	Alokasi dana untuk kerja sama daerah kawasan Dieng sangat minim
e.	Perbedaan kepentingan	Tidak adanya perencanaan yang terintegrasi menjadikan kepentingan dan prioritas pengembangan yang berbeda antara masing-masing pemerintah kabupaten	Badan profesional tidak terbentuk karena ada perbedaan kepentingan antara lain potensi dan kepentingan meningkatkan PAD masing-masing kabupaten	Masing-masing kabupaten menjalankan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Dieng sesuai kepentingan daerah masing-masing

Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

### 4.3 Analisis Format Kelembagaan Kerja sama Daerah dari Kajian Pustaka dan Best Practice

Kawasan wisata Dieng terletak diantara dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, namun wilayah yang akan terkena dampak dari pengembangan kawasan adalah beberapa kabupaten lain yang mempunyai aksesibilitas langsung menuju Dieng yaitu Kabupaten Batang dan Pekalongan. Oleh karenanya, disusun keterpaduan antar kabupaten maupun antar sektor melalui kerja sama daerah dalam segala bidang. Untuk kawasan Dieng dengan melihat potensi dan permasalahan yang ada perlu adanya kerja sama bidang khususnya dalam upaya pengembangan kegiatan pariwisata, pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan pertanian, serta pengembangan infrastruktur. Konsep kelembagaan kegiatan dominan kawasan Dieng bisa digambarkan dalam bagan dibawah ini :



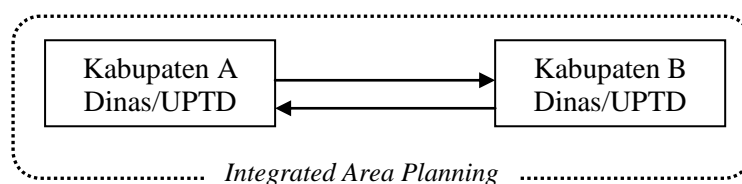
Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

**GAMBAR 4.4**  
**KONSEP KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KEGIATAN DOMINAN**  
**DI KAWASAN DIENG**

Menurut Keban (2009) dibutuhkan model “*integrated area planning*” untuk dapat mengurangi berbagai konflik antar wilayah administratif, yaitu dengan mengefektifkan pembangunan sektor-sektor tertentu dan institusi yang berhubungan dengan sektor tersebut dalam suatu area (dengan mengesampingkan batas-batas wilayah administratifnya). Kerena struktur yang menangani adalah struktur yang

formal yang dibentuk sesuai unit-unit politik dan administratif yang ada, seperti dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis masing-masing kabupaten/kota atau provinsi kurang mendapat dukungan otoritas formal, yang berarti sulit diimplementasikan dan sulit berhasil. Jalan keluar yang bisa ditawarkan dalam “*integrated area planning*” adalah membuat struktur kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ditempatkan di area yang bersangkutan, atau juga dibuat oleh pemerintah lokal atau perusahaan swasta yang diberi status khusus. Konsep format kelembagaan untuk keterpaduan suatu area dengan model “*integrated area planning*” bisa kita bagi menjadi 4 (empat) format yang akan digambarkan dalam bagan di bawah ini:

1. Koordinasi antar pemerintah kabupaten melalui dinas dengan membentuk lembaga teknis misal UPTD

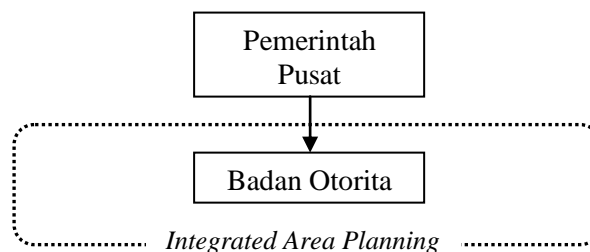


Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

#### **GAMBAR 4.5** **KONSEP KELEMBAGAAN KOORDINASI** **ANTAR PEMERINTAH DAERAH**

Format kelembagaan sulit diimplementasikan dan sulit berhasil karena adanya hambatan dalam struktur organisasi dan kurang mendapat dukungan otoritas formal.

2. Pemerintah pusat dengan membentuk badan otorita

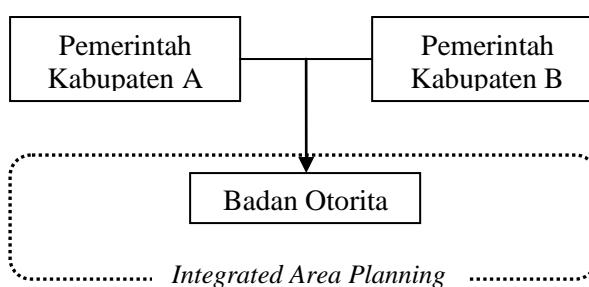


Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

#### **GAMBAR 4.6** **KONSEP KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN** **MEMBENTUK BADAN OTORITA**

Format yang kedua tidak sejalan dengan otonomi daerah. Dimana adanya pelimpahan kewenangan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya untuk kesejahteraan rakyat.

3. Antar pemerintah kabupaten dengan membentuk badan otorita

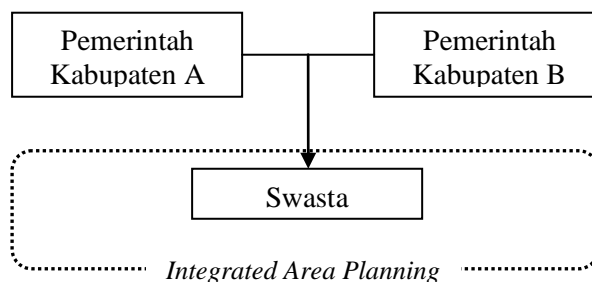


Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

**GAMBAR 4.7**  
**KONSEP KELEMBAGAAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH**  
**KABUPATEN DENGAN MEMBENTUK BADAN OTORITA**

Format ketiga adalah berbentuk badan otoritas jika mengacu pada Taylor dalam Tarigan (2009) termasuk dalam model *Jointly-formed authorities* (Pembentukan otoritas bersama) atau Sekretariat Bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan, dan tanggung jawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan dari pemda-pemda yang terkait. Badan ini bisa diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang diurusnya, termasuk biasanya otonom secara politis.

## 4. Swasta yang diberi status khusus



Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

**GAMBAR 4.8**  
**KONSEP KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SWASTA**

Format keempat, daerah mendelegasikan kewenangan penuh swasta untuk mengelola suatu kawasan. Model ini bisa berbentuk badan usaha dengan tidak mungkin dengan menggandeng investor.

Berdasarkan kajian bentuk-bentuk kelembagaan kerja sama antar daerah dari *best practice* yang ada perlu adanya analisis mengenai aspek struktur organisasi, sistem prosedur pengambilan keputusan, kewenangan, pembiayaan, sumber daya manusia, ruang lingkup program untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing format kelembagaan. Perbandingan bentuk kelembagaan dari *best practice* dapat dilihat dalam Tabel IV.7.

**TABEL IV.7**  
**PERBANDINGAN BENTUK KELEMBAGAAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH**

No	Aspek	Bentuk Lembaga		
		Regional Management	Sekretariat Bersama	Badan Kerja sama Antar Daerah
1	Struktur Organisasi	Forum Regional (FR) sebagai komisisaris dan merupakan struktur tertinggi yang berperan dalam pengambilan kebijakan terdiri dari unsur pimpinan kepala daerah.	Dewan Pengarah merupakan struktur tertinggi sebagai pengambil kebijakan dan pengimplementasiannya dilaksanakan oleh seorang Direktur beserta struktur bawahnya	Forum merupakan struktur tertinggi sebagai pengambil kebijakan yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, dan pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh coordinator beserta

## lanjutan

No	Aspek	Bentuk Lembaga		
		Regional Management	Sekretariat Bersama	Badan Kerja sama Antar Daerah
		Dewan Eksekutif (DE) penterjemah kebijakan FR menjadi kebijakan strategis yang akan diimplementasikan oleh Regional Manager (RM)		sub sekretariat dibawahnya
	Positif	Legitimasi terhadap kesepakatan bersama tinggi	Legitimasi terhadap kesepakatan bersama tinggi	Legitimasi terhadap kesepakatan bersama tinggi
	Negatif	Terlalu panjang apabila tujuan yang diinginkan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi	Potensi inisiatif dari bawah menjadi rendah sangat besar	Potensi inisiatif dari bawah menjadi rendah sangat besar
2	Sistem Prosedur Pengambilan Keputusan	DE menterjemahkan kebijakan FR menjadi kebijakan strategis dan kemudian dilaksanakan oleh Regional Manager (RM)	Sekda tiap daerah menyetujui atau menolak usulan yang dirumuskan oleh tim teknis berdasarkan sektor masing-masing yang dikoordinasikan oleh direktur Sekber. Pelaksanaan dijalankan oleh masing-masing SKPD melalui monitoring direktur dan unit dibawahnya	Forum merumuskan kebijakan berdasarkan pertemuan yang difasilitasi oleh koordinator BKAD dan melalui meminta persetujuan DPRD, kemudian hasil keputusan dilaksanakan oleh koordinator dan SKPD yang terkait
	Positif	Terjamin konsistensi antara perencanaan daerah dengan lembaga kerja sama	Terjamin konsistensi antara perencanaan daerah dengan lembaga kerja sama	Terjamin konsistensi antara perencanaan daerah dengan lembaga kerja sama
	Negatif	Pada kondisi yang memerlukan sebuah respon yang cepat menjadi tidak taktis, efisien, dan efektif	Pada kondisi yang memerlukan sebuah respon yang cepat menjadi tidak taktis, efisien, dan efektif	Pada kondisi yang memerlukan sebuah respon yang cepat menjadi tidak taktis, efisien, dan efektif
3	Kewenangan	Menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh FR dan DE	Mengkoordinasikan serta memfasilitasi perencanaan, sinkronisasi program	Mengkoordinasikan serta memfasilitasi perencanaan yang telah dianggarkan melalui SKPD

No	Aspek	Bentuk Lembaga		
		Regional Management	Sekretariat Bersama	Badan Kerja sama Antar Daerah
	Positif	Potensi percepatan pembangunan wilayah, dikarenakan rencana/kebijakan yang dirumuskan berbeda/berdiri sendiri dengan program SKPD pada umumnya	Terminimalisir adanya inefisiensi/program yang sama antara sektor di wilayah satu dengan yang lain terhadap program yang akan dilaksanakan	Terminimalisir adanya inefisiensi/program yang sama antara sektor di wilayah satu dengan yang lain terhadap program yang akan dilaksanakan
	Negatif	1. Bergantung pada kebijakan yang dirumuskan, kalau rumusan kebijakan tidak <i>progress</i> hasilnya pun akan lambat dan sebaliknya 2. Berpotensi tumpang tindih terhadap program di SKPD	Berpotensi pada lambatnya <i>progress</i> pengembangan terhadap suatu wilayah	Berpotensi pada lambatnya <i>progress</i> pengembangan terhadap suatu wilayah
4	Pembiayaan	1. Bersumber dari APBD pada pos Hibah dan pos masing-masing SKPD 2. Bersumber dari lembaga/pihak ketiga	1. Bersumber dari APBD berdasarkan pos hibah, pos kegiatan di SKPD terkait 2. Bersumber dari lembaga/pihak ketiga	1. Bersumber dari APBD berdasarkan pos hibah, pos kegiatan di SKPD terkait 2. Bersumber dari lembaga/pihak ketiga
	Positif	Mendukung implementasi program dan berjalannya kelembagaan secara baik	Mendukung implementasi program dan berjalannya kelembagaan secara baik	Mendukung implementasi program dan berjalannya kelembagaan secara baik
	Negatif	Berpotensi terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD lebih dikarenakan regulasi terkait pembiayaan KSAD secara spesifik belum tersedia	Berpotensi terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD lebih dikarenakan regulasi terkait pembiayaan KSAD secara spesifik belum tersedia	Berpotensi terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD lebih dikarenakan regulasi terkait pembiayaan KSAD secara spesifik belum tersedia

## lanjutan

No	Aspek	Bentuk Lembaga		
		Regional Management	Sekretariat Bersama	Badan Kerja sama Antar Daerah
5	Sumber Daya Manusia	Pada level kebijakan SDM bersumber dari PNS, pada level pelaksana harian dan koordinasi bersumber dari tenaga professional/swasta dan PNS	Pada level kebijakan SDM bersumber dari PNS, pada level pelaksana harian dan koordinasi bersumber dari tenaga professional/swasta	Pada level kebijakan SDM bersumber dari PNS, pada level pelaksana harian dan koordinasi bersumber dari PNS
	Positif	Lebih dinamis dan progresif antara perencanaan dan pengimplementasian	Stabil, karena pelaksana harian adalah tenaga profesional menjadikan lebih fokus tidak terbebani dengan tanggung jawab tupoksi yang melekat di setiap sektor	Tidak banyak perubahan pada budaya kerja serta komunikasi kerja sehingga memudahkan di dalam melaksanakan koordinasi
	Negatif	Kalau kewenangannya terbatas dan tidak mendukung percepatan, berakibat pada lambat serta menurunnya kinerja staf professional	Disesuaikan kewenangannya, kalau kewenangannya kecil sekedar menjalankan fungsi koordinasi, tenaga profesional yang tersedia menjadi tidak efisien	Lambat dikarenakan beban kerja lain yang berpotensi melekat pada staf dikarenakan statusnya PNS
6	Ruang lingkup program	Penekanan pada sektor pengembangan ekonomi wilayah	Penekanan pada sektor penyelenggaraan pelayanan publik (transportasi, lingkungan, pendidikan, kesehatan dsb)	Penekanan pada sektor penyelenggaraan pelayanan publik (transportasi, lingkungan, pendidikan, kesehatan dsb)
	Positif	Sejalan dengan prioritas pembangunan di wilayahnya yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi	Menjadi pendukung dalam pembangunan wilayah yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi selaras dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Menjadi pendukung dalam pembangunan wilayah yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi selaras dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
	Negatif	Percepatan pengembangan ekonomi wilayah yang terjadi berpotensi tidak diimbangi oleh penyelenggaraan pelayanan publik dasar lainnya	Berpotensi tidak fokus pada pelaksanaan penyelenggaraannya dikarenakan banyaknya urusan pelayanan dasar yang melekat dan menjadi kewajiban pada pemerintah daerah	Berpotensi tidak fokus pada pelaksanaan penyelenggaraannya dikarenakan banyaknya urusan pelayanan dasar yang melekat dan menjadi kewajiban pada pemerintah daerah

Sumber: Hasil analisis penulis, 2010

Dari ketiga format kelembagaan kerja sama antar daerah, kesemuanya masih dapat diterapkan dalam kerja sama dalam kawasan Dieng. Hal ini karena ketiga format kelembagaan di atas merupakan suatu badan otorita yang diberi kewenangan untuk mengembangkan potensi bagi peningkatan ekonomi yang dibentuk oleh beberapa pemerintah kabupaten.

Selain itu penting untuk menganalisis badan pengembangan pariwisata yang profesional dan telah berhasil yaitu Bali *Tourism Development Corporation* (BTDC). BTDC sebuah badan usaha yang diberi kewenangan untuk mengelola suatu kawasan yang gersang yang tidak menjanjikan secara ekonomis menjadi menarik di Bali. Badan Usaha BTDC dalam proses perjalanan dan perkembangannya kini telah berhasil mengukir prestasi yang patut dibanggakan sebagai hasil dari kerja keras, ketekunan, kejujuran, serta konsekuen dan konsisten dalam mematuhi semua aturan dan konsep pembangunan yang telah digariskan. Dalam mengelola dan mengembangkan Nusa Dua menerapkan kebijakan lingkungan berkelanjutan.

#### **4.4 Analisis Peran yang Telah Dilakukan dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten**

Analisis peran dilakukan dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen perencanaan yang ada, surat perjanjian kerja sama antar daerah dan notulen rapat-rapat koordinasi dan wawancara dengan pemerintah kedua kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah.

##### **4.4.1 Analisis peran Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Analisis peran kabupaten dalam kerja sama antar daerah bisa dilihat dalam keberpihakan atau komitmen kepala daerah terhadap isu kerja sama antar daerah, pengalokasian sumber daya daerah yang dimiliki terhadap kebutuhan daerah atas kerja sama, format kelembagaan yang disiapkan pemerintah kabupaten.

a. Keberpihakan atau Komitmen Kepala Daerah

Komitmen pemerintah kabupaten dalam kerja sama antar daerah jika dilihat dari sejarah kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan naik turun. Hal ini dikarenakan perubahan kepemimpinan dimana pemahaman tentang kerja sama daerah tidak sama. Akan tetapi dari adanya perjanjian kerja sama daerah yang masih berlangsung sampai tahun 2012 dapat membuktikan masih adanya keinginan yang kuat dalam pengembangan pariwisata di Dieng harus dilakukan dengan kerja sama daerah. Perubahan kerja sama yang jelas terlihat adalah perubahan pembagian pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya pengelolaan berjalan sendiri-sendiri. Perubahan bagi hasil pendapatan tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

- Pada tahun 1984 pembagian hasil 60% untuk Kabupaten Banjarnegara dan 40% untuk Kabupaten Wonosobo.
- Tahun 1992 Dalam kerja sama tersebut disepakati adanya perubahan bagi hasil. Adapun pembagian hasil yang disepakati Biaya Operasional 20% sisa diasumsi 100%, kemudian diambil untuk bagian Purbakala 5% dan Perhutani 5%, selanjutnya sisa diasumsi 100% kemudian dibagi dengan proporsi 60% untuk Kabupaten Banjarnegara dan 40% untuk Kabupaten Wonosobo.
- Pada tahun 1995 adanya perubahan bagi hasil Biaya Operasional 20% sisa diasumsi 100% kemudian diambil untuk bagian Purbakala 5% dan Perhutani 5%, selanjutnya sisa diasumsi 100% kemudian dibagi 55% untuk Kabupaten Banjarnegara dan 45% untuk Kabupaten Wonosobo.
- Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo sepakat mengelola sendiri-sendiri ODTW di masing-masing daerah administrasi mereka dan mengabaikan bagi hasil pendapatan.
- Tahun 2007 kedua kabupaten menyepakati kerja sama pungutan karcis terusan untuk 4 (empat) objek wisata di Kawasan Poros dengan pembagian pendapatan dari karcis masuk terusan masing-masing sebesar 50% (persen).

Turunnya komitmen dalam pembagian pendapatan dikarenakan perubahan paradigma pembangunan. Sebelum reformasi pada tahun 1998 dimana semua kebijakan dari pusat maka kebijakan pengelolaan sudah ditentukan oleh

pusat dan daerah mematuhi. Akan tetapi seiring perubahan paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi dengan adanya otonomi daerah, dimana kewenangan pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi diserahkan kepada daerah maka daerah merasa mampu untuk mengembangkan potensi yang ada. Pembagian pendapatan dinilai tidak adil karena perbedaan potensi yang ada di kawasan wisata Dieng dengan proporsi bagi hasil. Perasaan kemampuan mempunyai potensi ini menimbulkan ego kedaerahan tanpa memahami bahwa pariwisata tidak terbatas batas administratif. Permasalahan bagi hasil ini telah diterjemahkan untuk mengelola objek wisata sendiri-sendiri dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa memahami dengan pengelolaan bersama akan tercapai integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pariwisata yang mendukung lingkungan di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Terjadi efisiensi dalam pendanaan dan kemungkinan memperoleh sumber pendanaan yang lain. misalnya pendanaan dalam promosi wisata bersama, pembangunan infrastruktur, dan kemudahan koordinasi. Pengelolaan sendiri mengakibatkan perlombaan dalam pengembangan potensi dengan mengabaikan keintegrasian kawasan. yang pada akhirnya terjadi benturan kepentingan.

#### b. Alokasi Sumber Daya Daerah

Walaupun pengelolaan dilakukan sendiri-sendiri, kedua kabupaten masih mempunyai keinginan dan kemauan untuk melaksanakan kerja sama. Hal ini terlihat dalam pengalokasian sumber daya daerah yang dimiliki dalam suatu perjanjian kerja sama. Pada kerja sama tiket masuk terusan yang masih berlangsung, masing-masing kabupaten mengalokasikan potensi wisata yaitu telaga warna/pengilon, Dieng Plateau Theater di Kabupaten Wonosobo dan Kawah sikidang, kompleks Candi Arjuna di Kabupaten Banjarnegara. Dengan adanya karcis terusan ini pengelolaan dan pengembangan Kawasan wisata Dieng telah mengarah kepada satu manajemen kembali. Pada rumusan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 26 Juli 2007 yang dihadiri pihak kedua pemerintah kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah bersepakat untuk menambah jumlah objek dan daya tarik wisata yang akan dikerja samakan. Pada saat ini objek yang dikerja samakan masih tetap 4 (empat) objek. Untuk Objek Telaga Warna kewenangan pengelolaan masih dilaksanakan antara Kabupaten

Wonosobo dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dikarenakan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1994 tentang pengusaha pariwisata alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pengalokasian potensi telaga warna/pengilon dan pembangunannya harus sejjin dan berkoordinasi dengan BKSDA. Kewenangan BKSDA dalam pengelolaan bisa dilihat dalam perjanjian kerja sama antara BKSDA dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon sebagai Pendukung Dieng *Plateau Theater*.

c. Format Kelembagaan

Format Kelembagaan kerja sama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng juga mengalami pasang surut. Dari sejarah pengelolaan, beberapa dokumen kerja sama dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan *stakeholder* lainnya dalam rangka pengembangan kepariwisataan kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dapat diketahui bahwa sudah banyak alternatif model pengelolaan yang sudah dilakukan namun, dalam implementasinya banyak mengalami kendala yang mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam upaya pengembangan kepariwisataan. Format Kelembagaan yang pernah dilakukan yaitu:

- a. Pada Tahun 1995 dibentuk Badan Pembina dan Badan Pengelola Harian. Untuk sumber daya manusia dari unsur PNS Provinsi Jawa Tengah dan kedua kabupaten.
- b. Pada Tahun 2002 bentuk kerja sama pengelolaan dan pengembangan kawasan Dataran Tinggi Dieng berupa forum. Sumber daya manusia dari unsur PNS di kedua kabupaten.
- c. Pada Tahun 2005 bentuk format kelembagaan Sekretariat Bersama. Sekretariat bersama bertugas untuk membentuk Badan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dan Badan Pengelolaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Unsur SDM dari pihak Provinsi Jawa Tengah dan Kedua Kabupaten.

Kerja sama pada tahun 2005 ditindaklanjuti dengan mencari model format kelembagaan oleh stakeholders yang berkepentingan dalam kerja sama

kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Rapat koordinasi yang pernah dilakukan dalam mencari format kelembagaan antara lain :

- Rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 18 November 2005 di Dieng tentang peningkatan kerja sama pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tanggal 30 November 2005 di Losari, Grabag Kabupaten Magelang tentang alternatif model pembentukan badan pengembang dan badan pengelola Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Rapat koordinasi tim kecil antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tanggal 10 Desember 2005 tentang mencari model alternatif kerja sama.
- Rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tanggal 12 Desember 2005 di Tambi, Kabupaten Wonosobo tentang model pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

Beberapa model kelembagaan sebelum Sekretariat Bersama tidak berjalan dikarenakan banyak kendala yang mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam upaya pengembangan kepariwisataan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Ketidakefektifan dan efisien tersebut disebabkan oleh masih lemahnya kompetensi SDM yang mengelola, manajemen yang relatif masih sederhana dan kurang adanya keterlibatan asosiasi, swasta, dan masyarakat yang berada di kawasan wisata Dieng, serta masih munculnya ego sektoral di antara *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Dieng. Hal berdasarkan informasi oleh Setyo Nugroho dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa:

“...Pada umumnya bentuk kelembagaan tidak berjalan karena beberapa faktor kendala antara lain lemahnya kompetensi SDM yang mengelola, manajemen yang relatif masih sederhana dan kurang adanya keterlibatan asosiasi, swasta dan masyarakat yang berada di kawasan wisata Dieng serta masih munculnya ego sektoral di antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Dieng...” (RP01/FOR1/2/3)

Sekretariat Bersama Pengelolaan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng tidak berjalan mempunyai banyak permasalahan diantaranya tidak mempunyai tujuan yang dapat menjaga keberlangsungan kelembagaan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Tugas Sekretariat Bersama hanya mempersiapkan badan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, menetapkan objek yang dikerja samakan, menyusun konsep-konsep kelembagaan kerja sama daerah. Ketika model pengelolaan belum disepakati maka peran sekber ini menjadi bias dan hanya bersifat koordinatif. Koordinasi lintas kabupaten dipandang oleh kedua kabupaten tidak harus melalui suatu kelembagaan karena hanya bersifat insidentil. Kabupaten Banjarnegara memandang Sekber yang ada kurang sesuai sebagai format kelembagaan kerana kawasan yang dikerja samakan terlalu kecil dan sektor terbatas pada pariwisata. Harus ada identifikasi kembali sektor-sektor yang akan dikerja samakan. Untuk Badan pengelolaan dan pengembangan Kawasan wisata yang profesional dari investasi pihak ketiga, Kabupaten Banjarnegara memandang bahwa itu baik akan tetapi untuk mendapatkan investasi dari pihak swasta bukanlah hal yang mudah, memerlukan proses yang panjang dan membutuhkan waktu. Oleh karenanya untuk sementara masih bisa dikelola dan dikembangkan oleh masing-masing kabupaten dan merasa PAD yang di dapat dari pariwisata di Dataran Tinggi Dieng setiap tahunnya sudah memenuhi target.

Menurut Kabupaten Wonosobo kelembagaan Sekber tidak efektif karena pengelolaan masih sendiri-sendiri. Format yang diinginkan berupa suatu Badan Usaha bisa berupa Badan Usaha Miliki Daerah maupun Badan Swasta yang mengelola kawasan dengan saham yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten dan pembagian hasil disesuaikan dengan saham atau sumber daya daerah yang dipunyai. Dengan adanya Badan Usaha ini kewenangan kawasan wisata dikelola oleh Badan Usaha Tersebut. Hal ini berdasarkan informasi oleh Rully E.B dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo (2009), dari hasil wawancara bahwa :

“...Format kelembagaan yang sesuai ..... adalah semacam badan usaha bisa berupa Badan Usaha Miliki Daerah maupun Badan Swasta yang mengelola kawasan dengan saham yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten dan pembagian hasil disesuaikan dengan saham atau sumber daya daerah yang dipunyai...” (RP02/FOR2/1/1)

#### 4.4.2 Analisis peran Provinsi Jawa Tengah dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng

Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi kesepakatan kerja sama antara Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo dalam kerja sama pengembangan kepariwisataan di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng pada tahun 2005. Pihak provinsi memfasilitasi dengan rapat koordinasi tanggal 16 September 2004 untuk membahas naskah rancangan kesepakatan bersama. Pada tanggal 16 Maret 2006 Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi rapat pembahasan draf perjanjian kerja sama uji coba pelaksanaan pungutan karcis terusan kawasan wisata Dataran tinggi Dieng. Dalam kerja sama pungutan karcis masuk terusan kawasan poros Dieng ini, provinsi sebagai pihak yang mencetak dan desain karcis terusan walaupun pembiayaan dilakukan oleh *sharing* dana kedua kabupaten. Program pembangunan bagi kerja sama daerah yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah antara lain adanya alokasi anggaran untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Pembangunan Museum Kailasa dan Dieng *Plateau Theater* adalah salah satu contohnya. Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas di objek wisata, penataan lahan parkir. Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru) Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana untuk membangun polder dan drainase di kawasan wisata.

Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pada sektor pariwisata di Kawasan Dieng oleh Provinsi Jawa Tengah diantaranya dengan memfasilitasi *Bisnis Development Center* bagi forum klaster pariwisata Dieng, mengembangkan SDM pelaku pariwisata dengan melakukan studi banding ke kawasan pengembangan pariwisata yang dipandang berhasil, meningkatkan ketrampilan masyarakat yang tergabung dalam forum klaster pariwisata Dieng untuk bisa membuat barang-barang souvenir yang bisa dijual kepada wisatawan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan, memfasilitasi kelompok-kelompok Sadar Wisata di Kawasan Dieng. Dalam perencanaan kawasan, provinsi membuat Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan *Feasibility Study* (FS) untuk kawasan Dieng. Hal ini berdasarkan informasi oleh Raharja dari Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (2010), dari hasil wawancara bahwa :

“Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pada sektor pariwisata di Kawasan Dieng oleh Provinsi Jawa Tengah diantaranya dengan memfasilitasi *Bisnis Development Center* bagi forum klaster pariwisata Dieng, mengembangkan SDM pelaku pariwisata dengan melakukan study banding ke kawasan pengembangan pariwisata yang dipandang berhasil, meningkatkan ketrampilan masyarakat yang tergabung dalam forum klaster pariwisata Dieng untuk bisa membuat barang-barang souvenir yang bisa dijual kepada wisatawan, memfasilitasi kelompok-kelompok Sadar Wisata di Kawasan Dieng” (RP07/FOR1/1/1)

Supervisi kerja sama antar daerah yang dilakukan antara Provinsi Jawa Tengah dilakukan antara lain dengan rapat-rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) uji coba karcis terusan. Dengan rapat koordinasi ini pungutan karcis terusan yang dimulai dari bulan Oktober tahun 2006 sampai Juni 2007 bisa diperpanjang sampai dengan Desember 2012. Untuk peran Sekretariat Bersama yang tidak berjalan, pihak Provinsi Jawa Tengah memandang bahwa Sekretariat Bersama hanya sebagai kepanjangan tangan 2 (dua) wilayah dengan fokus pada sektor pariwisata. Kelembagaan ini tidak efektif karena hanya berfungsi koordinatif dan embrio adanya Badan Pengelola dan pengembang profesional. Dikarenakan konsep badan pengelola dan pengembang belum disepakati maka kegiatan pada Sekretariat Bersama menjadi tidak berjalan.

Kelembagaan yang diinginkan adalah suatu badan yang profesional dan terpadu. Badan ini mempunyai otoritas untuk mengelola dan mengembangkan kawasan. Tidak hanya memungut karcis retribusi akan tetapi mampu mengelola, memelihara, dan mengembangkan daya tarik pariwisata di Kawasan Dieng. Dalam hal pendanaan awal bisa dilakukan dengan *sharing*, personil bisa dari kalangan PNS dan juga swasta. Bentuk lembaga patungan dari 2 (dua) Kabupaten bisa berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama atau semi swasta sehingga Kawasan Dieng bisa ditangani lebih baik. Dengan manajemennya yang jelas, penganggaran, kinerja dan pertanggungjawaban yang jelas diharapkan pengembangan kawasan Dieng menjadi optimal, terpadu, dan komprehensif. Tentunya badan ini harus didukung dengan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah masing-masing kabupaten. Pemerintah kabupaten mendukung dalam pembangunan infrastruktur dan promosi pariwisata.

#### **4.5 Rumusan Format Kelembagaan dalam Kerja Sama Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**

Dari kajian pustaka dan *best practice* beberapa format kelembagaan dapat diterapkan dalam kelembagaan di Kawasan Dieng yaitu :

1. Kerja sama antar daerah dengan membentuk badan otorita dimana di dalam *best practice* bisa berupa *Regional Management* (RM), Sekretariat Bersama (Sekber), dan Badan Kerja sama Antar Daerah (BKAD).
2. Kerja sama antar daerah dengan membentuk badan usaha (swasta) dimana salah satu yang berhasil adalah BTDC Nusa Dua.

Untuk mencari rumusan format kelembagaan yang sesuai untuk kawasan Dieng perlu adanya analisis kesenjangan antara format kelembagaan yang sesuai dengan kajian pustaka dan *best practice* dengan analisis peran yang telah dilakukan pemerintah dalam kerja sama daerah di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang bisa dilihat dalam Tabel IV.8.

**TABEL IV.8**  
**SINTESA ANALISIS GAP/KESENJANGAN FORMAT KELEMBAGAAN KAJIAN PUSTAKA DAN BEST PRACTICE**  
**DENGAN PERAN PEMERINTAH DALAM KERJA SAMA ANTAR DAERAH**  
**KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

No.	Format Kelembagaan Kajian Pustaka dan <i>Best Practice</i>	Peran yang telah dilakukan			Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	Provinsi Jateng	
1.	Kelembagaan kerja sama yang membuat keterpaduan antar kabupaten dan antar sektor dengan kegiatan dominan kawasan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Infrastruktur</li> </ul>	Tahun 2002 melakukan kerja sama pengelolaan dan pengembangan kawasan Dataran Tinggi Dieng dengan bentuk forum meliputi bidang pariwisata, lingkungan, sarana prasarana, pertanahan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, pendanaan dengan jangka waktu 5 tahun	Tahun 2002 melakukan kerja sama pengelolaan dan pengembangan kawasan Dataran Tinggi Dieng dengan bentuk forum meliputi bidang pariwisata, lingkungan, sarana prasarana, pertanahan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, pendanaan dengan jangka waktu 5 tahun	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sampai 5 tahun kerja sama berakhir diperbaharui dengan kerja sama tahun 2005</li> <li>• Tidak berjalan karena lemahnya kompetensi SDM, manajemen yang sederhana, kurang adanya keterlibatan asosiasi, swasta, masyarakat dan ego kedaerahan.</li> </ul>
2.	Koordinasi antar pemerintah kabupaten melalui dinas dengan membentuk lembaga teknis misal UPTD	Perjanjian sampai tahun 2012 adalah pungutan tiket terusan dan kerja sama hanya bersifat koordinatif antar instansi dengan membentuk UPTD masing-masing	Perjanjian sampai tahun 2012 adalah pungutan tiket terusan dan kerja sama hanya bersifat koordinatif antar instansi dengan membentuk UPTD masing-masing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah</li> <li>• Provinsi memfasilitasi kesepakatan kerja sama</li> <li>• sebagai desain dan pencetak karcis masuk terusan</li> <li>• Melakukan program pembangunan untuk meningkatkan daya tarik wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulit diimplementasikan dan sulit berhasil dalam mencapai keterpaduan kawasan</li> <li>• Kebijakan daerah dijalankan oleh pemerintah kabupaten dengan kepentingan masing-masing.</li> </ul>

lanjutan

No.	Format Kelembagaan Kajian Pustaka dan <i>Best Practice</i>	Peran yang telah dilakukan			Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	Provinsi Jateng	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penguatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama daerah</li> </ul>	
3.	Pemerintah pusat dengan membentuk badan otorita	Kabupaten Banjarnegara dan BP3 mengelola situs purbakala candi di Dieng	Kabupaten Wonosobo dan BKSDA mengelola objek Telaga warna	Provinsi Jateng dan BKSDA bekerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Telaga Warna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sesuai dengan otonomi daerah</li> <li>• Keterwakilan pemerintah pusat harus masuk dalam kelembagaan kerja sama</li> </ul>
4.	Antar pemerintah kabupaten dengan membentuk badan otorita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2005 dengan Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jateng membentuk Sekber dengan nama Sekber Pengelolaan Kawasan Dataran Tinggi Dieng</li> <li>• Format kelembagaan Sekber kurang sesuai karena kawasan yang dikerja samakan terlalu kecil dan sektor terbatas pada pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2005 dengan Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jateng membentuk Sekber dengan nama Sekber Pengelolaan Kawasan Dataran Tinggi Dieng</li> <li>• Sekber tidak efektif karena pengelolaan masih sendiri-sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2005 dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara membentuk Sekber dengan nama Sekber Pengelolaan Kawasan Dataran Tinggi Dieng</li> <li>• Sekber hanya kepanjangan tangan dengan fokus pariwisata</li> <li>• Kelembagaan hanya berfungsi koordinatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekber Tidak Berjalan</li> <li>• Tidak mempunyai tujuan dan struktur organisasi yang jelas</li> <li>• Hanya sebagai embrio badan profesional pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan badan ini tidak tersepakati</li> <li>• Kelembagaan hanya berfungsi koordinatif dan pengelolaan masih sendiri-sendiri</li> <li>• Bidang terbatas pada pariwisata</li> </ul>

lanjutan

No.	Format Kelembagaan Kajian Pustaka dan <i>Best Practice</i>	Peran yang telah dilakukan			Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	Provinsi Jateng	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regional Management</li> </ul>				Kurang sesuai dengan Kawasan Dieng karena ruang lingkup program pada pengembangan ekonomi wilayah tidak pada sektor penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu kawasan tertentu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Bersama</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan kerja sama kawasan Dieng karena sektor pada penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>Sebagai badan koordinasi lintas kabupaten dengan sektor pelayanan publik yang dominan</li> <li>Tenaga profesional menjadi tidak efisien jika hanya menjadi fungsi koordinasi</li> <li>Kurang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata karena berpotensi tidak fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan dan <i>conflict of interest</i></li> </ul>

lanjutan

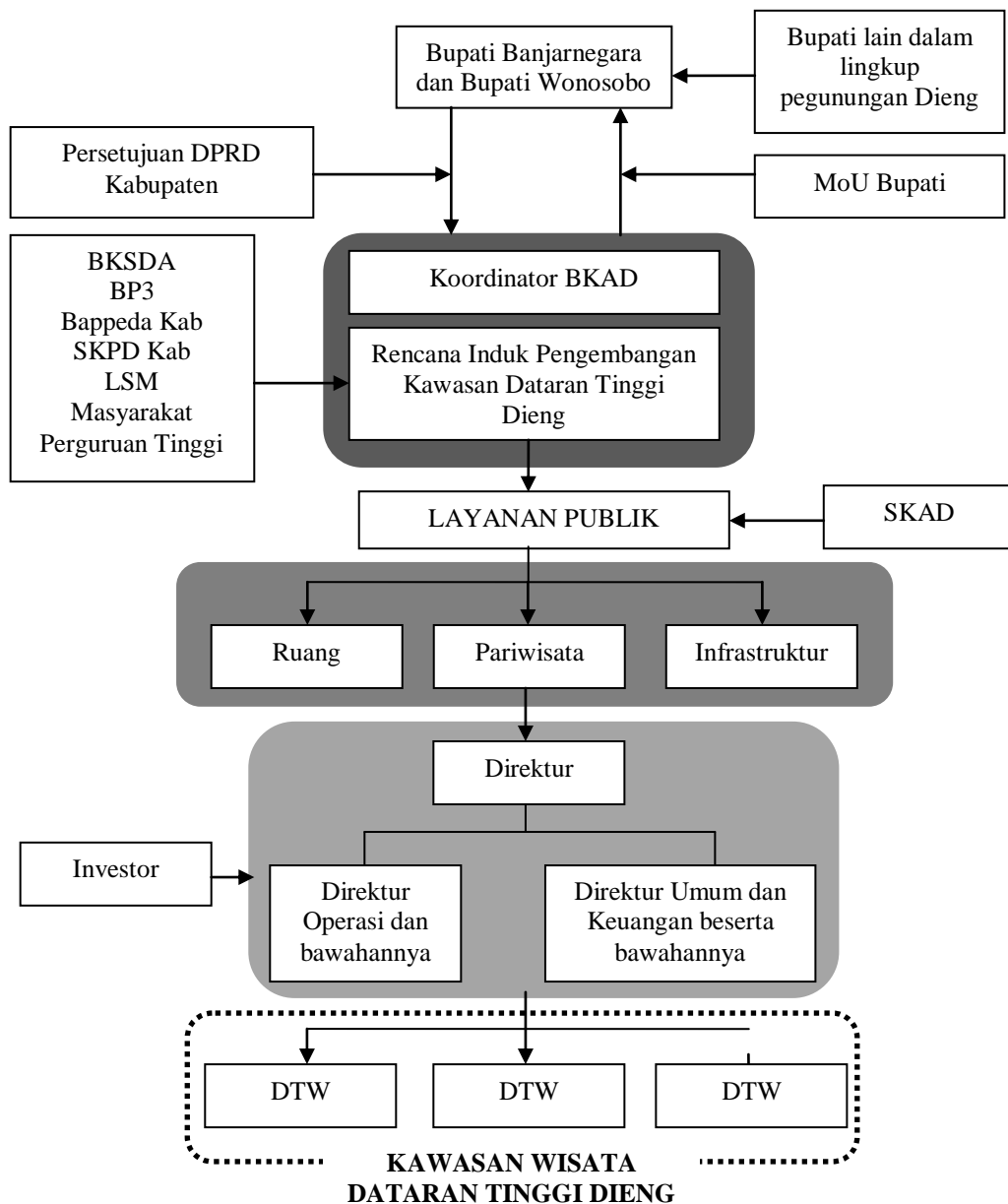
No.	Format Kelembagaan Kajian Pustaka dan <i>Best Practice</i>	Peran yang telah dilakukan			Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	Provinsi Jateng	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kerja sama Antar Daerah</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan PP No 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah</li> <li>• Sesuai dengan kerja sama kawasan Dieng karena sektor pada penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>• Sebagai badan koordinasi lintas kabupaten dengan sektor pelayanan publik yang dominan</li> <li>• Sesuai dengan kawasan Dieng karena tidak banyak perubahan pada budaya kerja serta komunikasi kerja karena pernah melakukan kerja sama daerah</li> <li>• Kurang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata karena berpotensi tidak fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan dan <i>conflict of interest</i></li> </ul>

lanjutan

No.	Format Kelembagaan Kajian Pustaka dan <i>Best Practice</i>	Peran yang telah dilakukan			Analisis
		Kab. Banjarnegara	Kab. Wonosobo	Provinsi Jateng	
5.	Swasta yang diberi status khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baik tetapi untuk mendapatkan investasi dari pihak swasta bukan hal yang mudah, memerlukan proses panjang, dan membutuhkan waktu</li> <li>PAD dengan pengelolaan sendiri saat ini sudah memenuhi target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginginkan pengelolaan dan pengembangan kawasan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan swasta</li> <li>Pembagian hasil disesuaikan dengan saham atau sumber daya daerah yang dimiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan profesional dengan bentuk BUMD bersama atau semi swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata karena fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan dan tidak terjadi <i>conflict of interest</i> pengelolaan kawasan.</li> <li>untuk mendapatkan investasi dari pihak swasta bukan hal yang mudah, memerlukan proses panjang, dan membutuhkan waktu.</li> <li>Apabila berwujud BUMD harus ada kesiapan anggaran kedua pemerintah kabupaten.</li> </ul>

Sumber: Hasil analisis penulis, 2010

Dari sintesa analisis diatas dapat diketahui untuk kelembagaan yang sesuai pada kawasan Dieng adalah Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD). Untuk lembaga yang mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata adalah badan profesional yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bentuk Badan koordinasi kawasan Dieng dan badan pengelola dan pengembangan profesional pariwisata Dieng bisa dilihat pada Gambar 4.9 di bawah ini :



Sumber : Hasil analisis penulis, 2010

**GAMBAR 4.9**  
**KELEMBAGAAN KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) sebagai badan koordinasi mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelayanan publik kawasan dengan sektor kegiatan yang dominan yaitu ruang, pariwisata, dan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi wilayah dengan aspek-aspek pelestarian kawasan. Badan koordinasi ini tidak menutup kemungkinan beranggotakan bukan hanya Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara akan tetapi juga Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan dimana mempunyai aksesibilitas langsung ke kawasan Dieng. Tugas dan fungsi BKAD sebagai berikut :

- 1) Badan Kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD.
- 2) Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.

Kewenangan BKAD adalah mengkoordinasikan daerah-daerah anggota di dalam melakukan perencanaan program kegiatan bersama. Sumber pembiayaan dari APBD dan lembaga/pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Personil atau sumber daya manusia pada level kebijakan bersumber dari PNS, pada level pelaksana harian dan koordinasi bersumber dari PNS. Peran Provinsi dalam Badan kerja sama daerah ini melakukan supervisi untuk memastikan bahwa kerja sama daerah otonom berada dalam koridor perundangan yang ada.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pariwisata Dieng mengelola dan mengembangkan kawasan sesuai dengan perencanaan terpadu yang dilakukan oleh badan koordinasi. BUMD untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan mencapai tujuan pengembangan pariwisata. Pengelolaan dan pengembangan tidak dapat dipisahkan karena pengembangan suatu daerah tujuan wisata adalah menawarkan produk wisatanya dan pelayanan yang diberikan oleh pengelola. Badan usaha ini bertujuan untuk menyelenggarakan tersedianya prasarana dan sarana, mengundang investor untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pariwisata, mengelola operasional objek-objek wisata, memelihara kawasan, serta mendorong penciptaan kualitas layanan prima kepada wisatawan dengan mengembangkan kebijakan pariwisata dan lingkungan berkelanjutan. Sumber pembiayaan dari APBD dan lembaga/pihak ketiga berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku. Personil atau sumber daya manusia dari profesional di bidang pariwisata.

#### 4.6 Temuan Studi

Setelah dilakukan analisis dukungan dan hambatan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng dan format kelembagaan, melalui beberapa aspek, maka diperoleh temuan studi sebagai berikut:

1. Kedua kabupaten telah mengerti penting dan manfaatnya kerja sama daerah dan perlunya kerja sama daerah pada kawasan yang mempunyai kepentingan sama yang terletak di perbatasan administratif. Untuk pengembangan pariwisata di kawasan di perbatasan, telah memahami pariwisata dengan pendekatan *borderless tourism*.
2. Kerja sama daerah kawasan Dataran Tinggi Dieng antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo didorong oleh beberapa faktor yaitu : potensi dan keterbatasan daerah, kemauan, dan kesamaan kepentingan, peluang perolehan sumber dana, wadah komunikasi *stakeholders*, adanya format-format legal kerja sama, dan jawaban terhadap disintegrasi.
3. Kerja sama daerah yang ada hanya bersifat koordinatif apabila ada *event* atau ketika waktu kunjungan wisatawan meningkat seperti lebaran atau musim libur sekolah. Koordinasi dilakukan oleh semua stakeholders dengan melibatkan masyarakat. Kerja sama daerah yang ada mengarah pada satu kawasan satu manajemen dengan adanya kerja sama pungutan karcis masuk terusan kawasan Dieng. Pengelolaan dan pengembangan kawasan Dieng dilakukan oleh masing-masing kabupaten dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten.
4. Dukungan Kabupaten Banjarnegara cukup pada tataran kebijakan dan kurang pada penganggaran dan pemahaman perlunya kelembagaan dalam kerja sama daerah sedangkan dukungan Kabupaten Wonosobo kurang pada tataran kebijakan, penganggaran, dan pemahaman perlunya kelembagaan dalam kerja sama daerah.
5. Hambatan kerja sama daerah menurut Kabupaten Banjarnegara adalah ego daerah, perbedaan kepentingan, dan belum adanya identifikasi kebutuhan

sektor yang dikerja samakan sedangkan hambatan kerja sama daerah yang dirasakan Kabupaten Wonosobo adalah ego daerah, potensi wisata dan kewenangan pengelolaan, alokasi dana, dan perbedaan kepentingan.

6. Kelembagaan yang ada tidak berjalan. Kabupaten Wonosobo menginginkan pengelolaan bersama dengan investasi swasta sedangkan Kabupaten Banjarnegara menyambut baik badan pengelolaan bersama akan tetapi sebelumnya harus ada identifikasi kebutuhan sektor yang dikerja samakan mengingat untuk mendapatkan investasi tidak mudah.
7. Format kelembagaan yang sesuai pada kawasan Dataran Tinggi Dieng nantinya adalah Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) sebagai badan koordinasi untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelayanan publik kawasan pada sektor ruang, pariwisata, dan infrastruktur. Kelembagaan pada sektor pariwisata adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama untuk mengelola dan mengembangkan kawasan sesuai dengan perencanaan terpadu yang dilakukan oleh badan koordinasi.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan ini merupakan jawaban dan penjabaran dari sasaran studi yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil survei di lapangan dan wawancara, kemudian dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kedua kabupaten telah mengerti penting dan manfaatnya kerja sama daerah dan perlunya kerja sama daerah pada kawasan yang mempunyai kepentingan sama yang terletak di perbatasan administratif. Untuk pengembangan pariwisata di kawasan di perbatasan, telah memahami pariwisata dengan pendekatan *borderless tourism*.
2. Dukungan Kabupaten Banjarnegara cukup pada tataran kebijakan dan kurang pada penganggaran dan pemahaman perlunya kelembagaan dalam kerja sama daerah sedangkan dukungan Kabupaten Wonosobo kurang pada tataran kebijakan, penganggaran, dan pemahaman perlunya kelembagaan dalam kerja sama daerah.
3. Hambatan kerja sama daerah menurut Kabupaten Banjarnegara adalah ego daerah, perbedaan kepentingan, dan belum adanya identifikasi kebutuhan sektor yang dikerja samakan sedangkan hambatan kerja sama daerah yang dirasakan Kabupaten Wonosobo adalah ego daerah, potensi wisata dan kewenangan pengelolaan, alokasi dana, dan perbedaan kepentingan.
4. Rumusan format kelembagaan yang sesuai pada kawasan Dataran Tinggi Dieng nantinya adalah Badan Kerja sama Antar Daerah (BKAD) sebagai badan koordinasi untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelayanan publik kawasan pada sektor ruang, pariwisata, dan infrastruktur dan kelembagaan pada sektor pariwisata adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama untuk mengelola dan mengembangkan kawasan sesuai dengan perencanaan terpadu yang dilakukan oleh badan koordinasi.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, beberapa rekomendasi yang dirumuskan sebagai arahan dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng adalah:

1. Peningkatan dukungan di masing-masing kabupaten baik dari kebijakan maupun penganggaran.
2. Perlu adanya Rencana Induk Pengembangan Kawasan Wisata Dieng yang terpadu dan terintegrasi.
3. Melakukan identifikasi sektor kerja sama melalui Skenario Kerja sama Antar Daerah (SKAD) guna memberikan gambaran tentang visi bersama yang dilakukan melalui proses partisipatif yang sistematis diantara para aktor dan *stakeholder* terkait dikarenakan kepentingan pada kawasan Dieng bukan hanya pariwisata akan tetapi sektor permukiman, infrastruktur, dan permasalahan degradasi lingkungan.
4. Hal yang perlu mendapat perhatian untuk melakukan kolaborasi antara *stakeholder* dalam badan kerja sama daerah, yaitu :
  - Perlu adanya pelibatan *stakeholder* yang lebih komprehensif.
  - Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi setiap personil yang terlibat dalam badan kerja sama daerah.
  - Peningkatan keterlibatan asosiasi, swasta, masyarakat.
  - Masing-masing pihak (*stakeholder*) harus memiliki kepercayaan (*trust*) dan keterbukaan (transparansi) antara satu dengan yang lainnya
  - Adanya proses penyamaan budaya dan etos kerja masing-masing pihak (*stakeholder*) dalam badan kerja sama daerah.
  - Perlu adanya penataan pembatasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (*stakeholder*) dalam badan kerja sama daerah.
  - Penyamaan sistem *reward* dan *punishment* bagi setiap *stakeholder* yang terlibat dalam kelembagaan kerja sama daerah termasuk didalamnya berkaitan dengan sistem renumerasi.
5. Untuk membentuk suatu BUMD diperlukan alokasi anggaran dari kedua pemerintah kabupaten dan alokasikan sumber daya daerah di Dataran Tinggi Dieng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Benjamin, 2005. *Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing*. Semarang: LEKAD.
- Djogo, Toni. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Dukungan Legalitas Terhadap Kelembagaan Sekber Kartamantul*. 2005. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Kartamantul.
- Edralin, J.S. 1997. The new local governance and capacity building: A strategic approach. Dalam *Regional Development Studies*, Vol. 3.
- Fandeli, Chafid (ed), 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Foto Dieng Plateau Theatre*, 2009. Wonosobo: dalam <http://www.wonosobokab.go.id>. diakses pada 25 Mei 2009
- Foto-Foto: Ali Budiman, 2008. *Anugerah Di Balik Kabut Dataran Tinggi Dieng*, Wonosobo: dalam <http://www.life-photoz.blogspot.com/2008/09/anugerah-di-balik-kabut-dataran-tinggi.html> diakses pada 25 Mei 2009
- Hardjito, Dydiet. 1994. *Perencanaan dengan Pendekatan PIP (Perfoemance Improvement Planning) dan pemecahan Masalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoesein, Asrul. 2009. *Skenario Kerjasama Antar Daerah*. Semarang: dalam <http://www.lekad.org/content/skad> diakses pada 25 Mei 2009.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning: an Intergrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2007*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, 2007.
- Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2007*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. 2007.
- Kartamantul Sektoral*. 2008. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Kartamantul.
- Keban, Yeremias T. 2009. *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip*. Jakarta: dalam <http://www.bappenas.go.id/node/12/1193/kerjasama-antar-pemerintah-daerah-dalam-era-otonomi-oleh-yeremias-t-keban/> diakses pada 25 Mei 2009.
- Keputusan Bersama Bupati Kabupaten Banjarnegara Dan Bupati Wonosobo Nomor 04/1995 , 20/1995 Tanggal 20 Juli 1995 tentang Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Keputusan Bersama Antara Bupati Kabupaten Banjarnegara Dan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 43, 17 Tahun 1996 tentang Penetapan Lokasi Pemungutan Retribusi Dan Besarnya Tarif Retribusi Wisatawan, Kendaraan Wisata Dan Parkir Kendaraan Wisata Di Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Keputusan Bersama Antara Bupati Kabupaten Banjarnegara Dan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 485, 17 Tahun 2002 Tanggal 1 Agustus

- 2002 tentang Kerjasama Pengelolaan Dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.
- Klipingmedia, 2005. *Untuk Menegaskan 'Dieng Banjarnegara'*. Banjarnegara: dalam <http://www.banjarnegarakab.go.id//menu.php?name=Berita&file=article&sid=45> diakses pada 25 Mei 2009
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnadi, HMA. 2002. *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja*. Malang: Taroda.
- Laporan Kegiatan*. 2008. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Kartamantul.
- Laporan Penyusunan RTBL Kawasan Dieng*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo, 2005.
- Mapping Telaah Potensi Wisata Dataran Tinggi Dieng*, Disbudpar Provinsi Jawa Tengah, 2005
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metoda-metoda Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- North, D.C. 1990, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nunn, Samuel dan Mark S. Rosentraub. 1997. *Dimensions of Interjurisdictional Cooperation*. Journal of the American Planning Association Volume 63, Issue 2 June 1997. Chicago: American Planning Association.
- Oetomo, Andi. 2006. *Hukum dan Kelembagaan dalam Metropolitan di Indonesia: Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
- Pamudji. 1985. *Kerjasama antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pengembangan Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah: Persoalan dan Peluangnya*. 2004. Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor : 556/2796 ,050/582 ,556/742/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Uji Coba Pelaksanaan Pungutan Karcis Masuk Terusan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Penjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 050/1979 ,556/598.A ,556/242/2008 Tanggal 18 Juni 2008 tentang Pungutan Karcis Masuk Terusan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Potret Kawasan Wisata Dieng dan Potensi Pengembangannya*. 2005. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo.
- PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom.
- PP No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Permendagri No 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembanguna Perkotaan

- Permendagri No. 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah
- Permendagri No. 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah*. Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Tengah. 2004.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo*. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo. 2004
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara*. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banjarnegara. 2003
- Rudana, Nyoman. 2008. *Strategi Pengembangan Pariwisata Bali*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Kepariwisata*, Terjemahan Frans Gromang. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sanctyeka, Thres. 2009. *Merajut Kepentingan, Menebar Kesejahteraan : Upaya Peningkatan Pelayanan Dasar Melalui Kerjasama Antar Daerah*. Jakarta: dalam <http://www.docstoc.com/docs/5811056/Kerjasama-Antar-Daerah> diakses pada 25 Mei 2009.
- Sanctyeka, Thres, 2009. *Panduan Pembentukan Organisasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD)*. Semarang: dalam <http://www.lekad.org/content/PanduanKSAD> diakses pada 16 Januari 2010
- Spillone, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiarto, et. Al. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Jawa Tengah Dengan Bupati Wonosobo Dan Bupati Banjarnegara Nomor 01.A ,180/01 ,497.A/2005 Tanggal 3 Januari 2005 tentang Pengembangan Kepariwisata Di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Suryantono, Tendy. 2006. *Thesis Model Kelembagaan Pengelolaan Sampah Skala Kecamatan di Kabupaten Bandung (Studi kasus: Kecamatan Cicalengka)*, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.
- Syahyuti. 2007, *Kelembagaan dan Lembaga dalam Pengembangan Agribisnis Pedesaan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Tarigan, Antonius. 2009. *Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah*. Jakarta: dalam <http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=listauth&idauth=5DW> diakses pada 25 Mei 2009.
- Tebing Longsor*, 2009. Wonosobo: dalam, <http://www.matanews.com> diakses pada 16 Januari 2010
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
- Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Winarso et.al (ed), 2002. *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Tranformasi di Indonesia*. Bandung: Departemen Teknik Planologi ITB.
- Yoeti, Oka, A., 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

## **LAMPIRAN 1**

Panduan Wawancara



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk N0.5 Lt. 3 Telp. (024) 8413880  
Semarang-Jawa Tengah

---

Kepada Yth.  
Bpk/Ibu.....  
Di-  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan panduan wawancara yang berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan rencana penelitian untuk pembuatan Tesis dengan topik :

**KAJIAN KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG**

Panduan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat/persepsi Bapak/Ibu sebagai data bagi penelitian dimaksud. Adapun identitas kami sebagai pelaksana studi ini adalah sebagai berikut :

Nama : Wahyudi  
NIM : L4D008119  
Institusi : Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas  
Diponegoro  
Alamat : Rumah Dinas Puskesmas Mojotengah  
Sarimulyo RT 03 RW 10 Kalibeber Mojotengah  
Kabupaten Wonosobo

Penelitian ini bersifat ilmiah, yang merupakan bahan untuk penyusunan Tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Tesis ini membahas tentang kerjasama daerah antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dalam bidang pariwisata pada kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng yang belum berjalan optimal. Selain itu untuk mengetahui dukungan dan hambatan yang terjadi serta format kelembagaan kerjasama antar daerah. Mengingat pentingnya kerjasama antar daerah sebagai salah satu strategi dalam menangani permasalahan pembangunan yang dikarenakan keterbatasan kabupaten/kota, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang hal ini.

Besar harapan saya agar Bapak/Ibu menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan jujur guna penyelesaian analisis Tesis yang saya kerjakan. Atas perhatian dan kesediaan wawancara ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya

Wahyudi

**PANDUAN WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....

Pendidikan terakhir : .....

Instansi : .....

Jabatan : .....

Alamat Instansi : .....

Tanggal wawancara : .....

Waktu : .....

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.
3. Apakah dengan adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sudah dapat meningkatkan kunjungan wisata?

**II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah**

4. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
5. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
6. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

**III. Format Kelembagaan Kerjasama Daerah**

7. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
8. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

**PANDUAN WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

BAPPEDA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Instansi : .....  
Tanggal wawancara : .....  
Waktu : .....

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

**II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah**

3. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
4. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
5. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

**III. Format Kelembagaan Kerjasama Daerah**

6. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
7. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

**PANDUAN WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

SETDA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Instansi : .....  
Tanggal wawancara : .....  
Waktu : .....

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

**II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah**

3. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
4. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
5. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

**III. Format Kelembagaan Kerjasama Daerah**

6. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
7. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

**PANDUAN WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA PROVINSI

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Instansi : .....  
Tanggal wawancara : .....  
Waktu : .....

**PERTANYAAN**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?
2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
3. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?
4. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

## **LAMPIRAN 2**

Hasil Wawancara

**HASIL WAWANCARA  
KERJA SAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : SETYO NUGROHO (RP01)  
Pendidikan terakhir : S1  
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Wonosobo  
Jabatan : Kabid Pengembangan Pariwisata  
Alamat Instansi : Jl. Kartini No. 3 Kab. Wonosobo  
Tanggal wawancara : 30 November 2009  
Waktu : 09.00 WIB

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerja sama Antar Daerah (DOR)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?

Jawaban :

*Kerja sama daerah diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dieng karena kawasan wisata ini terletak di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Dengan karakteristik satu kawasan berbeda wilayah administratif maka pola pendekatan pengembangan pariwisata adalah Borderless. Yaitu kegiatan pariwisata yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah. selain itu potensi Dataran Tinggi Dieng adalah pariwisata, gas bumi, holtikultura yang tentunya mempunyai banyak perbedaan kepentingan antar sektor dan antar wilayah. Permasalahan besar dataran tinggi Dieng adalah degradasi lingkungan di pegunungan Dieng yang tidak berada pada wilayah Kabupaten Wonosobo saja. Dengan adanya potensi dan permasalahan tersebut dalam penanganannya harus dengan kerja sama antar sektor dan wilayah sehingga pengembangan kawasan dapat terpadu, terintegrasi dan komprehensif*

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Jawaban :

*Walaupun seringkali banyak orang menyebut Dieng berada di Kabupaten Wonosobo akan tetapi pada kenyataannya potensi wisata di Dieng yang berada dalam wilayah hanya sedikit. Sebagian besar berada pada wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Wonosobo hanya sebagai pintu gerbang menuju kawasan Dieng. Dimana mempunyai akses yang menarik dikarenakan panorama pegunungan Dieng. Dengan adanya potensi wisata yang sedikit tetapi mempunyai kelebihan dalam aksesibilitas maka hal ini menjadi pendorong bagi kedua kabupaten untuk melakukan kerja sama daerah khususnya pariwisata.*

Kabupaten Wonosobo mempunyai kemauan dan kepentingan dalam kerja sama daerah pariwisata dengan Kabupaten Banjarnegara. Karena pariwisata merupakan potensi sebagai sumber PAD dan penanganan degradasi lingkungan di Dieng tidak bisa ditangani sendiri oleh Kabupaten Wonosobo karena letaknya di beberapa kabupaten. Selain itu Candi Dieng adalah bangunan bersejarah yang pelestariannya harus tetap dijaga. Kerja sama daerah diharapkan bisa mengoptimalkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan yang ada.

Pengelolaan dan pengembangan sebuah destinasi pariwisata tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak bisa langsung diperoleh hasilnya, oleh karenanya diperlukan suatu kerja sama antar sektor dan karena kebetulan wilayah Dieng berada pada wilayah perbatasan maka berupaya untuk menjalin kerja sama lintas kabupaten untuk meringankan pendanaan. Dengan bersama-sama tentunya lebih ringan dalam pengembangan destinasi wisata.

Karena berada pada wilayah perbatasan kerja sama daerah diharapkan sebagai wadah semua stakeholder di kedua kabupaten dan provinsi karena Dieng juga merupakan suatu kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah. Kerja sama daerah menjadi wahana koordinasi. Seringkali koordinasi kerja sama daerah dilakukan secara insidental misalnya pada masa lebaran. Semua stakeholders berkumpul untuk merumuskan dari arahan wisatawan, pengelolaan parkir, keamanan dan lain-lain.

Kerja sama daerah untuk kawasan Dieng sudah dilakukan sejak dulu karena menyadari bahwa Dieng berada pada wilayah perbatasan. Kerja sama yang dilakukan selalu disertai dengan adanya surat perjanjian atau surat kerja sama. Baik perjanjian para kepala Daerah maupun diteruskan pada Dinas Pariwisata. Bahkan membentuk suatu lembaga kerja sama, misalnya forum. Forum ini berisi semua stakeholder yang ada di kedua kabupaten. Kerja sama yang sekarang masih berlangsung adalah kerja sama dalam pungutan tiket masuk terusan kawasan poros Dieng. Dalam surat kerja sama, kerja sama ini berakhir tahun 2012 nanti. Dan dalam perjalanannya selalu ada evaluasi supaya kerja sama daerah lebih meningkat.

Dengan kerja sama daerah harapannya keterbatasan daerah bisa teratasi dan karena pada saat ini kita memasuki era otonomi daerah dimana kewenangan pengelolaan potensi daerah dilakukan oleh daerah maka dengan adanya kerja sama daerah ini bisa meredam adanya ego kedaerahan. Ego daerah ini bisa muncul karena perbedaan potensi destinasi pariwisata.

3. Apakah dengan adanya kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sudah dapat meningkatkan kunjungan wisata?

Jawaban :

Belum ada penelitian tentang itu apakah kerja sama daerah yang dilakukan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Akan tetapi semakin hari jumlah wisatawan yang menggunakan karcis terusan semakin meningkat karena dipandang lebih praktis untuk tiket masuk Objek wisata. Dan kemungkinan Objek wisata yang dikerja samakan bisa bertambah.

## II. Dukungan dan Hambatan Kerja sama Antar Daerah (DUH)

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerja sama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Setahu saya kebijakan pengembangan pariwisata termuat dalam RPJM dan RTRW. Sedangkan untuk kerja sama daerah yang masih berlangsung adanya surat kesepakatan tentang pungutan karcis masuk bersama di kawasan poros Dieng. Kesepakatan ini antara Gubernur Jawa Tengah, Bupati Banjarnegara, dan Bupati Wonosobo. Karcis masuk bersama ini untuk empat Objek di Kawasan Dieng, dua di Kabupaten Banjarnegara yaitu Komplek candi Arjuna dan Kawah Sikidang, sedangkan dua di Kabupaten Wonosobo di Telaga Warna dan Dieng Plateau Theatre (DPT).*

2. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat mendukung adanya kerja sama daerah di kawasan Dieng bisa dilihat dari adanya kesepakatan tiket terusan tadi. Dari adanya uji coba samapi pada tahap kesepakatan kerja sama. Untuk wujud dukungan penganggaran kerja sama daerah tahun 2009 tidak ada, dan kemungkinan untuk tahun-tahun mendatang juga tidak ada dikarenakan anggaran tersita untuk pilkada tahun 2010. Penganggaran kerja sama hanya pada biaya pencetakan karcis dan itu tidak setiap tahun.*

*Kerja sama tiket terusan dilakukan dengan mengidentifikasi Objek yang akan dikerja samakan dengan mapping telaah potensi untuk mengetahui Objek mana yang menarik dan tidak menarik. Kemudian koordinasi yang dilakukan dlam rangka kerja sama daerah selalu melibatkan semua stakeholder dari birokrasi sampai masyarakat. LSM dan kelompok sadar wisata selalu ikut dalam rapat-rapat koordinasi. Koordinasi ini tidak berkala karena kerja sama daerah yang ada sekarang tidak berwujud lembaga. Lembaga yang ada dulu seperti Sekretariat bersama sudah tidak berjalan.*

*Koordinasi juga melibatkan pihak provinsi Jawa Tengah. Pihak provinsi sebagai pihak yang berperan besar dalam kerja sama daerah khususnya di Dieng ini. selain salah satu inisiator, provinsi juga berperan dalam memberikan bantuan pengembangan destinasi wisata dan ikut terlibat dalam evaluasi-evaluasi kerja sama yang dilakukan.*

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerja sama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Hambatan yang dirasakan dalam pengembangan Dieng dengan kabupaten Banjarnegara adalah masalah potensi wisata Kabupaten Wonosobo yang sangat sedikit. Telaga warna masih mempunyai permasalahan dengan BKSDA karena PPnya mengatur semua taman nasional sebagai Objek wisata dikelola oleh pusat dalam hal ini BKSDA. Selain itu tidak adanya alokasi pendanaan juga menjadi kendala dalam kerja sama daerah. Masih adanya*

perbedaan kepentingan diantara kedua kabupaten karena memang pengelolaan destinasi wisata dilakukan oleh masing-masing kabupaten. Kepentingan ini terkait perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk kebijakan pengembangan destinasi wisata juga berlomba-lomba tanpa memikirkan terintegrasinya kawasan contohnya dengan dibangunnya Museum Kailasa di Banjarnegara yang didalamnya menyimpan benda-benda purbakala dan teater yang sama dengan DPT. Hal ini tentunya merugikan Kabupaten Wonosobo.

### **III.Format Kelembagaan Kerja sama Daerah (FOR)**

1. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerja sama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Peran kabupaten dalam kerja sama daerah antara lain sebagai pihak yang melakukan kerja sama daerah. Selalu berkoodinasi dengan pihak yang terkait walaupun tidak secara berkala. Koordinasi ini bersifat koordinatif saja apabila ada even atau waktu lebaran.*

*Dahulu koordinasi ini pernah dilakukan dengan adanya lembaga seperti forum dan sekretariat bersama. Akan tetapi karena beberapa hal kelembagaan ini tidak berjalan. Pada umumnya bentuk kelembagaan tidak berjalan karena beberapa faktor kendala antara lain lemahnya kompetensi SDM yang mengelola, manajemen yang relatif masih sederhana dan kurang adanya keterlibatan asosiasi, swasta dan masyarakat yang berada di kawasan wisata Dieng serta masih munculnya ego sektoral di antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Dieng. Sekber tidak berjalan menurut saya karena pada waktu itu disiapkan untuk pembentukan badan profesional yang akan mengelola dan mengembangkan kawasan wisata Dieng. Akan tetapi pda kenyataannya tidak tercapai badan tersebut sehingga peran Sekber menjadi hilang digantikan dengan rapat-rapat koordinasi antar SKPD saja.*

2. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

Jawaban :

*Dalam rapat-rapat koordinasi dahulu yang pernah dilakukan sebenarnya ada alternatif-alternatif kelembagaan dalam kerja sama daerah ini. Alternatif kelembagaan adalah investasi dari swasta. Karena dengan dikelola oleh swasta selain profesional juga menghindari kepentingan-kepentingan antar kedua kabupaten.*

**HASIL WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Rully E.B (RP02)  
Pendidikan terakhir : S1  
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Wonosobo  
Jabatan : Kasi Kerjasama, Pengembangan, Pemasaran dan Promosi  
Alamat Instansi : Jl. Kartini No. 3 Kab. Wonosobo  
Tanggal wawancara : 30 November 2009  
Waktu : 10.00 WIB

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah (DOR)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?

Jawaban :

*Sangat diperlukan kerjasama daerah karena kawasan Dieng berada pada wilayah yang berbeda administratif. Selain itu potensi dan pendanaan yang dimiliki Kabupaten Wonosobo terbatas sehingga dengan kerjasama daerah dapat mengoptimalkan keterbatasan ini. Selain itu sebenarnya pariwisata adalah sektor yang didukung oleh banyak sektor lain misal infrastruktur dan lainnya sehingga harus ada kerjasama diantara sektor-sektor tersebut. Karena di wilayah perbatasan tentunya harus ada kerjasama lintas kabupaten untuk mencapai keterpaduan kawasan.*

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Jawaban :

*Faktor yang mendorong kerjasama dengan kabupaten Banjarnegara selain karena memang berada di kawasan yang sama berbeda wilayah administrasi adalah keterbatasan potensi obyek wisata. Mapping yang pernah dilakukan tahun 2005 Obyek wisata di kawasan poros Dieng yang menarik adalah Telaga Warna dan Dieng Plateau Theatre. Akan tetapi pengelolaan Telaga Warna masih tarik ulur dengan BKSDA karena adanya aturan PP No. 18 tahun 1994. Seperti diketahui kawasan Dieng dibagi menjadi Kawasan Poros dan Jeruji. Kawasan jeruji yang menarik yang masuk di kabupaten Wonosobo juga mempunyai jarak yang cukup jauh dengan kawasan poros.*

*Selain itu Wonosobo juga masih menyimpan keterbatasan akses menuju Dieng. Wisatawan kebanyakan menuju Dieng setelah berkunjung dari Borobudur di Kabupaten Magelang. Dikarenakan Kota Semarang dan Yogyakarta sebagai*

pintu masuk wisatawan maka sebagian besar wisatawan yang menuju Dieng melalui Wonosobo karena jarak yang ditempuh lebih dekat. Terbukti pada kejadian longsor bulan Pebruari tahun 2009 yang memutuskan aksesibilitas ke Dieng dari Wonosobo jumlah kunjungan bisa turun sampai dengan 90 %. Hal ini menjadi keprihatinan pemerintah kabupaten karena akses ke Dieng sempit dan seringnya terjadi longsor yang bisa memutuskan akses

Dengan kerjasama daerah Kabupaten Wonosobo harapannya bisa mengoptimalkan potensi yang sedikit ini sehingga dapat meningkat dari segi PAD daerah. Kepentingan ini yang mengharuskan Kabupaten Wonosobo bekerjasama baik antar sektor maupun lintas wilayah. Keterbatasan yang dimiliki juga masalah pendanaan dimana untuk mengembangkan suatu destinasi wisata tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk pengembangan pariwisata sangat minim. Target PAD dari Dieng hanya rata-rata 250 juta/tahun. Oleh karenanya diperlukan sumber pembiayaan lain dan diharapkan dengan kerjasama dapat mendapatkan sumber pendanaan diluar APBD kabupaten mungkin bisa dari pihak swasta misalnya.

Setahu saya kerjasama di Dieng dengan Kabupaten Banjarnegara sudah dilakukan dari dahulu. Dari model pengelolaan bersama sampai pengelolaan sendiri-sendiri. Semua kerjasama yang ada pasti melalui MoU dan adanya surat perjanjian bersama. Surat perjanjian ini ada batas waktunya sehingga kalau dirasakan dalam evaluasinya terdapat hal-hal yang belum sesuai diadakan surat perjanjian baru.

Karena berada di wilayah perbatasan bisa dikatakan di era otonomi menjadi menjadi kawasan yang mempunyai potensi terjadinya konflik kepentingan. Oleh karenanya kerjasama daerah harus tetapa dilakukan. Harapannya tercapai pengelolaan dan pengembangan kawasan yang terpadu dan terintegrasi yang dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan PAD serta mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

3. Apakah dengan adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sudah dapat meningkatkan kunjungan wisata?

Jawaban :

Saya belum tahu apakah ada hubungan antara kenaikan jumlah wisatawan dengan kerjasama daerah yang dilakukan. Kerjasama tiket terusan hanya mempermudah wisatawan dalam mengunjungi obyek wisata yang menyebar dalam satu kawasan.

## **II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah (DUH)**

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

Kebijakan yang dilakukan tentunya dengan menselaraskan dengan sistem perencanaan daerah yang ada. Tetap konsisten untuk mengembangkan destinasi pariwisata dengan melihat keterpaduan antar sektor dan antar wilayah. Kebijakan kerjasama daerah yang ada sekarang berupa kesepakatan bersama karcis masuk terusan untuk obyek-obyek yang berada pada kawasan poros Dieng.

2. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo menurut saya sangat mendukung adanya kerjasama daerah khususnya sektor pariwisata di Dieng. Bila melihat sejarah kerjasama yang ada tentunya hampir semua pimpinan daerah di kedua kabupaten mendukung adanya kerjasama daerah. Walaupun di perjalanannya seringkali belum berjalan optimal.*

*Dukungan juga diberikan dalam koordinasi-koordinasi baik antar sektor maupun lintas kabupaten dengan Kabupaten Banjarnegara. Koordinasi dilakukan dengan semua stakeholder yang ada dari pemerintah kabupaten, LSM, pokdarwis dan sesekali bersama perguruan tinggi. Koordinasi ini untuk mempersiapkan even misal di saat menghadapi lebaran dimana wisatawan meningkat tajam yang harus dibutuhkan koordinasi antar pelaku wisata di kedua kabupaten.*

*Koordinasi yang sering dilakukan ini juga melibatkan pihak provinsi. Karena wisata Dieng dalam RIPP Jateng termasuk dalam kawasan andalan yang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Propinsi berperan aktif dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Dieng ini.*

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Hambatan yang ada adalah pendanaan yang minim. Selain itu pengelolaan sendiri-sendiri yang mempunyai kepentingan masing-masing kadangkala muncul ego kedaerahan untuk mengunggulkan potensi masing-masing. Potensi wisata yang terbatas dan aksesibilitas yang sering longsor juga menjadi keprihatinan kita dalam pengembangan di kawasan wisata Dieng.*

### **III.Format Kelembagaan Kerjasama Daerah (FOR)**

1. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Peran yang sudah dilakukan oleh kabupaten yaitu komitmen yang terus menerus untuk melakukan kerjasama daerah khususnya kerjasama daerah di sektor pariwisata yang masih berlangsung. Walaupun tidak adanya lembaga kerjasama daerah karena kelembagaan yang tidak berperan koordinasi selalu dilakukan.*

*Format kelembagaan seperti sekber tidak berjalan karena fungsinya hanya koordinatif saja sehingga bisa dilakukan tanpa adanya kelembagaan. Pengelolaan yang ada sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membentuk UPTD dan untuk Kabupaten Wonosobo, pengelolaan Dieng berada pada UPTD Garung.*

2. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

Jawaban :

*Format kelembagaan yang sesuai menurut saya adalah semacam badan usaha bisa berupa Badan Usaha Miliki Daerah maupun Badan Swasta yang mengelola kawasan dengan saham yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten dan pembagian hasil disesuaikan dengan saham atau sumber daya daerah yang dipunyai. Dengan adanya badan ini kawasan menjadi satu tidak ada istilah Wonosobo dan Banjarnegara. Badan ini berisikan orang-orang swasta yang profesional sehingga pengembangan Dieng bisa maksimal.*

**HASIL WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

BAPPEDA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Tri Untoro (RP03)  
Pendidikan terakhir : S1  
Instansi : Bappeda Kabupaten Wonosobo  
Jabatan : Kabid Data Dan Litbang  
Alamat Instansi : Jl. Pemuda No. 8 Kab. Wonosobo  
Tanggal wawancara : 12 Desember 2009  
Waktu : 11.00 WIB

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah (DOR)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?

Jawaban :

*Untuk kawasan Dieng sangat diperlukan kerjasama daerah. Karena kebetulan berada dalam satu kawasan dengan perbedaan wilayah administratif. Selain itu pariwisata sendiri sebenarnya borderless tidak terbatas teritorialnya sehingga harus dilakukan kerjasama antar sektor dan lintas wilayah. dengan kerjasama daerah potensi obyek wisata bisa menjadi lebih optimal dan mampu meningkatkan ekonomi baik bagi kabupaten yang bersangkutan maupun bagi masyarakat sekitar.*

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Jawaban :

*Pendorong Kabupaten Wonosobo untuk melakukan kerjasama daerah menurut saya adalah karena kebutuhan kedua belah pihak dalam hal ini mempunyai kepentingan yang sama dalam mengembangkan Dieng. Selain itu potensi wisata di Dieng yang dimiliki Kabupaten Wonosobo kalah dibanding dengan potensi wisata yang berada di Kabupaten Banjarnegara.*

*Keterbatasan lain adalah pendanaan. Dengan alokasi anggaran yang terbatas harus bekerja sama dengan kabupaten lain untuk bersama-sama mengembangkan kawasan.*

*Masalah ego daerah yang sering muncul juga menjadi faktor pendorong untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain terutama Kabupaten Banjarnegara. Era otonomi daerah dimana kewenangan potensi-potensi ekonomi diberikan kepada daerah seringkali menimbulkan dampak negatif terjadinya ego kedaerahan yang berlebihan. Dengan kerjasama daerah diharapkan dapat meredam ego kedaerahan karena pada dasarnya mempunyai kepentingan yang sama dalam*

upaya memajukan kawasan. Koordinasi lintas kabupaten untuk pariwisata Dieng telah meredam permasalahan-permasalahan pelaksanaan pengelolaan pariwisata. Permasalahan yang sering muncul yaitu pengarahan arus wisatawan di musim lebaran dan pengelolaan lahan parkir.

## **II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah (DUH)**

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Kebijakan yang dilakukan bahwa kerjasama daerah telah dimasukan dalam RPJMD masuk dalam perencanaan ruang. Karena manfaat yang besar dalam kerjasama daerah maka kebijakan-kebijakan memuat adanya kerjasama daerah sebagai arahan ataupun strategi perencanaan.*

2. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Menurut saya dukungan yang diberikan pimpinan daerah sudah mendukung. Hal ini bisa kita lihat bahwa pimpinan daerah selalu melakukan kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama daerah. Akan tetapi memang dalam dukungan pendanaan kurang. Hal ini menurut saya karena pemahaman tentang kerjasama daerah antar pimpinan daerah misalnya eksekutif dan legislatif belum sama dan karena keterbatasan anggaran dalam pengelolaan pembangunan di daerah. Sehingga dari skala prioritas pendanaan kerjasama daerah tidak ada.*

*Walaupun tidak ada anggaran koordinasi tetap dilakukan. Dan ini tidak saja dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan akan tetapi melibatkan semua stakeholder di kedua kabupaten. Untuk Bappeda selalu dilibatkan dalam monev yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Dieng. Pihak Provinsi juga berperan aktif dalam pengembangan di Dieng ini karena memang kawasan Dieng adalah termasuk kawasan Andalan bagi Provinsi Jawa Tengah.*

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Hambatan yang ada menurut saya adalah keterbatasan potensi yang bisa menimbulkan perbedaan kepentingan yang pada akhirnya berjalan sendiri-sendiri karena untuk alasan peningkatan PAD, selain itu pendanaan yang minim. Selain itu adanya kewenangan pengelolaan yang masih menjadi permasalahan dengan BKSDA.*

### **III. Format Kelembagaan Kerjasama Daerah (FOR)**

1. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Peran yang dilakukan oleh kabupaten adalah dengan terus berkomitmen dalam kerjasama daerah. Terus mendukung kerjasama adanya pungutan karcis masuk terusan di kawasan poros Dieng. Walaupun tidak dilembagakan selalu ada koordinasi stakeholder baik berupa FGD maupun rapat-rapat koordinasi lain seperti evaluasi.*

2. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

Jawaban :

*Seyogyanya memang kerjasama daerah dengan membentuk badan kerjasama. Dengan badan kerjasama ini tujuan dan visi dari kerjasama daerah kemungkinan akan lebih mudah diraih. Untuk kerjasama di Dieng menurut saya mungkin akan lebih baik dengan investasi dari Swasta sehingga tidak terjadi konflik kepentingan diantara kedua kabupaten. Harus mencari investor yang memang benar-benar mempunyai keinginan yang kuat dalam pengembangan pariwisata dan memahami pengembangan pariwisata berkelanjutan karena Dieng mempunyai permasalahan dalam degradasi lingkungan. Badan ini mampu menselaraskan antara pariwisata dengan pelestarian lingkungan.*

**HASIL WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Ibnu Hasan (RP04)  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banjarnegara  
Jabatan : Kepala UPTD Dataran Tinggi Dieng  
Alamat Instansi : Jl. Selomanik No. 35 Kab. Banjarnegara  
Tanggal wawancara : 14 Desember 2009  
Waktu : 11.00 WIB

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah (DOR)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?

Jawaban :

*Tentunya perlu adanya kerjasama di Dieng karena Dieng berada dalam satu kawasan dan terbagi menjadi dua wilayah administratif. Dalam satu kawasan dan berbeda wilayah tentunya harus ada penyatuan sehingga bisa memadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain itu walaupun Potensi wisata Kabupaten Banjarnegara besar tetapi saat ini akses sebagian besar lewat Kabupaten Wonosobo. Sehingga harus ada pengembangan akses dan hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kabupaten Banjarnegara. Harus berkerjasama dengan kabupaten lain. Permasalahan-permasalahan dalam pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan kerjasama antar sektor dan lintas kabupaten.*

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Jawaban :

*Potensi obyek wisata Dieng Kabupaten Banjarnegara lebih banyak daripada obyek wisata Dieng Wonosobo. Dengan potensi yang banyak ini tentu harus dimaksimalkan dalam pengembangannya. Seringkali orang mengira bahwa obyek wisata Dieng berada di Kabupaten Wonosobo. Apa permasalahannya karena memang Kabupaten Wonosobo telah menjadi semacam gerbang pintu masuk untuk kawasan wisata Dieng. Sebagian besar wisatawan memang melewati akses di Kabupaten Wonosobo karena akses ini lebih dekat dan mempunyai panorama pegunungan Dieng yang indah. Kabupaten Banjarnegara memang mempunyai keterbatasan dalam akses jalan menuju kawasan Dieng. Selain jarak yang jauh, tidak adanya titik-titik yang menarik di sepanjang perjalanan menjadikan sebagian besar wisatawan lebih memilih lewat akses dari Kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya harus ada pengembangan akses menuju Dieng*

sehingga wisatawan bisa memilih jalur yang dikehendaki mengingat jalan yang sempit dan seringnya bencana longsor pada akses di Kabupaten Wonosobo.

Selain mengembangkan obyek wisata yang ada, Kabupaten Banjarnegara berupaya meningkatkan atraksi di kawasan Dieng dengan menawarkan paket-paket kegiatan wisata diantaranya paket kendi (kentang dieng) dan paket purdi (purwaceng dieng). Dengan adanya paket kegiatan ini wisatawan diajak untuk berinteraksi dengan budaya setempat dan menikmati dinginnya Dieng.

Kepentingan yang sama dalam pengembangan pariwisata dimana menjadi sumber PAD bagi daerah masing-masing mendorong adanya kerjasama daerah. Harapannya kerjasama daerah dapat membuat optimalnya pengembangan pariwisata di Dieng.

Keterbatasan daerah dalam mengelola potensi juga mendorong untuk terjadinya kerjasama daerah. Dengan kerjasama daerah, pendanaan dalam pengembangan obyek wisata menjadi lebih ringan atau paling tidak meningkat. Pengembangan pariwisata membutuhkan dana yang besar dan keterlibatan semua sektor dan tidak bisa secara instan diperoleh hasilnya. Butuh kerja keras dan kerjasama dalam pengelolaan maupun pengembangannya.

Selain itu dengan adanya kerjasama daerah bisa menjadi wadah stakeholder pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Koordinasi lebih mudah dilakukan dengan para pelaku pariwisata. Koordinasi yang dilakukan dalam kerjasama dengan Kabupaten Wonosobo selalu dilakukan walau tidak secara berkala. Koordinasi sangat penting mengingat sering timbulnya permasalahan di lapangan. Dengan kerjasama daerah diharapkan tercapai keterpaduan dalam pengembangan kawasan

Setahu saya, kerjasama Dieng dilakukan dengan adanya surat perjanjian. Perjanjian yang masih berlangsung adalah perjanjian untuk pungutan karcis masuk terusan kawasan poros. Karena dipandang baik maka perjanjian dilanjutkan sampai tahun 2012. Dengan adanya kerjasama daerah di Dieng diharapkan permasalahan keterbatasan-keterbatasan daerah bisa diatasi. Pengembangan Kawasan wisata lebih optimal dan meredam konflik-konflik yang kemungkinan muncul karena perbedaan kepentingan dan berada pada wilayah perbatasan

3. Apakah dengan adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sudah dapat meningkatkan kunjungan wisata?

Jawaban :

Setahu saya belum ada kajian atau yang menghubungkan adanya kenaikan kerjasama daerah dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Dieng. Adanya karcis masuk terusan menambah praktis pengunjung untuk menikmati obyek wisata di Dieng.

## II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah (DUH)

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Kebijakan tentang kerjasama daerah sudah sejalan dengan RTRW, RPJM maupun Rencana Strategis yang kami buat. Kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan dalam surat kesepakatan bersama dan rapat-rapat koordinasi lintas wilayah. Untuk tiket terusan alokasi obyek wisata yang dikerjasamakan adalah komplek candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Karena kedua obyek ini memang menarik dari sisi atraksi. Sebagai peninggalan bersejarah dan fenomena alam yang menakjubkan.*

2. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendukung adanya kerjasama daerah bisa dilihat dari adanya kerjasama dalam pungutan karcis masuk terusan. Selain itu dapat dilihat dari kronologis kerjasama yang pernah dilakukan. Karena masih bersifat koordinatif dukungan pendanaan hanya pada pencetakan karcis terusan dengan bersama-sama dengan Kabupaten Wonosobo.*

*Kerjasama yang ada sekarang dilakukan dengan membuat mapping potensi wisata yang ada dan identifikasi kebutuhan daerah terhadap sektor yang dikerjasamakan belum ada. Harapan kami karena isu di Dieng bukan saja sektor pariwisata, sektor lain menjadi sektor yang bisa dikerjasamakan. Contohnya Lingkungan, infrastruktur dan pembangunan akses. Dengan sektor yang cakupannya luas maka pengembangan pariwisata untuk mencapai keterpaduan akan semakin mudah. Hal ini karena sektor-sektor yang lain sangat erat hubungannya dengan pariwisata.*

*Dukungan stakeholder dalam koordinasi kerjasama daerah bisa dilihat dalam rapat-rapat baik perencanaan maupun monev. Dari unsur pemerintah, LSM, Pokdarwis bersatu dalam rangka pengembangan Dieng. Walaupun kerjasama daerah ini tidak mempunyai lembaga. Lembaga yang ada dipandang hanya bersifat koordinatif saja tanpa tujuan yang jelas dan konsep yang belum disepakati.*

*Dukungan provinsi juga sangat besar bagi pengembangan Dieng. Kabupaten Banjarnegara berterimakasih karena telah mendapat bantuan dalam pengembangan pariwisata di Dieng. Pelaksanaan fisik maupun peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dilakukan oleh pihak provinsi. Dalam kerjasama daerah provinsi juga turut serta dalam surat perjanjian kerjasama daerah.*

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Hambatan yang masih dirasakan bagi Kabupaten Banjarnegara adalah masih adanya kebijakan daerah yang mengarah kepada ego kedaerahan. Wisatawan sering merasa tidak nyaman mengenai tiket di Dieng. Salah*

satunya tiket yang ditarik di Garung Kabupaten Wonosobo. Karena tidak disertai penjelasan mereka merasa sudah membayar tiket untuk masuk kawasan Dieng. Padahal tiket tersebut hanya untuk melintasi akses menuju Dieng dengan melintasi panorama Dieng di setiap obyek masih ditarik tiket lagi. Hambatan lain adalah tidak terintegrasinya perencanaan di Dieng. Hal ini membuat adanya dua kepentingan yang berbeda dan prioritas pengembangan pariwisata.

### **III. Format Kelembagaan Kerjasama Daerah (FOR)**

1. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Peran Kabupaten adalah mengalokasikan obyek wisata dan pendanaan bagi kerjasama daerah. Selain itu terus melakukan koordinasi lintas wilayah. Untuk kelembagaan yang pernah ada yaitu Sekber menurut saya tidak sesuai karena kerjasama daerah yang dilakukan masih sektor yang kecil dan kawasan yang kecil. Sekber harusnya mewadahi sektor lain selain pariwisata dan mungkin bisa tidak hanya Dieng akan tetapi seluruh kabupaten. Karena Sekber yang pernah ada hanya bersifat koordinatif saja maka tidak berjalan. Selain itu dengan pengelolaan yang sekarang pengembangan kawasan Dieng masih bisa tertangani dan perkembangannya semakin baik.*

2. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

Jawaban :

*Sebenarnya kami menyambut baik adanya pemikiran kelembagaan yang profesional di Kawasan Dieng dimana alternatifnya adalah investasi. Dan kabupaten Banjarnegara pun sudah berupaya untuk mengalokasikan kawasan untuk ditawarkan kepada investor untuk dikembangkan contohnya kawasan Sibira Dieng. Akan tetapi kendalanya adalah untuk mendapatkan investor bukanlah hal yang mudah dan mungkin memerlukan waktu. Sehingga seandainya ada kelembagaan untuk waktu yang dekat adalah dengan penguatan kelembagaan kerjasama leboh dahulu. Perlu identifikasi sektor dan tujuan yang jelas dari kelembagaan tersebut. Dan jika memungkinkan dibentuk badan usaha untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan Dieng.*

**HASIL WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

BAPPEDA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Dyah Setyanggar, S.Si, MT (RP05)  
Pendidikan terakhir : S2  
Instansi : Bappeda Kabupaten Banjarnegara  
Jabatan : Kasubid Penanaman Modal, Pengembangan Dunia  
Usaha dan Pariwisata  
Alamat Instansi : Jl. Dipayuda No. 30A Kab. Banjarnegara  
Tanggal wawancara : 7 Januari 2010  
Waktu : 10.00 WIB

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah (DOR)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?

Jawaban :

*Dalam kawasan Dieng sangat perlu adanya kerjasama baik kerjasama antar sektor maupun kerjasama antar wilayah. Antar wilayah kabupaten terjadi saling ketergantungan dikarenakan masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Hal ini menjadikan kebutuhan akan kerjasama begitu besar karena adanya hubungan saling membutuhkan atau prinsip supply and demand. Dengan ketergantungan diperlukan suatu kerjasama antar wilayah. Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi yang besar baik pariwisata maupun pertanian di kawasan Dieng. Akan tetapi mempunyai beberapa kekurangan di sektor-sektor yang lain, misalnya akses, pendanaan dan sebagainya.*

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Jawaban :

*Salah satu pendorong Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan kerjasama daerah karena potensi dan keterbatasan daerah yang dimiliki. tentunya dengan keunggulan potensi dan keterbatasan yang dimiliki menjadikan Kabupaten Banjarnegara tidak bisa berdiri sendiri dalam pengembangan kawasan Dieng.*

*Pendorong yang lain yaitu kesamaan kepentingan. Kerjasama daerah dalam pengembangan pariwisata Dieng diharapkan akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis berupa PAD dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu dibutuhkan keterpaduan untuk menangani permasalahan di kawasan terutama permasalahan degradasi lingkungan karena pola pertanian kentang yang tidak ramah lingkungan.*

Kabupaten Banjarnegara memiliki keterbatasan dalam pendanaan pembangunan. Dengan ada kerjasama daerah diharapkan mendapatkan sumber pembiayaan lain untuk pembangunan. Untuk pariwisata dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pengembangan destinasi wisata dan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pariwisata.

Selain itu adalah karena berada pada wilayah perbatasan maka bisa dimungkinkan terjadi ego kedaerah atau konflik. Sehingga tepat adanya kerjasama daerah untuk membuat keterpaduan kawasan dan memudahkan para stakeholder dalam berkoordinasi.

## **II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah (DUH)**

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Kebijakan kerjasama daerah sudah sesuai dengan kebijakan sistem perencanaan daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Kebijakan ini diterjemahkan dalam keikutsertaan dalam Barlingmascakeb dan koordinasi pengembangan kawasan wisata dengan kabupaten Wonosobo*

2. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Dukungan dari pimpinan daerah cukup mendukung dalam kerjasama daerah. Kerjasama daerah Barlingmascakep telah memberikan manfaat secara ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya kerjasama daerah pada sektor pariwisata di Dieng juga memberikan manfaat juga bagi perekonomian. oleh karenanya kabupaten Banjarnegara tetap mendukung kerjasama adanya pungutan tiket terusan bersama dengan Kabupaten Wonosobo.*

*Selain itu wujud dukungan adalah sinergisnya kerjasama daerah dengan sistem perencanaan daerah yang memang harus diterjemahkan dalam pelaksanaan program-program. Semua stakeholder di Kabupaten banjarnegara juga berperan aktif dalam koordinasi pengembangan kawasan Dieng baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku pariwisata.*

*Menurut saya keberlangsungan kerjasama daerah di Dieng tidak terlepas dari pihak provinsi yang secara aktif baik dalam inisiatif, fasilitator maupun bantuan pembangunan di kawasan Dieng.*

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Hambatan yang ada adalah identifikasi kebutuhan kerjasama yang belum dilakukan sehingga untuk pariwisata masih bisa dilakukan sendiri dan koordinasi bisa bersifat koordinatif menjadikan kerjasama daerah tidak optimal. Selain itu belum adanya rencana induk yang terpadu dalam pengembangan kawasan wisata Dieng sehingga pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten bisa tidak sejalan.*

### **III.Format Kelembagaan Kerjasama Daerah (FOR)**

1. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Kabupaten Banjarnegara terus komitmen dalam kerjasama daerah di bidang pariwisata dengan Kabupaten Wonosobo dan berupaya untuk terus berkoordinasi dalam pengembangan kawasan.*

2. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

Jawaban :

*Menurut saya Sekber mungkin bisa dilanjutkan kembali akan tetapi harus ada identifikasi kebutuhan sektor yang dikerjasamakan. Selain itu tujuan dan visi dari lembaga ini jelas. Dengan adanya kelembagaan yang mempunyai tujuan yang sama dalam pengembangan kawasan akan lebih bisa terlihat manfaatnya. Kemungkinan juga bisa SDM lembaga ini dari swasta sehingga lebih concern dan profesional dalam menangani pengelolaan dan pengembangan kawasan.*

**HASIL WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

TAPEM SETDA KABUPATEN

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Edi Sarwono, S.Sos, M.M (RP06)  
Pendidikan terakhir : S2  
Instansi : Bagian Tapem Setda Kabupaten Banjarnegara  
Jabatan : Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama  
Alamat Instansi : Jl. A. Yani No. 16 Kab. Banjarnegara  
Tanggal wawancara : 7 Januari 2010  
Waktu : 12.00 WIB

**PERTANYAAN**

**I. Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah (DOR)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa?

Jawaban :

*Sangat perlu karena Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi yang besar pada sektor pariwisata. Selain potensi yang besar akan tetapi memiliki keterbatasan daerah untuk pengelolaan dan pengembangan. Keterbatasan daerah yang paling dirasakan adalah aksesibilitas kawasan. Dikarenakan jarak yang jauh dari Kota Banjarnegara, wisatawan sebagian besar melalui kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya dalam penanganannya harus dilakukan kerjasama lintas kabupaten terutama dengan Kabupaten Wonosobo*

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendorong adanya kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng.

Jawaban :

*Yang mendorong adanya kerjasama yaitu walaupun memiliki potensi yang besar akan tetapi memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas kawasan. Akses ini harus dikembangkan tetapi terbentur adanya pendanaan yang tidak sedikit. Faktor yang lain adalah kesamaan kepentingan dalam mengembangkan potensi untuk peningkatan perekonomian daerah. Selain itu permasalahan yang ada di Dieng tidak bisa ditangani oleh Kabupaten Banjarnegara sendiri. adanya degradasi pegunungan Dieng harus ditangani bersama secara lintas wilayah.*

*Kelembagaan kerjasama di Kabupaten Banjarnegara adalah Barlingmascakeb, yaitu kerjasama daerah dengan lima kabupaten dengan tujuan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing. Untuk kerjasama pariwisata Dieng dengan Kabupaten Wonosobo belum ada kelembagaan. Hanya rapat koordinasi antar instansi. Sekber yang pernah ada sudah tidak berjalan. Kabupaten Banjarnegara perlu bekerjasama dengan kabupaten Wonosobo dalam menangani kawasan Dieng karena berbagai kepentingan dan permasalahan.*

Karena berbatasan administratif diharapkan bisa meredam konflik dan ego sektoral

## **II. Dukungan dan Hambatan Kerjasama Antar Daerah (DUH)**

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Kebijakan kerjasama daerah sudah sesuai dengan kebijakan sistem perencanaan daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Kebijakan ini diterjemahkan dalam keikutsertaan dalam Barlingmascakeb dan koordinasi pengembangan kawasan wisata dengan kabupaten Wonosobo*

2. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Dukungan dari pimpinan untuk kerjasama daerah cukup besar. Karena Banjarnegara termasuk dalam kelembagaan RM Barlingmascakeb maka isu kerjasama daerah menjadi penting bagi pembangunan di daerah. Untuk kerjasama di Dieng dukungan dengan selalu bersepakat dengan surat perjanjian untuk pengembangan Dieng.*

*Selain itu dukungan diwujudkan dengan mengintegrasikan isu kerjasama daerah dengan sistem perencanaan daerah yang ada misalnya RPJM. Menurut saya kerjasama daerah di Dieng tidak terlepas dari peran yang aktif Provinsi Jawa Tengah sehingga kerjasama bisa terus berjalan.*

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Hambatan yang ada menurut saya kerjasama yang ada masih bersifat koordinatif saja tentunya ini bisa ditingkatkan dalam suatu kelembagaan yang mempunyai visi dan misi untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata yang terpadu.*

## **III.Format Kelembagaan Kerjasama Daerah (FOR)**

1. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng?

Jawaban :

*Peran Kabupaten terus berkomitmen dalam kerangka kerjasama daerah. Harapannya kerjasama lebih ditingkatkan lagi sehingga pengembangan kawasan lebih optimal dan terpadu*

2. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif?

Jawaban :

*Menurut saya memang harus ada kelembagaan misalnya Barlingmascakeb, sehingga mempunyai tujuan dan program yang jelas. Harus ada penyatuan lebih dahulu persepsi masing-masing kabupaten lembaga apa yang diinginkan. kelembagaan kerjasama daerah atau badan usaha pengelola kawasan.*

**HASIL WAWANCARA  
KERJASAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA  
DATARAN TINGGI DIENG**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA PROVINSI

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Drs. Raharja, M.Si (RP07)  
Pendidikan terakhir : S2  
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah  
Jabatan : Kasubag Program  
Alamat Instansi : Jl. Pemuda No. 136 Semarang  
Tanggal wawancara : 19 Januari 2010  
Waktu : 10.00 WIB

**PERTANYAAN**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng antara Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo ? Jika YA mengapa dan jika TIDAK mengapa? (DOR)

Jawaban :

*Sangat perlu karena Dataran Tinggi Dieng dalam RIPP Jawa Tengah termasuk dalam kawasan Andalan yang mempunyai fungsi kuat dalam skala regional. Dengan adanya otonomi daerah kewenangan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata dilakukan oleh daerah. Karena berada pada dua wilayah administratif yang berbeda untuk lebih mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang berimbas pada hilangnya panorama alam yang dimiliki membutuhkan kerjasama lintas wilayah*

2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dalam pengembangan dan kerjasama daerah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng? (DUH)

Jawaban :

*Selain dalam RIPP kawasan Dieng termasuk dalam Kawasan andalan kebijakan Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan pendanaan dalam pembangunan daya tarik wisata dan perbaikan serta pemeliharaan fasilitas obyek wisata. Pembangunan obyek wisata buatan Dieng Plateau Theatre, Museum Kailasa, Renovasi kompleks candi Arjuna, Pembangunan Tourism Information Center (TIC) wujud dari kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan kepariwisataan*

3. Bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam kerjasama daerah bidang pariwisata kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng? (FOR1)

Jawaban :

*Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pada sektor pariwisata di Kawasan Dieng oleh Provinsi Jawa Tengah diantaranya dengan memfasilitasi Bisnis Development Center bagi forum klaster pariwisata Dieng, mengembangkan SDM pelaku pariwisata dengan melakukan study banding ke kawasan pengembangan pariwisata yang dipandang berhasil, meningkatkan ketrampilan masyarakat yang tergabung dalam forum klaster pariwisata Dieng untuk bisa membuat barang-barang souvenir yang bisa dijual kepada wisatawan, memfasilitasi kelompok-kelompok Sadar Wisata di Kawasan Dieng*

4. Menurut Bapak/Ibu apa dan bagaimana format kelembagaan yang sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di daerah perbatasan administratif? (FOR2)

Jawaban :

*Menurut saya kelembagaan bisa suatu badan yang profesional dan terpadu. Badan ini mempunyai otoritas untuk mengelola dan mengembangkan kawasan. Tidak hanya memungut karcis retribusi akan tetapi mampu mengelola, memelihara, dan mengembangkan daya tarik pariwisata di Kawasan Dieng. Dalam hal pendanaan awal bisa dilakukan dengan sharing, personil bisa dari kalangan PNS dan juga swasta. Bentuk lembaga patungan dari 2 (dua) Kabupaten bisa berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama atau semi swasta sehingga Kawasan Dieng bisa ditangani lebih baik. Dengan manajemennya yang jelas, penganggaran, kinerja dan pertanggungjawaban yang jelas diharapkan pengembangan kawasan Dieng menjadi optimal, terpadu dan komprehensif*

### **LAMPIRAN 3**

#### Kodefikasi Data



NO	KODE	INFORMASI YANG DIPEROLEH
4.	RP05/DOR1/1/2	...Antar wilayah kabupaten terjadi saling ketergantungan dikarenakan masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Hal ini menjadikan kebutuhan akan kerjasama begitu besar karena adanya hubungan saling membutuhkan atau prinsip supply and demand. Dengan ketergantungan diperlukan suatu kerjasama antar wilayah...
5.	RP06/DOR1/1/1	...Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi yang besar pada sektor pariwisata. Selain potensi yang besar akan tetapi memiliki keterbatasan daerah untuk pengelolaan dan pengembangan. Keterbatasan daerah yang paling dirasakan adalah aksesibilitas kawasan. Dikarenakan jarak yang jauh dari Kota Banjarnegara, wisatawan sebagian besar melalui kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya dalam penanganannya harus dilakukan kerjasama lintas kabupaten terutama dengan Kabupaten Wonosobo
6.	RP04/DOR1/1/2	<i>... Dalam satu kawasan dan berbeda wilayah tentunya harus ada penyatuan sehingga bisa memadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda...</i>
7.	RP07/DOR1/1/1	...Dataran Tinggi Dieng dalam RIPP Jawa Tengah termasuk dalam kawasan Andalan yang mempunyai fungsi kuat dalam skala regional. Dengan adanya otonomi daerah kewenangan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata dilakukan oleh daerah. Karena berada pada dua wilayah administratif yang berbeda untuk lebih mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang berimbas pada hilangnya panorama alam yang dimiliki membutuhkan kerjasama lintas wilayah
8.	RP02/DOR2/1/2	...Mapping yang pernah dilakukan tahun 2005 Obyek wisata di kawasan poros Dieng yang menarik adalah Telaga Warna dan Dieng Plateau Theatre. Akan tetapi pengelolaan Telaga Warna masih tarik ulur dengan BKSDA karena adanya aturan PP No. 18 tahun 1994...
9.	RP01/DOR2/1/1	<i>...pada kenyataannya potensi wisata di Dieng yang berada dalam wilayah hanya sedikit. Sebagian besar berada pada wilayah Kabupaten Banjarnegara...</i>
10.	RP03/DOR2/1/2	<i>...potensi wisata di Dieng yang dimiliki Kabupaten Wonosobo kalah dibanding dengan potensi wisata yang berada di Kabupaten Banjarnegara.</i>
11.	RP02/DOR2/2/2	...Wisatawan kebanyakan menuju Dieng setelah berkunjung dari Borobudur di Kabupaten Magelang. Dikarenakan Kota Semarang dan Yogyakarta sebagai pintu masuk wisatawan maka sebagian besar wisatawan yang menuju Dieng melalui Wonosobo karena jarak yang ditempuh lebih dekat. Terbukti pada kejadian longsor bulan Pebruari tahun 2009 yang memutuskan aksesibilitas ke Dieng dari Wonosobo jumlah kunjungan bisa turun sampai dengan 90 %. Hal ini menjadi keprihatinan pemerintah kabupaten karena akses ke Dieng sempit dan seringnya terjadi longsor yang bisa memutuskan akses
12.	RP01/DOR2/1/3	<i>...Wonosobo hanya sebagai pintu gerbang menuju kawasan Dieng. Dimana mempunyai akses yang menarik dikarenakan panorama pegunungan Dieng. Dengan adanya potensi wisata yang sedikit tetapi mempunyai kelebihan dalam aksesibilitas...</i>
13.	RP04/DOR2/1/6	...Kabupaten Banjarnegara memang mempunyai keterbatasan dalam akses jalan menuju kawasan Dieng. Selain jarak yang jauh, tidak adanya titik-titik yang menarik di sepanjang perjalanan menjadikan sebagian besar wisatawan lebih memilih lewat akses dari Kabupaten Wonosobo...

NO	KODE	INFORMASI YANG DIPEROLEH
14.	RP06/DOR2/1/1	...akan tetapi memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas kawasan. Akses ini harus dikembangkan tetapi terbentur adanya pendanaan yang tidak sedikit...
15.	RP04/DOR2/2/1	...Selain mengembangkan obyek wisata yang ada, Kabupaten Banjarnegara berupaya meningkatkan atraksi di kawasan Dieng dengan menawarkan paket-paket kegiatan wisata diantaranya paket kendi (kentang dieng) dan paket purdi (purwaceng dieng)...
16.	RP01/DOR2/2/1	Kabupaten Wonosobo mempunyai kemauan dan kepentingan dalam kerjasama daerah pariwisata dengan Kabupaten Banjarnegara. Karena pariwisata merupakan potensi sebagai sumber PAD dan penanganan degradasi lingkungan di Dieng tidak bisa ditangani sendiri oleh Kabupaten Wonosobo karena letaknya di beberapa kabupaten. Selain itu Candi Dieng adalah bangunan bersejarah yang pelestariannya harus tetap dijaga. Kerjasama daerah diharapkan bisa mengoptimalkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan yang ada.
17.	RP02/DOR2/2/1	...harapannya bisa mengoptimalkan potensi yang sedikit ini sehingga dapat meningkat dari segi PAD daerah. Kepentingan ini yang mengharuskan Kabupaten Wonosobo bekerjasama baik antar sektor maupun lintas wilayah...
18.	RP05/DOR2/2/2	...Kerjasama daerah dalam pengembangan pariwisata Dieng diharapkan akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis berupa PAD dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu dibutuhkan keterpaduan untuk menangani permasalahan di kawasan terutama permasalahan degradasi lingkungan karena pola pertanian kentang yang tidak ramah lingkungan.
19.	RP04/DOR2/3/1	Kepentingan yang sama dalam pengembangan pariwisata dimana menjadi sumber PAD bagi daerah masing-masing mendorong adanya kerjasama daerah...
20.	RP02/DOR2/3/4	...Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk pengembangan pariwisata sangat minim. Target PAD dari Dieng hanya rata-rata 250 juta/tahun. Oleh karenanya diperlukan sumber pembiayaan lain...
21.	RP01/DOR2/3/1	Pengelolaan dan pengembangan sebuah destinasi pariwisata tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak bisa langsung diperoleh hasilnya..... karena kebetulan wilayah Dieng berada pada wilayah perbatasan maka berupaya untuk menjalin kerjasama lintas kabupaten untuk meringankan pendanaan...
22.	RP03/DOR2/2/1	Keterbatasan lain adalah pendanaan. Dengan alokasi anggaran yang terbatas harus bekerja sama dengan kabupaten lain...
23.	RP05/DOR2/3/1	Kabupaten Banjarnegara memiliki keterbatasan dalam pendanaan pembangunan. Dengan ada kerjasama daerah diharapkan mendapatkan sumber pembiayaan lain untuk pembangunan. Untuk pariwisata dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pengembangan destinasi wisata dan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pariwisata.
24.	RP04/DOR2/4/2	...Dengan kerjasama daerah, pendanaan dalam pengembangan obyek wisata menjadi lebih ringan atau paling tidak meningkat. Pengembangan pariwisata membutuhkan dana yang besar dan keterlibatan semua sektor dan tidak bisa secara instan diperoleh hasilnya...
25.	RP01/DOR2/4/3	...koordinasi kerjasama daerah dilakukan secara insidental misalnya pada masa lebaran. Semua stakeholders berkumpul untuk merumuskan dari arahan wisatawan, pengelolaan parkir, keamanan dan lain-lain.

NO	KODE	INFORMASI YANG DIPEROLEH
26.	RP04/DOR2/5/3	...Koordinasi yang dilakukan dalam kerjasama dengan Kabupaten Wonosobo selalu dilakukan walau tidak secara berkala. Koordinasi sangat penting mengingat sering timbulnya permasalahan di lapangan. Dengan kerjasama daerah diharapkan tercapai keterpaduan dalam pengembangan kawasan.
27.	RP06/DOR2/2/2	...Untuk kerjasama pariwisata Dieng dengan Kabupaten Wonosobo belum ada kelembagaan. Hanya rapat koordinasi antar instansi...
28.	RP03/DOR2/3/4	...Koordinasi lintas kabupaten untuk pariwisata Dieng telah meredam permasalahan-permasalahan pelaksanaan pengelolaan pariwisata. Permasalahan yang sering muncul yaitu pengarahannya wisatawan di musim lebaran dan pengelolaan lahan parkir.
29.	RP01/DOR2/6/1	...dengan adanya kerjasama daerah ini bisa meredam adanya ego kedaerahan...
30.	RP06/DOR2/3/4	...Kabupaten Banjarnegara perlu bekerjasama dengan kabupaten Wonosobo dalam menangani kawasan Dieng karena berbagai kepentingan dan permasalahan. Karena berbatasan administratif diharapkan bisa meredam konflik dan ego sektoral
31.	RP04/DOR2/6/5	... Pengembangan Kawasan wisata lebih optimal dan meredam konflik-konflik yang kemungkinan muncul karena perbedaan kepentingan dan berada pada wilayah perbatasan
32.	RP05/DOR2/4/1	...karena berada pada wilayah perbatasan maka bisa dimungkinkan terjadi ego kedaerah atau konflik. Sehingga tepat adanya kerjasama daerah...
33.	RP01/DUH2/1/3	...penganggaran kerjasama daerah tahun 2009 tidak ada, dan kemungkinan untuk tahun-tahun mendatang juga tidak ada dikarenakan anggaran tersita untuk pilkada tahun 2010...
34.	RP03/DUH2/1/3	... Akan tetapi memang dalam dukungan pendanaan kurang. Hal ini menurut saya karena pemahaman tentang kerjasama daerah antar pimpinan daerah misalnya eksekutif dan legislatif belum sama dan karena keterbatasan anggaran dalam pengelolaan pembangunan di daerah...
35.	RP01/DUH2/2/2	... koordinasi yang dilakukan dalam rangka kerjasama daerah selalu melibatkan semua stakeholder dari birokrasi sampai masyarakat. LSM dan kelompok sadar wisata selalu ikut dalam rapat-rapat koordinasi...
36.	RP02/DUH2/2/2	...Koordinasi dilakukan dengan semua stakeholder yang ada dari pemerintah kabupaten, LSM, pokdarwis dan sesekali bersama perguruan tinggi...
37.	RP03/DUH2/2/1	...koordinasi tetap dilakukan. Dan ini tidak saja dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan akan tetapi melibatkan semua stakeholder di kedua kabupaten. Untuk Bappeda selalu dilibatkan dalam monev yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Dieng...
38.	RP04/DUH2/2/1	...identifikasi kebutuhan daerah terhadap sektor yang dikerjasamakan belum ada. Harapan kami karena isu di Dieng bukan saja sektor pariwisata, sektor lain menjadi sektor yang bisa dikerjasamakan. Contohnya Lingkungan, infrastruktur dan pembangunan akses...
39.	RP04/DUH3/1/2	...Wisatawan sering merasa tidak nyaman mengenai tiket di Dieng. Salah satunya tiket yang ditarik di Garung Kabupaten Wonosobo. Karena tidak disertai penjelasan mereka merasa sudah membayar tiket untuk masuk kawasan Dieng. Padahal tiket tersebut hanya untuk melintasi akses menuju Dieng dengan melintasi panorama Dieng di setiap obyek masih ditarik tiket lagi...

NO	KODE	INFORMASI YANG DIPEROLEH
40.	RP04/DUH3/1/3	...Hambatan lain adalah tidak terintegrasinya perencanaan di Dieng. Hal ini membuat adanya dua kepentingan yang berbeda dan prioritas pengembangan pariwisata.
41.	RP05/DUH3/1/1	<i>Hambatan yang ada adalah identifikasi kebutuhan kerjasama yang belum dilakukan sehingga untuk pariwisata masih bisa dilakukan sendiri dan koordinasi bisa bersifat koordinatif menjadikan kerjasama daerah tidak optimal. Selain itu belum adanya rencana induk yang terpadu dalam pengembangan kawasan wisata Dieng...</i>
42.	RP07/DUH/1/1	...Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan pendanaan dalam pembangunan daya tarik wisata dan perbaikan serta pemeliharaan fasilitas obyek wisata. Pembangunan obyek wisata buatan Dieng Plateau Theatre, Museum Kailasa, Renovasi kompleks candi Arjuna, Pembangunan Tourism Information Center (TIC) wujud dari kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan kepariwisataan
43.	RP01/FOR1/2/3	...Pada umumnya bentuk kelembagaan tidak berjalan karena beberapa faktor kendala antara lain lemahnya kompetensi SDM yang mengelola, manajemen yang relatif masih sederhana dan kurang adanya keterlibatan asosiasi, swasta dan masyarakat yang berada di kawasan wisata Dieng serta masih munculnya ego sektoral di antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Dieng...
44.	RP02/FOR2/1/1	....Format kelembagaan yang sesuai ..... adalah semacam badan usaha bisa berupa Badan Usaha Miliki Daerah maupun Badan Swasta yang mengelola kawasan dengan saham yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten dan pembagian hasil disesuaikan dengan saham atau sumber daya daerah yang dipunyai...
44.	RP01/FOR2/1/2	<i>...Alternatif kelembagaan adalah investasi dari swasta. Karena dengan dikelola oleh swasta selain profesional juga menghindari kepentingan-kepentingan antar kedua kabupaten.</i>
45.	RP03/FOR2/1/3	<i>Untuk kerjasama di Dieng ..... mungkin akan lebih baik dengan investasi dari Swasta sehingga tidak terjadi konflik kepentingan diantara kedua kabupaten. Harus mencari investor yang memang benar-benar mempunyai keinginan yang kuat dalam pengembangan pariwisata dan memahami pengembangan pariwisata berkelanjutan...</i>
46.	RP07/FOR1/1/1	Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pada sektor pariwisata di Kawasan Dieng oleh Provinsi Jawa Tengah diantaranya dengan memfasilitasi Bisnis Development Center bagi forum klaster pariwisata Dieng, mengembangkan SDM pelaku pariwisata dengan melakukan study banding ke kawasan pengembangan pariwisata yang dipandang berhasil, meningkatkan ketrampilan masyarakat yang tergabung dalam forum klaster pariwisata Dieng untuk bisa membuat barang-barang souvenir yang bisa dijual kepada wisatawan, memfasilitasi kelompok-kelompok Sadar Wisata di Kawasan Dieng

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Wahyudi**, dilahirkan di Kabupaten Kebumen pada tanggal 27 Juli 1979, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari Bapak H. Nurhadi pensiunan PNS Pemda Kabupaten Kebumen, dan Ibu Hj. Dinarsih dan saat ini sementara bertempat tinggal di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Mojotengah Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kutosari 1 Kebumen, lulus tahun 1991. Kemudian menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMPN 1 Kebumen pada tahun 1994, dan menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kebumen pada tahun 1997. Gelar Sarjana Teknik (ST) diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurusan Teknik Arsitektur pada bulan Agustus tahun 2002. Sedangkan gelar Magister Teknik (MT) diperoleh dari Program Pascasarjana Jurusan Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang pada bulan Maret tahun 2010 melalui program beasiswa dari Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Setelah meraih gelar Sarjana (S1), penulis mengawali karir pekerjaan pada Pusat Studi Pariwisata UGM sebagai tenaga teknis untuk pekerjaan penataan enam pantai Kabupaten Gunungkidul, kemudian pada akhir tahun 2002 diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan ditugaskan sebagai staf teknis Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo hingga sekarang.

Status perkawinan penulis telah menikah pada tahun 2003 dengan dr. Sir Panggung Tri Subekti dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang manis dengan anak pertama putri : Sir Chandra Sanidhya Phratiwi, anak kedua putra : Sir Arkha Shatvika Dhita, dan anak ketiga putri : Sir Cahyaterra Kinaryoshi.